



PEMERINTAH
KABUPATEN MOROWALI

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

(LPPD) KAB. MOROWALI

TAHUN 2023



**KABUPATEN MOROWALI
GERAK CEPAT, BEKERJA IKHLAS**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023 dapat tersusun. Laporan ini disusun untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, serta mengacu Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, tentang Peraturan Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023.

Laporan kami sajikan dengan sistematika sebagaimana telah di atur dalam ketentuan tersebut di atas, sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, berisi Penjelasan Umum, Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- Bab II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Bab III Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan
- Bab IV Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
- Bab V Penutup

Laporan ini memberikan gambaran kepada berbagai pihak tentang berbagai capaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Morowali pada tahun 2023, sekaligus merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Morowali dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan Tugas pemerintah daerah.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna dalam penyajian maupun substansi materi yang disajikan. Untuk itu, kami tetap mengharapkan berbagai kritik dan saran sebagai masukan bagi pemerintah daerah guna penyempurnaan laporan ini pada khususnya dan bagi kemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten

Morowali pada umumnya.

Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Morowali yang telah bersama-sama dengan pemerintah daerah membangun Morowali serta ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Morowali.

Morowali, Maret 2024

Pj. BUPATI MOROWALI,



A. RACHMANSYAH ISMAIL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

A. Gambaran Umum Daerah

Kabupaten Morowali merupakan kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Poso melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Luas wilayah daratan Kabupaten Morowali saat awal berdiri pada Tahun 1999 diperkirakan seluas $\pm 15.490,12$ km² atau 22,77 persen dari luas daratan Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada Tahun 2013, setelah terbentuknya Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka luas wilayah Kabupaten Morowali $\pm 5.472,00$ km² atau 8,85 persen dari luas daratan Provinsi Sulawesi Tengah dengan 9 (Sembilan) Kecamatan. Namun, pada tahun 2023 melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kecamatan Sombori Kepulauan maka jumlah kecamatan di kabupaten Morowali menjadi 10 (Sepuluh)

Kecamatan meliputi Kecamatan Wita Ponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Menui Kepulauan dan Kecamatan Sombori Kepulauan.

B. Kondisi Geografis Wilayah

Secara astronomis, Kabupaten Morowali terletak antara $01^{\circ} 31' 12''$ Lintang Selatan dan $03^{\circ} 46' 48''$ Lintang Selatan serta antara $121^{\circ} 02' 24''$ Bujur Timur dan $123^{\circ} 15' 36''$ Bujur Timur. Jika ditinjau dari posisi geografis Kabupaten Morowali wilayahnya membentang dari arah Tenggara ke Barat dan melebar ke Bagian Timur, sebagian besar (88,55 persen) berada di daratan Pulau Sulawesi, dan sebagian kecil lainnya (11,45 persen) merupakan pulau-pulau kecil terutama bagian paling selatan Kabupaten Morowali terdapat wilayah Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Sombori Kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau-pulau kecil. Berdasarkan letak dan kondisi geografis yang dimiliki Kabupaten Morowali tersebut, maka wilayah kabupaten ini dapat dipetakan menjadi dua wilayah yakni wilayah daratan utama Pulau Sulawesi dan wilayah kepulauan.

Jika ditinjau secara administratif Kabupaten Morowali memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Morowali Utara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara;
- Sebelah Timur merupakan Wilayah Perairan Teluk Tolo..

Letak, batas dan kondisi geografis wilayah Kabupaten Morowali selengkapnya terdapat pada Gambar 1.1 tentang peta administratif Kabupaten Morowali.



Sumber : <https://sulteng.bpk.go.id/peta-administrasi-kabupaten-morowali>

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Morowali

C. Jumlah Penduduk

Suatu daerah yang jumlah penduduknya sudah sangat banyak merupakan masalah yang sangat sulit untuk ditanggulangi, karena berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, misalnya sulitnya menyiapkan lapangan kerja sehingga menimbulkan pengangguran yang berakibat munculnya pemukiman-pemukiman kumuh, timbulnya masalah gangguan keamanan dan masalah sosial lainnya. Sementara itu, pada daerah-daerah yang mempunyai wilayah luas dengan sumber daya alamnya yang cukup potensial justru masih kekurangan penduduk (tenaga kerja) untuk mengelolanya agar dapat bermanfaat bagi kehidupan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka salah satu masalah

yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan adalah masalah kependudukan yang mencakup berbagai aspek antara lain jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, persebaran dan kepadatan penduduk serta komposisi penduduk.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali periode 31 Desember 2023 jumlah penduduk kabupaten morowali sebesar 183.957 jiwa, berikut ini adalah tabel yang menggambarkan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2023.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2023

Kecamatan	Luas Wilayah		Penduduk		Kepadatan (Org/Km ²)
	Km2	%	Jumlah	%	
Menui Kepulauan	223,63	4,07	14.106	7,67	63,08
Bungku Selatan	403,9	7,38	14.987	8,15	37,11
Bahodopi	1.080,98	19,76	41.641	22,64	38,52
Bungku Pesisir	867,29	15,85	7.799	4,24	8,99
Bungku Tengah	725,57	13,26	33.576	18,25	46,28
Bungku Timur	387,23	7,08	14.277	7,76	36,87
Bungku Barat	758,93	13,87	18.679	10,15	24,61
Bumi Raya	504,77	9,23	16.681	9,07	33,05
Wita Ponda	519,7	9,5	22.211	12,07	42,74
Morowali	5.472,00	100	183.957	100	33,62

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Morowali Tahun 2023

Sehubungan dengan data tabel di atas, Jumlah Penduduk Kecamatan Sombori Kepulauan masih belum bisa ditampilkan, dikarenakan data Penduduk Kecamatan Sombori Kepulauan masih tergabung dengan Kabupaten Induk, yaitu Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan, Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka tingkat kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan. Pada Tahun 2023, rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten

Morowali adalah 33,62 jiwa per km². Persebaran penduduk di wilayah Kabupaten Morowali tidak merata jumlahnya pada semua wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Bungku Tengah sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Morowali memiliki luas wilayah kecamatan sebesar 725,57 km², dengan jumlah penduduk sebanyak 33.576 jiwa mencapai kepadatan penduduk sebanyak 46,28 jiwa per km². Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Menui Kepulauan yaitu 63,08 jiwa per km², Hal ini disebabkan karena luas wilayah Kecamatan Menui Kepulauan lebih sempit dibanding kecamatan lain yakni hanya 4,07 persen dari total luas wilayah Kabupaten Morowali data yang disajikan belum menyesuaikan dengan pemekaran wilayah Kecamatan Sombori Kepulauan. Sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Bungku Pesisir dengan tingkat kepadatan sebesar 8,99 jiwa per km².

Disamping itu, Indikator yang digunakan untuk mengetahui komposisi penduduk menurut *jenis* kelamin adalah rasio jenis kelamin (*sex ratio*), yaitu perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. Semakin besar penduduk perempuan, potensi fertilitasnya semakin tinggi. Meskipun tinggi rendahnya fertilitas dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan karakteristik demografi. Dilihat dari proporsi jenis kelamin Penduduk di Kabupaten Morowali diketahui bahwa terbanyak adalah penduduk dengan jenis kelamin Laki-Laki sebanyak 99.072 atau sebesar 53,86%, sedangkan penduduk jenis kelamin perempuan sebanyak 84.885 jiwa atau sebesar 46,14%. Rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Morowali sebesar 116,71. Rasio jenis kelamin penduduk terbesar di Kecamatan Bahodopi (138,97), sebaliknya yang terkecil adalah Kecamatan Menui Kepulauan yakni sebesar (100,80). berikut

ini adalah tabel yang menggambarkan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Morowali Tahun 2023

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Morowali Tahun 2023

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio
		Lk	Pr		
1.	Menui Kepulauan	7.081	7.025	14.106	100,80
2.	Bungku Selatan	7.692	7.295	14.987	105,44
3.	Bahodopi	24.216	17.425	41.641	138,97
4.	Bungku Pesisir	4.142	3.657	7.799	113,26
5.	Bungku Tengah	17.705	15.871	33.576	111,56
6.	Bungku Timur	7.470	6.807	14.277	109,74
7.	Bungku Barat	10.410	8.269	18.679	125,89
8.	Bumi Raya	8.748	7.933	16.681	110,27
9.	Wita Ponda	11.608	10.603	22.211	109,48
	TOTAL	99.072	84.885	183.957	116,71

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Morowali Tahun 2023

D. Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Morowali terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, peningkatan jumlah penduduk yang sangat signifikan tersebut terjadi disebabkan oleh banyaknya penduduk baru yang terdaftar sebagai penduduk kabupaten Morowali yakni pekerja di wilayah pertambangan. Jumlah penduduk Kabupaten Morowali akan terus bertambah yang disebabkan oleh tingkat kelahiran lebih tinggi dari tingkat kematian dan migrasi masuk (in migration) lebih besar dari pada migrasi keluar (out migration). berikut ini adalah tabel yang menggambarkan laju pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2023.

Tabel 1.3
Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Morowali Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Pertumbuhan
		2022	2023	
1.	Menui Kepulauan	13.602	14.106	3,71
2.	Bungku Selatan	14.540	14.987	3,07
3.	Bahodopi	37.698	41.641	10,46
4.	Bungku Pesisir	7.067	7.799	10,36
5.	Bungku Tengah	31.947	33.576	5,10
6.	Bungku Timur	13.383	14.277	6,68
7.	Bungku Barat	14.659	18.679	27,42
8.	Bumi Raya	16.297	16.681	2,36
9.	Wita Ponda	21.222	22.211	4,66
	TOTAL	170.415	183.957	7,95

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Morowali Tahun 2023

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk di kabupaten morowali pada tahun 2023 mencapai 7,95 persen jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2022. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi dikecamatan bungku barat sebesar 27,42 persen, kecamatan bahodopi sebesar 10,46 persen dan kecamatan bungku pesisir sebesar 10,36 persen. Pertumbuhan penduduk terendah pada tahun 2023 terjadi di kecamatan bumi raya yang hanya mencapai 2,36 persen.

E. Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Morowali

Setelah pembentukan Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Morowali yang sebelumnya hanya memiliki 9 (sembilan) wilayah Kecamatan, saat ini telah memiliki 10 (sepuluh) wilayah kecamatan yaitu Witaponda, Bumi Raya, Bungku Barat, Bungku Tengah, Bungku Timur, Bahodopi, Bungku Pesisir, Bungku Selatan, dan Menui Kepulauan serta Kecamatan Sombori Kepulauan yang baru saja dimekarkan tahun 2023. Jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Morowali saat ini

berjumlah 126 (seratus dua puluh enam) desa dan 7 (tujuh) kelurahan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.6 jumlah kecamatan dan desa/kelurahan kabupaten morowali tahun 2023.

Pemekaran Wilayah Kecamatan Sombori Kepulauan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kecamatan Sombori Kepulauan. Kecamatan Sombori Kepulauan merupakan pemekaran dari 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Menui Kepulauan dan 3 (tiga) Desa di Kecamatan Bungku Selatan. Kecamatan Sombori Kepulauan memiliki wilayah seluas 267,78 Km². Cakupan wilayah Kecamatan Sombori Kepulauan terdiri atas 13 (tiga belas) Desa meliputi :

1. Desa Tanjung Harapan seluas 12,90 Km² ;
2. Desa Matano seluas 13,79 Km²;
3. Desa Tanona seluas 7,10 Km²;
4. Desa Tanjung Tiram seluas 9,00 Km²;
5. Desa Matarape seluas 20,03 Km²;
6. Desa Mbokita seluas 7,07 Km²;
7. Desa Dongkalan seluas 13,01 Km²;
8. Desa Pulau Tengah seluas 3,2 Km²;
9. Desa Masadian seluas 6,03 Km²;
10. Desa Pulau Tiga seluas 3,85 Km²;
11. Desa La Lemo seluas 48,09 Km²;
12. Desa Lamontoli seluas 118,70Km²; dan
13. Desa Pulau Dua Darat seluas 5,01 Km².

Tabel 1.4
Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Kabupaten Morowali
Tahun 2023

Kecamatan	Luas (Km2)	%	Desa	Kel.	Ibu Kota Kecamatan	Jarak (Mill Laut/ Km)
Menui Kepulauan	127.65	2.33	13	1	Ulunambo	99
Bungku Tengah	725.57	13.26	13	6	Marsaoleh	0
Bungku Selatan	232.1	4.24	23	0	Kaleroang	64
Bahodopi	1,080.98	19.75	12	0	Bahodopi	41
Bungku Pesisir	867.29	15.85	10	0	Lafeu	75
Bungku Timur	387.23	7.08	10	0	Kolono	18
Bungku Barat	758.93	13.87	10	0	Wosu	27
Bumi Raya	504.77	9.22	13	0	Bahonsuai	48
Witaponda	519.7	9.50	9	0	Laantula Jaya	61
Sombori Kepulauan	267.78	4.89	13	0	Tanjung Harapan	-
Jumlah	5,472.00	100,00	126	7		

Sumber: Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2023 (diolah kembali)

F. Jumlah Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah merupakan suatu proses yang tidak berkesudahan. Dalam artian, bahwa penataan kelembagaan dilakukan seiring dengan perubahan yang terjadi, baik di lingkungan makro maupun mikro pemerintah. Penataan Kelembagaan merupakan salah satu langkah untuk menata suatu sistem pemerintahan Daerah yang mampu menjawab tantangan masa depan. Oleh karena itu, agar sistem tersebut berjalan dengan harmonis dalam mencapai visi dan misi yang diembannya, maka penataan kelembagaan harus diimbangi dengan

penataan pada elemen-elemen lain dari sistem tersebut. Elemen-elemen lain, seperti: penataan Sumber Daya Manusia (SDM), Penataan Keuangan, Penataan Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta Penataan mekanisme hubungan keda antara unit-unit organisasi.

Dalam membantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali telah membentuk dan menyusun perangkat daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 28 Tahun 2022 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah saat ini Kabupaten Morowali memiliki 39 (tiga Puluh sembilan) perangkat daerah yang teridir dari 5 (lima) jenis perangkat Daerah yaitu Sekretariat Daerah dengan 9 (sembilan) bagian, Sekreatriat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas dan Kecamatan serta BLUD RSUD.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2022 tentang kedudukan dan susunan organisasi badan daerah terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
3. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Peraturan Bupati Morowali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan susunan Organisasi Sekretariat Daerah , Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
3. Inspektorat

Peraturan Bupati Morowali Nomor 41 Tahun 2022 tentang pembentukan dan susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan Daerah;
2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah;
4. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Daerah;
5. Dinas Sosial Daerah;
6. Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah;
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah;
9. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah;
10. Dinas Lingkungan Hidup Daerah;
11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah;
12. Dinas Perhubungan Daerah;
13. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Daerah;
14. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Daerah;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
16. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata daerah;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsip Daerah;
18. Dinas Perikanan Daerah;
19. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah.

Peraturan Bupati Morowali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari

1. Kecamatan Menui Kepulauan terdiri dari 1 Unit Kerja :
 - Kelurahan Ulunambo
2. Kecamatan Bungku Selatan
3. Kecamatan Bungku Pesisir

4. Kecamatan Bahodopi
5. Kecamatan Bungku Timur
6. Kecamatan Bungku Tengah terdiri dari 6 Unit Kerja :
 - Kelurahan Marsaoleh
 - Kelurahan Tofoiso
 - Kelurahan Mendui
 - Kelurahan Lamberea
 - Kelurahan Bungi
 - Kelurahan Matano
7. Kecamatan Bungku Barat
8. Kecamatan Bumi Raya
9. Kecamatan Wita Ponda
10. Kecamatan Sombori Kepulauan

Adapun jumlah pegawai Negeri Sipil (PNS) di kabupaten Morowali sampai dengan tahun 2023 berjumlah sebanyak 3.158 orang dengan proporsi PNS berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.372 orang dan perempuan sebanyak 1.786 Orang. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa proporsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjenis kelamin perempuan lebih besar atau mencapai mencapai 56,55 persen sementara untuk jenis kelamin laki-laki hanya mencapai 43,45 persen dari total Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di kabupaten Morowali. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.4 jumlah Pegawai Sipil Negara (PNS) Kabupaten Morowali Tahun 2023 dibawah Ini :

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Morowali
Tahun 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PEGAWAI		JUMLAH (Orang)	Ket.
		PNS (Orang)			
		L	P		
1	Sekretariat DPRD	22	13	35	
2	Sekretariat Daerah	64	34	98	

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PEGAWAI		JUMLAH (Orang)	Ket.
3	Inspektorat	30	21	51	
4	RSUD Morowali	48	179	227	
5	Satuan Polisi Pamong Praja	20	8	28	
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	508	838	1.346	
7	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	68	317	385	
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	40	18	58	
9	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	21	8	29	
10	Dinas Sosial	12	8	20	
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	9	29	
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13	15	28	
13	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	63	33	96	
14	Dinas Lingkungan Hidup	15	14	29	
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8	14	22	
16	Dinas Perhubungan	29	2	31	
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	11	4	15	
18	Dinas Koperasi dan UMKM	12	9	21	
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	10	24	
20	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	20	11	31	
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12	14	26	
22	Dinas Perikanan	24	14	38	
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	10	14	24	

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PEGAWAI		JUMLAH (Orang)	Ket.
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	19	19	38	
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	16	16	32	
26	Badan Pengelolaan Pendapatan	21	9	30	
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14	16	30	
28	Badan Penanggulangan Bencana	11	4	15	
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10	11	21	
30	Kecamatan Witaponda	13	9	22	
31	Kecamatan Bumi Raya	17	10	27	
32	Kecamatan Bungku Barat	18	8	26	
33	Kecamatan Bungku Tengah	43	36	79	
34	Kecamatan Bungku Timur	10	5	15	
35	Kecamatan Bahodopi	21	15	36	
36	Kecamatan Bungku Pesisir	18	4	22	
37	Kecamatan Bungku Selatan	22	5	27	
38	Kecamatan Sombori Kepulauan	2	0	2	
39	Kecamatan Menui Kepulauan	33	12	45	
JUMLAH KAB. MOROWALI		1.372	1.786	3.158	

Sumber : BKPSDM Kab. Morowali (Diolah Kembali)

Sementara itu jika berdasarkan kepangkatan maka Pegawai Negeri Sipil (PNS) terbanyak adalah yang memiliki pangkat III/a sampai dengan III/d dengan jumlah 1.906 orang atau 60,35 persen dari total Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Morowali, selanjutnya pangkat IV/a sampai dengan IV/d dengan jumlah 633 orang atau 20,04 persen. Sedangkan yang memiliki pangkat II/a sampai dengan II/d hanya sebanyak 612 orang atau 19,37 persen dari Total Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Morowali. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.5 dibawah ini.

Tabel 1.6
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Kepangkatan
Kabupaten Morowali Tahun 2023

NO	TINGKAT KEPANGKATAN	Jenis Kelamin		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	I/a (Juru Muda)	0	0	0
2	I/b (Juru Muda Tkt. I)	0	1	1
3	I/c (Juru)	0	0	0
4	I/d (Juru Tkt. I)	6	0	6
Jumlah		6	1	7
5	II/a (Pengatur Muda)	12	5	17
6	II/b (Pengatur Muda Tkt. I)	52	50	102
7	II/c (Pengatur)	107	100	207
8	II/d (Pengatur Tkt. I)	158	128	286
Jumlah		329	283	612
9	III/a (Penata Muda)	137	285	422
10	III/b (Penata Muda Tkt. I)	182	327	509
11	III/c (Penata)	133	223	356
12	III/d (Penata Tkt. I)	244	375	619
Jumlah		696	1210	1906
13	IV/a (Pembina)	168	161	329
14	IV/b (Pembina Tkt. I)	154	124	278
15	IV/c (Pembina Utama Muda)	18	6	24
16	IV/d (Pembina Utama Madya)	1	1	2
Jumlah		341	292	633
TOTAL		3158		

Sumber : BKPSDM Kab. Morowali

Pada tahun 2023 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Morowali terbanyak adalah Pendidikan Starata 1 (S-1) 1.815 orang atau 57,47 persen dari total Pegawai Negeri Sipil (PNS), selajutnya PNS dengan Pendidikan Diploma III (D-III) sebanyak 309 orang atau 9,78 persen dan PNS dengan Pendidikan Strata 2 (S-2) sebanyak 208 orang atau 6,59 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.6 dibawah ini.

Tabel 1.7
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Pendidikan
Kabupaten Morowali Tahun 2023

NO	PENDIDIKAN	TAHUN 2023		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SD	0	1	1
2	SMP/SEDERAJAT	8	2	10
3	SMA/SEDERAJAT	403	247	650
Jumlah		411	250	661
1	DIPLOMA I	2	7	9
2	DIPLOMA II	38	65	103
3	DIPLOMA III/SARJANA MUDA	57	252	309
Jumlah		97	324	421
1	DIPLOMA IV	8	42	50
2	S1	741	1074	1815
3	S2	115	93	208
4	S3	0	3	3
Jumlah		864	1212	2076
TOTAL		3158		

Sumber : BKPSDM Kab. Morowali

G. Realisasi APBD Tahun 2023

✓ Realisasi Pendapatan

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Kabupaten Morowali Tahun 2023, realisasi pendapatan daerah adalah sebesar Rp. 1.981.899.957.273,29 atau mencapai 110,21 persen dari Target pendapatan yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1.798.260.416.252,00 dengan rincian pendapatan daerah sebagai berikut :

- Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Morowali Tahun 2023 sebesar Rp. 604.842.155.981,29 atau mencapai 128,73 persen dengan pencapaian ini maka dapat dikatakan bahwa Realisasi PAD pada tahun 2023 melebihi target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 469.865.015.455,00,-. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini bersumber dari Pajak Daerah

sebesar Rp. 311.951.899.714,52 atau mencapai 167,62 persen dari target, Retribusi Daerah sebesar Rp. 189.676.968.595 atau mencapai 111,42 persen dari target, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 3.461.790.338 atau mencapai 191,16 persen dari target dan lain-lain PAD yang sah dengan realisasi sebesar Rp. 99.751.497.333,77 atau mencapai 89,30 persen dari target yang telah ditetapkan.

- Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Morowali Tahun 2023 sebesar Rp. 1.377.057.801.292,00 atau mencapai 103,66 persen dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1.328.395.400.797,00. Realisasi Pendapatan Transfer ini bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan realisasi sebesar Rp. 1.308.167.535.630,00 atau mencapai 103,39 persen dari target yang telah ditetapkan dan pendapatan transfer antar daerah dengan realisasi sebesar Rp. 68.890.265.662,00 atau mencapai 109,09 persen. Lebih jelasnya Realisasi Pendapatan Kabupaten Morowali Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 1.7 dibawah ini :

Tabel 1.8
Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan
Kabupaten Morowali Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023
1	2	3	4 = (3/2)*100
PENDAPATAN DAERAH	1.798.260.416.252,00	1.981.899.957.273,29	110,21
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	469.865.015.455,00	604.842.155.981,29	128,73
Pajak Daerah	186.107.154.678,00	311.951.899.714,52	167,62
Retribusi Daerah	170.239.000.000,00	189.676.968.595,00	111,42
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.810.921.029,00	3.461.790.338,00	191,16
Lain-lain PAD yang Sah	111.707.939.748,00	99.751.497.333,77	89,30
JUMLAH PENDAPATAN	469.865.015.455,00	604.842.155.981,29	128,73

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023
1	2	3	4 = (3/2)*100
ASLI DAERAH			
PENDAPATAN TRANSFER	1.328.395.400.797,00	1.377.057.801.292,00	103,66
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.265.247.626.000,00	1.308.167.535.630,00	103,39
Pendapatan Transfer Antar Daerah	63.147.774.797,00	68.890.265.662,00	109,09
TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	1.328.395.400.797,00	1.377.057.801.292,00	103,66
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	0	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.798.260.416.252,00	1.981.899.957.273,29	110,21

Sumber : BPKAD Kabupaten Morowali

✓ Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Kabupaten Morowali Tahun 2023, realisasi belanja daerah adalah sebesar Rp. 2.021.816.876.638,07 atau mencapai 94,00 persen dari total belanja yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Morowali yaitu sebesar Rp. 2.150.817.432.038,00, dan sisanya sebesar Rp. 129.000.555.399,93 tidak terealisasi, adapun rincian belanja daerah sebagai berikut :

- Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Morowali pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.250.162.885.130,07 atau mencapai 92,26 persen dari total belanja operasi sebesar Rp. 1.355.055.336.663,00 dan sisanya sebesar Rp. 104.892.451.532,93 tidak terealisasi. Realisasi Belanja operasi ini terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 399.744.469.324,00 atau mencapai 87,04 persen dari total belanja pegawai, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 713.191.518.016,00 atau mencapai 94,17 persen dari total

belanja barang dan jasa, realiasi belanja bunga sebesar Rp. 1.222.452.521,00 atau mencapai 73,46 persen dari total belanja bunga, Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp. 102.896.237.269,00 atau mencapai 99,37 persen dari total belanja bunga dan realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp. 33.108.208.000,00 atau mencapai 99,95 persen dari total belanja bantuan sosial.

- Realisasi Belanja Modal pada tahun 2023 sebesar Rp. 543.928.058.678,00 atau mencapai 96,42 persen dari total belanja modal sebesar Rp. 564.149.367.353,00 dan sisanya sebesar Rp. 20.221.308.675,00 tidak terealisasi. Realisasi Belanja Modal ini terdiri dari Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp. 5.497.554.000,00 atau hanya mencapai 59,37 persen dari total belanja tanah, realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 71.284.679.181,00 atau mencapai 97,02 persen dari total belanja modal peralatan dan mesin, Realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp. 154.133.434.255,00 atau mencapai 96,90 persen dari total belanja gedung dan bangunan, realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp. 310.823.144.501,00 atau mencapai 97,08 persen dari total belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, realisasi belanja Modal Aset tetap lainnya sebesar Rp. 2.189.246.771,00 atau mencapai 99,93 persen dari total belanja Modal Aset tetap lainnya.
- Realisasi Belanja Tidak Terduga pada tahun 2023 sebesar Rp. 912.948.000,00 atau mencapai 89,62 persen dari total belanja tidak terduga pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 1.018.657.154,00 dan sisanya sebesar Rp. 105.709.154,00 tidak terealisasi.
- Realisasi belanja transfer pada tahun 2023 sebesar Rp. 226.812.984.830,00 atau mencapai 98,36 persen dari total belanja transfer pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp.

230.594.070.868,00 dan sisanya sebesar Rp. 3.781.086.038,00 tidak terealisasi. Realisasi belanja transfer ini terdiri dari realisasi belanja bagi hasil sebesar Rp. 23.719.161.036,00 atau mencapai 79,51 persen dari total belanja bagi hasil dan realisasi belanja bantuan keuangan sebesar 203.093.823.794,00 atau mencapai 101,16 persen dari total belanja bantuan keuangan pada tahun 2023. Lebih jelasnya Realisasi belanja daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 1.8 dibawah ini :

Tabel 1.9
Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
Kabupaten Morowali Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023
1	2	3	4
BELANJA DAERAH	2.150.817.432.038,00	2.021.816.876.638,07	94,00
BELANJA OPERASI	1.355.055.336.663,00	1.250.162.885.130,07	92,26
Belanja Pegawai	459.259.650.744,00	399.744.469.324,00	87,04
Belanja Barang dan Jasa	757.336.037.129,00	713.191.518.016,07	94,17
Belanja Bunga	1.664.000.000,00	1.222.452.521,00	73,46
Belanja Hibah	103.551.648.790,00	102.896.237.269,00	99,37
Belanja Bantuan Sosial	33.244.000.000,00	33.108.208.000,00	99,59
JUMLAH BELANJA OPERASI	1.355.055.336.663,00	1.250.162.885.130,07	92,26
BELANJA MODAL	564.149.367.353,00	543.928.058.678,00	96,42
Belanja Modal Tanah	9.259.232.798,00	5.497.554.000,00	59,37
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.473.954.049,00	71.284.679.181,00	97,02
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	159.069.430.852,00	154.133.434.225,00	96,90
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	320.155.872.463,00	310.823.144.501,00	97,08
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.190.877.191,00	2.189.246.771,00	99,93
JUMLAH BELANJA MODAL	564.149.367.353,00	543.928.058.678,00	96,42

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023
1	2	3	4
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.018.657.154,00	912.948.000,00	89,62
Belanja Tidak Terduga	1.018.657.154,00	912.948.000,00	89,62
JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	1.018.657.154,00	912.948.000,00	89,62
BELANJA TRANSFER	230.594.070.868,00	226.812.984.830,00	98,36
Belanja Bagi Hasil	29.831.821.018,00	23.719.161.036,00	79,51
Belanja Bantuan Keuangan	200.762.249.850,00	203.093.823.794,00	101,16
JUMLAH BELANJA TRANSFER	230.594.070.868,00	226.812.984.830,00	98,36
JUMLAH BELANJA	2.150.817.432.038,00	2.021.816.876.638,07	94,00
SURPLUS/DEFISIT	(352.557.015.786,00)	(39.916.919.364,78)	11,32

Sumber : BPKAD Kabupaten Morowali

✓ Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Kabupaten Morowali Tahun 2023, realisasi Pembiayaan daerah adalah sebesar Rp. 352.807.702.666,38 atau mencapai 100,07 persen dari total belanja yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Morowali yaitu sebesar Rp. 352.557.015.786,00. Adapun rincian Pembiayaan daerah sebagai berikut :

- Realisasi Penerimaan Pembiayaan daerah pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 355.578.669.400,38 atau mencapai 99,99 persen dari target Penerimaan Pembiayaan daerah sdalam APBD kabupaten Morowali sebesar Rp. 355.619.634.336,00 yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya.
- Realisasi Pengeluaran Pembiayaan daerah pada tahun 2023 sebesar Rp 2.770.966.734,00 atau mencapai 90,48 persen dari alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 3.062.618.550,00 yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah

sebesar Rp. 1.500.000.000 atau mencapai 100 persen dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp. 1.270.966.734,00 atau mencapai 81,34 persen. Lebih jelasnya Realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 1.9 dibawah ini :

Tabel 1.10
Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan
Kabupaten Morowali Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023
1	2	3	4
PEMBIAYAAN DAERAH	352.557.015.786,00	352.807.702.666,38	100,07
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	355.619.634.336,00	355.578.669.400,38	99,99
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	355.619.634.336,00	355.578.669.400,38	99,99
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	355.619.634.336,00	355.578.669.400,38	99,99
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.062.618.550,00	2.770.966.734,00	90,48
Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.562.618.550,00	1.270.966.734,00	81,34
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.062.618.550,00	2.770.966.734,00	90,48
PEMBIAYAAN NETTO	352.557.015.786,00	352.807.702.666,38	100,07
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0	312.890.783.301,60	0,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Morowali

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan yang berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah. Permasalahan

pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah.

Berdasarkan gambaran umum pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali selama beberapa tahun terakhir yang disajikan dal dokumen Rancangan Perubahan RPJMD 2018-2023, maka permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Morowali selanjutnya dijabarkan ke dalam 6 (enam) permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Masih tingginya tingkat kemiskinan;
2. Masih Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia;
3. Rendahnya Ketimpangan Infrastruktur Dasar Antar Kecamatan;
4. Kualitas Layanan Kesehatan belum optimal;
5. Penurunan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup serta upaya mitigasi kebencanaan belum optimal;
6. Kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan;

Adapun Masalah pokok daerah tersebut diatas dapat dipetakan berdasarkan masalah utama sebagai berikut :

1. Garis kemiskinan di Kabupaten Morowali masih tinggi;
2. Bantuan Sosial Belum Semuanya Tepat Sasaran;
3. Kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin;
4. Kantong Kemiskinan yang sulit diakses;
5. Rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS);
6. Sarana Prasarana pendidikan dasar belum memadai;
7. Kuantitas dan kualitas Guru belum memadai;
8. Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik masih Rendah;
9. Sanitasi rendah;
10. Cakupan Layanan Telekomunikasi Belum memadai;
11. Ketersediaan Air Bersih terjadi peningkatan namun masih Rendah;
12. Jaringan Irigasi masih rendah;
13. Usia Harapan Hidup (UHH) Masih rendah;
14. Tenaga Medis dan non medis masih minim;
15. Sarana Prasarana Kesehatan Belum Memadai;
16. Rendahnya Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup;
17. Kerusakan Hutan dan ekosistem laut Meningkat;
18. Mitigasi Bencana;
19. Rendahnya Kinerja Aparatur dan;
20. Rendahnya Kinerja Aparatur.

Berdasarkan kajian normatif, analisis berbagai dokumen rencana sampai dengan analisis gambaran umum Kabupaten Morowali, sehingga menghasilkan beberapa rumusan permasalahan pembangunan Kabupaten Morowali. Berkaitan dengan hal tersebut gambaran kondisi Pelayanan umum Kabupaten Morowali yang telah diuraikan pada bab sebelumnya menunjukkan fakta bahwa masih ada persoalan pembangunan daerah yang harus diselesaikan dalam

lima tahun kedepan berkaitan dengan Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan serta Sekretaris Dewan, Sekretaris Daerah, Inspektorat, Pemerintahan Umum dan Kewilayahan. Adapun beberapa permasalahan pembangunan tersebut berdasarkan urusan adalah sebagai berikut :

Tabel. 1.11
Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan

Kode	Urusan	Permasalahan
1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
1.01	PENDIDIKAN	• Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2021 untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 121,33, jenjang pendidikan SMP/MT sebesar 105,13 jenjang pendidikan SMU/MA/SMK sebesar 103,50 • Angka Partisipasi Murni (APM)) tahun 2021 untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 94,79,. Pada jenjang pendidikan SMP/MT sebesar 72,73. Pada jenjang pendidikan SMU/MA/SMK sebesar 67,59. Hal ini menjelaskan penyelenggaraan wajib pendidikan 9 tahun belum berhasil dengan baik. • Angka Partisipasi Sekolah (APS) tahun 2021 untuk Tingkat SD/MI sebesar 98,73,. Tingkat SMP/MT sebesar 94,20 dibawah target; • Angka Putus Sekolah tahun 2021 untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 0,45 relatif kecil,. Pada jenjang pendidikan SMP/MT sebesar 3,65. Pada jenjang pendidikan SMU/MA/SMK relative besar yaitu sebesar 10,34; • Rasio Ketersediaan Sekolah tahun 2021 untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 1:99,. Pada jenjang pendidikan SMP/MT sebesar 1:189. Pada jenjang pendidikan SMU/MA/SMK sebesar 1:231; • Angka Lulusan SMA/SMK/MA Yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi pada tahun 2021 telah mencapai 70 persen di perlukan usaha dan kerja keras pemerintah untuk mendorong kinerja kelulusan yang tinggi di tingkat SMA melalui koordinasi pada pemerintah provinsi yang memiliki kewenangan pendidikan Menengah. • Di Kabupaten Morowali, Rasio guru/murid per kelas tahun 2021 untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 1:14,. Pada jenjang pendidikan

Kode	Urusan	Permasalahan
		SMP/MT sebesar 1:12. Pada jenjang pendidikan SMU/MA/SMK Sebesar 1:19.
1.02	KESEHATAN	• Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) mencapai 93,5 persen di Tahun 2021 lebih rendah dari target 100 persen; • Angka Kematian Bayi pada Tahun 2021 mencapai 0,013 yang bermakna setiap 1000 kelahiran hidup 1 orang bayi meninggal dunia sebelum usia 1 Tahun. • Hingga Tahun 2021 Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup mengalami penurunan menjadi 0,70. Hingga Tahun 2021, angka kematian neo natal mencapai 0,81 atau 1 balita kurang dari se Tahun yang meninggal. Pada Tahun 2021 meningkat sangat signifikan menjadi 10,05. Angka ini merupakan indikasi belum optimalnya pelayanan kesehatan di Kabupaten Morowali disisi ibu hamil sampai kewilayah terpencil, proses kelahiran dan pasca kelahiran • Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup di Tahun 2021 mencapai 161 jiwa • Meningkat meningkat dari 92 jiwa per 100.000 kelahiran hidup di Tahun 2014, Tahun 2021 angka kematian ibu adalah 0, yang artinya tidak ada kasus kematian Ibu di Kabupaten Morowali. • Angka Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Morowali lebih tinggi dari UHH Sulawesi Tengah tetapi lebih rendah dari UHH nasional yang pada 2021 masing-masing mencapai 68,07 tahun, 67,32 tahun dan 71,06 tahun; 68,45 dan tahun 2021 meningkat menjadi 68,77. • Walaupun persentase kasus balita gizi buruk menurun dari 36 kasus pada Tahun 2013 menjadi 9 kasus di Tahun 2021, kasus bayi gizi buruk berada pada kisaran 7-9 kasus hingga Tahun 2021, masalah ini masih menjadi ancaman bidang kesehatan di Kabupaten Morowali; • Rasiiodokter Tahun 2021 sudah mencapai sebesar 0,60 atau 60, walaupun rasio dokter telah melampaui rasio ideal yakni 32 dokter per 100.000 penduduk (rasioideal Kemenkes 26 dokter per 100.000 penduduk), namun penyebarannya belum merata masih terkonsentrasi di Ibu kota Kabupaten; • Persalinan ibu hamil belum mencapai rasiopersalinan oleh tenaga kesehatan yakni 88persen; • Cakupan kunjungan bayi mengalami penurunan dari 80,30 persen di Tahun 2014 menjadi 12,59 persen di Tahun 2016; • Setiap puskesmas pembantu melayani 28 desa pada Tahun 2015 menjadi 26 desa tahun 2021. Jumlah desa sebanyak 133 desa cakupan Pustu juga tetap dengan 26,32. Rasio ini semakin baik namun, karena dua kecamatan di kepulauan yakni Kecamatan Bungku Selatan dan Menui Kepulauan, maka daya jangkauan pustu menjadi terbatas; • Ada ibu hamil yang belum mendapat suplemen

Kode	Urusan	Permasalahan
		bumil karena tidak melakukan kunjungan bumil K4 • Covid 19
1.03	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	• Proporsi kondisi jalan baik di Kabupaten Morowali masih rendah, hingga Tahun 2021 sebesar 13,30 Persen • Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40Km/Jam) Dari 30,64 persen Tahun 2015 menurun menjadi 17,60 persen pada tahun 2021 • Kualitas jalan antar desa yang kurang baik, termasuk beberapa desa yang memerlukan akses jalan baru khususnya pada wilayah menui kepulauan dan Bungku Selatan. • Jalan menuju kantong produksi yang belum optimal, bahkan sebagai kantong produksi memiliki akses yang buruk
1.04	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	• Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Kabupaten Morowali periode waktu 2015-2021, mengalami perkembangan berfluktuasi sampai Tahun 2021 sebesar 86,99 persen lebih rendah dari capaian tahun 2018. Hal ini berarti masih ada 13,01 persen penduduk Kabupaten Morowali belum dapat menjangkau air bersih terutama di wilayah Kepulauan Salabangka dan Menui Kepulauan; • Rasio Rumah Layak Huni (RLH) menurun dari 20,51 persen di Tahun 2013 menjadi 17,32 persen di Tahun 2021. Pada tahun 2021 telah mengalami peningkatan yang drastic sebesar 186,94. Selain itu,realisasi ini diatas target; • Rasio elektrifikasi baik PLN maupun non PLN meningkat dari 92,05 persen di Tahun 2021,Tahun 2021 meningkat menjadi 96,20 persen,namun sering mengalami pemadaman setiap hari;
1.05	BIDANG KETENTERAMANDAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	• Gangguan Keamanan, Ketertiban Masyarakat masih menjadi masalah umum di Kabupaten Morowali; • Demonstrasi dan tuntutan pekerja terhadap perusahaan meningkat, sehingga mengganggu ketertiban umum. • Tindakan pengeboman ikan, pembiusan masih menjadi masalah di Kepulauan Salabangka dan Kecamatan Menui Kepulauan; • Kejahatan siber patut di antisipasi; • Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) mengalami peningkatan dari 782 di Tahun 2015 menjadi 975 di Tahun 2021. Selanjutnya untuk Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,ketentraman,keindahan) justru mengalami penurunan dari 20 di Tahun 2015 dan Tahun 2021 sebesar 8.Untuk indikator Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota sampai dengan

Kode	Urusan	Permasalahan
		Tahun 2021 sebesar 5 meningkat dari Tahun sebelumnya - Sarana dan Prasarana pendukung dan operasional Satpol PP dan Damkar belum - Memadai dan jauh cukup.
1.06	BIDANG SOSIAL	- PMKS yang memperoleh bantuan sosial (jiwa) pada tahun 2018 sebesar 47.124 PMKS, mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 49.012 PMKS. - Persentase PMKS yang tertangani tahun 2018 sebesar 35 persen dan tahun 2021 sebesar 45 persen. Dengan demikian masih banyak PMKS yang belum tertangani - Jumlah panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya tahun 2021 sebanyak 7 Kelompok - Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat tahun 2021 sebanyak 100 persen - Korban bencana bencana alam (Jiwa/KK) tahun 2018 sebanyak 257 KK dan tahun 2021 sebanyak 383 KK - Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial sebanyak 14 persen, mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 38 persen, namun masih banyak penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial yang belum menerima bantuan sosial.
2. BIDANG URUSAN TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR		
2.07	BIDANG TENAGA KERJA	- Pada Tahun 2021 Angka Pengangguran terbuka sebesar 3,03 persen. Namun, kondisi Tahun 2021 masih sedikit lebih baik dari capaian Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional dengan TPT masing-masing sebesar 3,11 persen dan 5,23 persen. Pada Tahun 2020, persentase TPT Kabupaten Morowali meningkat cukup besar menjadi 5,21 persen, Provinsi Sulawesi Tengah meningkat menjadi 3,77 persen dan Nasional meningkat sebesar 7,07 persen; - Angka sengketa pengusaha-pekerjaper Tahun (orang) sebanyak 30 Orang tahun 2018, mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 56 Orang - Rasio Lulusan S1/S2/S3 tahun 2018 sebesar 9,92, mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 9,16; - Belum adanya link andmatch antara pendidikan Tenaga Kerja dan kebutuhan dalam bursa kerja dan industry yang berkembang;

Kode	Urusan	Permasalahan
		• Informasi bursa kerja terbatas; • Tingkat pendidikan tenaga kerja lokal masih rendah rata-rata berpendidikan SMP/MTs; • Adanya bottleneck antara jumlah lapangan kerja yang tersedia dengan pendidikan dan skill yang dimiliki calon tenaga kerja
2.08	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	• Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2018 sebesar 11,46, mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 10,19 • Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPRD tahun 2021 sebesar 4 persen masih sangat kecil. • Rasio KDRT pada tahun 2018 sebesar 0,50, mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 0,45 • Masyarakat masih melakukan doinggender karena belum memahami secara jelas konsep Gender
2.09	BIDANG PANGAN	• Rasio Ketersediaan Pangan Utama pada tahun 2018 sebesar 199,26, mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021 menjadi 216,27. • Ketersediaan protein perkapita pada tahun 2018 sebesar 42,51, mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021 menjadi 216,27 • Target produksi padi sawah pada Tahun 2021 yakni 47.796,98 ton belum tercapai, dimana realisasi produksi hanya sebesar 44.672 Ton. Sementara produksi tanaman pangan lainnya memenuhi dan ada yang melebihi target; • Walaupun realisasi produktivitas padi sawah pada Tahun 2021 produktivitas padi sawah melebihi target 4,93 ton/Ha (RPJMD Tahun 2018-2023) terealisasi 4,98 ton/Ha; • Permintaan pangan khususnya beras meningkat seiring pesatnya peningkatan jumlah penduduk akibat masuknya tenaga kerja dari daerah lain; • Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pertambangan, permukiman dan komersial; • Rendahnya pertumbuhan penyediaan prasarana irigasi pada wilayah-wilayah barudan potensial bagi peningkatan ketersediaan pangan terutama padi; • Keberlanjutan sistem produksi padi akibat degradasi hutan dan lahan khususnya dikawasan upstream (DASHulu) yang berdampak kepada rapuhnya fungsi Hidrologi kawasan DAS;
2.10	BIDANG PERTANAHAN	• Tumpang tindih antar penggunaan lahan terutama antara lahan pertanian masyarakat dengan penggunaan untuk pertambangan;

Kode	Urusan	Permasalahan
		• Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas desa dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan belum optimal; • Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah kabupaten belum optimal; • Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas desa dalam 1 (satu) daerah kabupaten belum optimal; • Penyelesaian Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas desa dalam 1(satu) wilayah Kecamatan belum optimal.
2.11	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	• Tidak adanya target cakupan wilayah rawan bencana yang mendapat penyuluhan dan pelatihan simulasi penanganan bencana; • Terjadinya degradasi lingkungan akibat meningkatnya kegiatan pertambangan yang mencemari air sungai dan laut untuk kegiatan perikanan; • Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan daratan (terutamanya hutan) dan ekosistem perairan laut; • Meningkatnya suhu udara, menipisnya persediaan air dan perubahan cuaca akibat berkurangnya daerah tangkapan air; • Meningkatnya timbunan sampah di wilayah perkotaan dan kawasan cepat tumbuh yang tidak diikuti dengan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang memadai; • Semakin menurunnya tutupan terumbu karang akibat pemanfaatan sumber daya ikan yang tidak sesuai anjuran. • Kabupaten Morowali merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Tengah yang dilalui oleh patahan (sesar) aktif yaitu sesar Matano sehingga termasuk daerah rawan gempa;
2.12	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	• Kurangnya penduduk yang memiliki e-KTP, walaupun penduduk yang memiliki KTP meningkat penduduk berKTP persatuan penduduk tahun 2018 sebesar 103.393; • Kurangnya penduduk yang memiliki Kartu Keluarga; • Kurangnya bayi yang memiliki akta kelahiran Tahun 2015 sebanyak 22.412 bayi, kemudian Tahun 2018 sebesar 8.146 bayi.
2.13	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	• Span of control dan span of management wilayah pembinaan sangat luas Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) belum sebanding dengan minimnya pembiayaan; • Data kelompok binaan belum dimuktahirkan sehingga menyulitkan pembinaan oleh Tim Penggerak PKK;

Kode	Urusan	Permasalahan
		• Fasilitas pembinaan PKK ditingkat kecamatan masih terbatas; • Masyarakat mempunyai pola pikir bahwa posyandu adalah milik Dinas Kesehatan, bukan milik masyarakat sehingga tanggung jawab operasionalnya diserahkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali
2.14	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	• Persentase Akseptor KB di Kabupaten Morowali pada tahun 2018 sebesar 80,05 persen, pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 79,08 persen • Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 pada tahun 2018 sebesar 69,51 persen, namun pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 65,75 persen. • Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada tahun 2018 sebesar 12,64 persen, namun pada tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 15,33 persen • Minimnya pemahaman penduduk atas makna program Keluarga Berencana; • Terbatasnya Tenaga Penyuluh KB di wilayah terpencil dan kepulauan pada Kecamatan Bungku Selatan dan Menui Kepulauan; • Terbatas akses masyarakat miskin dan di wilayah terpencil pada Program KB.
2.15	BIDANG PERHUBUNGAN	• Terbatasnya Sumber daya Manusia dan Peralatan Uji KIR; • Minimnya fasilitas pelabuhan laut, terminal bus, bandara Morowali; • Terbatasnya rambu-rambu lalu-lintas pada daerah rawan lakalantas; • Rasio izin trayek di bawah target yakni mencapai 15 poin di Tahun 2021 pada tahun 2021 meningkat mencapai 17 poin.
2.16	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	• Sebagian wilayah sulit diakses layanan telekomunikasi • Masih adanya wilayah desa blank-spot Jaringan Komunikasi khususnya di wilayah pegunungan dan pulau-pulau. • Belum optimalnya penggunaan website sebagai sarana dan prasarana Komunikasi dan informasi. • Anggaran yang terbatas di dalam penyiapan infrastruktur tower BTS dan akses jaringan internet pada wilayah terpencil.
2.17	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	• Persentase koperasi aktif terjadi fluktuasi setiap tahunnya dimana capaiannya 28 persen di Tahun 2021, pada tahun 2018 meningkat sebesar 30,77 persen, namun Pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 22,56 persen • Minimnya pendampingan terhadap pengembangan koperasi; • Minimnya Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam

Kode	Urusan	Permasalahan
		mendorong pertumbuhan ekonomi; • Terbatasnya akses modal bagi UKM; • Terbatasnya akses informasi pasar bagi UKM; • Terbatasnya interkoneksi dengan Kawasan Industri yang ada
2.18	BIDANG PENANAMAN MODAL	• Infrastruktur baik transportasi maupun energi dalam mendukung penanaman modal masih terbatas; • Sektor penanaman modal masih terfokus pada industri ekstraksi berbasis sumber daya alam khususnya pertambangan; • Promosi investasi belum memadai; • Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta) pada tahun 2018 sebanyak 111 investor, namun pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 57 Investor; • Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) pada tahun 2018 realisasi investasi sebesar US\$ 89,6 Milyar, pada tahun 2021 terjadi penurunan nilai investasi menjadi US\$25,8 Triliun
2.19	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	• Data jumlah organisasi kepemudaan, kegiatan organisasi kepemudaan, sarana dan prasarana penunjang kegiatan kepemudaan masih terbatas; • Kontribusi organisasi kepemudaan serta koordinasi organisasi kepemudaan dalam pembangunan daerah masih terbatas; • Jumlah prasarana olahraga belum memadai; • Sinkronisasi perencanaan kegiatan olahraga belum memadai.
2.20	BIDANG STATISTIK	• Beberapa publikasi penting bagi Kabupaten Morowali belum ada dan belum dijadikan kegiatan rutin yang dikerjasamakan dengan pihak badan Pusat Statistik seperti PDRB sembilan Kecamatan baik pendekatan lapangan usaha maupun penggunaan, Indeks Gini, NTP (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), NTPN elayan, dan lain-lain. • Terintegrasinya Sistem Data statistik belum terintegrasi dan dimanfaatkan dengan baik di dalam pengambilan keputusan.
2.21	BIDANG PERSANDIAN	• Anggaran mendukung persandian sangat terbatas. • Sampai dengan tahun 2020 belum adanya tenaga sandiman di kabupaten Morowali • Keamanan data dan informasi daerah sangat diperlukan didalam menjalankan pemerintahan termasuk keamanan tanda tangan pejabat daerah menghindari pemalsuan.
2.22	BIDANG KEBUDAYAAN	• Alokasi anggaran bagi kegiatan kebudayaan masih minim; • Sumber Daya Manusia dan sarana-prasarana kegiatan kebudayaan baik ditingkat kabupaten

Kode	Urusan	Permasalahan
		maupun kecamatan masih minim; Identifikasi dan riset situs kebudayaan belum dilakukan
2.23	BIDANG PERPUSTAKAAN	Jumlah Pengunjung Perpustakaan pada tahun 2018 realisasi sebanyak 10.244 pengunjung, padatahun 2021 terjadi penurunan jumlah pengunjung menjadi 3.510 pengunjung.
2.24	BIDANG KEARSIPAN	- Minat baca masyarakat masih minim yang disebabkan minimnya koleksi buku perpustakaan; - Sarana dan prasarana pendukung perpustakaan masih belum memadai; - Belum dilakukannya identifikasi perpustakaan tingkat komunitas; - Sarana dan prasarana pendukung kegiatan kearsipan masih belum memadai; - Pengelola kearsipan masih terbatas; - Tradisi Tata Kelola arsip daerah belum dibudayakan
3. URUSAN PILIHAN		
3.27	PERTANIAN	- NTP belum mencapai nilai 100 - Menurunya kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB - Masih rendahnya kemampuan kelompok tani - Belum optimalnya peran PPL Pertanian dalam peningkatan SDM petani, produksi dan pemasaran hasil pertanian - Kualitas-Produk pertanian masih rendah - Terbatasnya Sarana Prasarana Produksi Petani Seperti Modal Usaha, Alsinta, Pupuk/Obat- obatan Terbatas - Nilai Tambah Produk Pertanian Rendah - Kegagalan budi daya rumput laut, - Menurunnya hasil perikanan tangkap, - Lemah daya tawar nelayan, - alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pertambangan, permukiman dan niaga; - rendahnya penyediaan irigasi pada daerah baru;
3.25	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	- Masih rendahnya kesejahteraan nelayan. - Kewenangan kabupaten didalam pengelolaan kelautan dan perikanan sangat terbatas. - Sarana dan prasarana alat tangkap ikan bagi nelayan terbatas. - Anggaran didalam mendukung pengembangan perikanan terbatas - Pengembangan rumput laut masih belum optimal. - Potensi perikanan tangkap kabupaten morowali cukup besar - Kurangnya optimalnya pelestarian dan pengawasan lingkungan perikanan

Kode	Urusan	Permasalahan
3.26	BIDANG PARIWISATA	- Masih rendahnya kontribusi PAD sector pariwisata terhadap APBD Kabupaten - Belum optimalnya penataan daya Tarik Wisata(DTW) - Belum terintegrasi pemasaran destinasi pariwisata antar daerah sesuai potensi
3.30	BIDANG PERDAGANGAN	- Masih rendahnya akses permodalan bagi Pedagang/Usaha Mikro/informal - Program Pengembangan UMKM
3.31	BIDANG PERINDUSTRIAN	- Pertumbuhan Industri pada tahun 2018 hanya minus 13,41 sementara pada tahun 2021 mampu tumbuh pada 8,26. - Kontribusi Sektor Industri RT Terhadap PDRB berdasarkan ADHB pada tahun 2018 6,91, pada tahun 2021 mampu tumbuh pada 6,91 dimana lebih rendah pada Tahun sebelumnya.
3.32	BIDANG TRANSMIGRASI	- Tidak adanya pembangunan Permukiman Transmigrasi Baru dari Tahun 2014–2021. - Diperlukan Penyiapan Pembangunan dan Pembinaan Kawasan Permukiman Transmigrasi Baru
4. URUSAN PEMERINTAHAN PENUNJANG		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	- Reformasi Birokrasi belum berjalan maksimal. - Nilai SAKIP Pemerintah Masih dalam Katagori Rendah - Perlu adanya peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan Administrasi Kewilayahan Belum terbangunnya Fasilitas Kerjasama Daerah - Masih terbatasnya aparatur UKPBJ - Terbatasnya Aparatur Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (JP-PPBJ). - Masih diperlukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dalam Pengelolaan pengadaan barang/jasa - Belum stabilnya harga komoditi pertanian dan kebutuhan pokok masyarakat - Perlu adanya pengembangan Aparatur yang Profesional, Adaptif dan responsif. - Perlu adanya peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan, penyusunan SOP dan Penerapan Standar Pelayanan minimal. - Belum optimalnya kordinasi penyebaran informasi pemerintahan dan pembangunan daerah
4.02	SEKRETARIAT DPRD	Belum optimalnya capaian Ranperda yang dibahas dan ditetapkan menjadi Perda.
5.01	PERENCANAAN	- Masih rendahnya ASN yang memiliki kompetensi dibidang perencanaan - Dokumen perencanaan belum sinkron - Pengolahan data dan informasi pembangunan

Kode	Urusan	Permasalahan
		daerah belum optimal. • Koordinasi perencanaan masih perlu ditingkatkan
5.02	KEUANGAN	• Kurang optimalnya capaian pendapatan PAD. • Alokasi anggaran untuk pencapaian target pembangunan sulit tercapai karena situasi pandemi covid yang mengharuskan refocusing anggaran.
5.03	KEPEGAWAIAN	• Belum optimalnya penegakan hukuman disiplin ASN.
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	• Belum optimalnya capaian aparatur yang mengikuti diklat struktural Fungsional dan teknis
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	• Masih rendahnya hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	• Masih kurangnya tindak lanjut temuan pemeriksaan internal • Kurangnya aparatur pemeriksa yang profesional dan berkualitas auditor
7.01	KECAMATAN	• Belum optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada kecamatan. • Infrastruktur pendukung pelayanan publik di kecamatan belum memadai
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	• Kurangnya Cakupan Sekolah, Ormas, dan keagamaan yang memperoleh pengembangan wawasan ke bangsa. • Belum optimalnya cakupan Pendidikan politik masyarakat. • Belum mantapnya pendidikan karakter, budi pekerti, kewarganegaraan, dan kebangsaan. • Belum optimalnya peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa

B. Visi dan Misi Kepala Daerah

a. Visi Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dasar aturan yang menjadi acuan adalah RPJPD dengan memperhatikan

permasalahan pembangunan di Kabupaten Morowali Visi dan Misi yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati.

Percepatan pembangunan daerah merupakan kebijakan yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan faktor endowment yang dimiliki oleh masing-masing daerah, seyogyanya didukung oleh perencanaan yang sistematis dan terstruktur serta pelibatan seluruh masyarakat secara partisipatif. Perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya daerah secara efisien, efektif dan berdaya guna.

Implementasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah hanya dapat diwujudkan bila didasarkan pada konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan nyata sesuai dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Visi dan Misi sebagai satu kesatuan konsep perencanaan. Visi merupakan tonggak tujuan yang memberi arah kepada semua pemangku kepentingan dalam menyusun program dan kegiatannya masing-masing. Di lain pihak, Misi merupakan cara bagaimana mewujudkan Visi. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus realistis, disusun dan dirumuskan secara rinci disertai dengan tindakan nyata untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan.

Visi pembangunan daerah sebagai gambaran arah tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, secara obyektif dan faktual harus memiliki kewajaran dan kelayakan untuk diwujudkan dalam situasi, kondisi dan kapasitas sumber daya daerah yang tersedia. Pengerahan dan pemanfaatan kapasitas sumber daya yang bersifat strategis tersebut dimaksudkan guna menjawab isu-isu strategis dan

permasalahan yang dihadapi daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat terselenggaranya secara berkelanjutan serta menjamin eksistensi daerah di masa depan.

Perubahan RPJMD Kabupaten Morowali 2018-2023 tidak merubah Visi dan akan tetapi melakukan penyempurnaan, penyelarasan dan penajaman misi berdasar hasil evaluasi paruh waktu jalannya RPJMD Misi yang diemban sulit diukur karena setiap Misi memuat banyak tujuan dan sasaran yang berbeda satu dengan lainnya sehingga tidak menurun (cascading) sehingga dalam 3 (tiga) tahun mendatang sampai akhir periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Morowali perlu dilakukan penyelarasan.

Eksistensi Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali yang tertuang dalam Perubahan RPJMD juga merupakan konsepsi dasar dari suatu tatanan kehidupan yang dicita-citakan, sehingga dapat menjadi daya pendorong dan daya ungkit (leverage) bagi seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Dalam menentukan arah pembangunan daerah yang bersifat strategis harus menggambarkan tujuan yang ingin dicapai dari pengelolaan manajemen pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, menyatukan persepsi, interpretasi dan komitmen seluruh elemen masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil diskusi kelompok dengan berbagai elemen masyarakat secara partisipatif, dengan mempertimbangkan potensi daerah, analisis permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis baik skala daerah, nasional dan global, maka dirumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD). Mengacu pada RPJPD Kabupaten Morowali dan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati yang disusun atas dasar kondisi obyektif

kekinian daerah, maka Visi Pemerintah Kabupaten Morowali 2018–2023 yang telah ditetapkan tidak mengalami perubahan sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN MOROWALI YANG SEJAHTERA BERSAMA”

Sebagai harapan dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kabupaten Morowali 5 (lima) tahun ke depan, pada hakekatnya Penjabaran Visi tersebut dapat uraikan sebagai berikut:

Masyarakat : merupakan sekelompok orang atau warga yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), yang sebagian besar masyarakat berinteraksi antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut, atau dengan kata lain masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama.

Morowali : adalah kesatuan wilayah dan masyarakat Kabupaten yang terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Poso berdasarkan Undang Undang Nomor 51 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Morowali dan Banggai Kepulauan, termasuk sarana dan prasarana serta kelembagaan yang dipisahkan dari kabupaten induk. Sebagai daerah otonom, maka Kabupaten Morowali dalam kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintah dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki.

Sejahtera : Gambaran masyarakat kabupaten Morowali yang terpenuhi kebutuhan dasar meliputi : Sandang, pangan, papan dan memperoleh pelayanan dasar Pendidikan dan Kesehatan secara layak serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dan menyerap tenaga kerja dengan penghasilan yang memadai.

Bersama : Dimaknai sebagai suatu kondisi masyarakat yang memiliki kesetaraan Dalam hak dan kewajiban sebagai warga Negara untuk memanfaatkan Segala potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan serta menikmati hasil-hasil pembangunan.

Visi Kabupaten Morowali yang tertuang dalam P-RPJMD Periode 2018–2023 harus pula merefleksikan Visi yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Morowali 2005–2025, yaitu **“Morowali Sejahtera Bertumpu pada Agribisnis”**. Kabupaten Morowali sebagai dicirikan dengan kondisi geografis wilayah daratan yang memiliki basis pada sumber daya alam yang potensial sebagai keunggulan daerah, sehingga dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan daya saing di bidang agribisnis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Morowali. Adapun makna yang terkandung dalam visi RPJPD tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Agribisnis dikaitkan dengan pertanian dalam arti luas dan kegiatan atau sektor yang menunjang pengembangan sektor pertanian;
2. Agribisnis dikaitkan juga dengan menjadikan Kabupaten Morowali menjadi lumbung pangan (“Si’E”);
3. Agribisnis diartikan juga dengan kegiatan jasa termasuk pariwisata;
4. Letak geografis potensi sumberdaya alam mendukung sebagai pusat pertumbuhan di bagian Timur Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Misi Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023

Misi adalah rumusan umum atau pernyataan tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin terwujudnya visi yang telah ditetapkan. melakukan penyempurnaan, penyelarasan dan penajaman misi berdasar hasil evaluasi paruh waktu jalannya RPJMD Misi yang diemban sulit diukur karena setiap Misi memuat banyak tujuan dan sasaran yang berbeda satu dengan lainnya sehingga tidak menurun (cascading) sehingga dalam 3 (tiga) tahun mendatang sampai akhir periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Morowali perlu dilakukan penyelarasan.

Penajaman rumusan misi Perubahan RPJMD disusun sedemikian rupa sejalan dengan Visi dan Misi RPJM Nas tahun 2020-2024, untuk memberikan kerangka acuan bagi pencapaian tujuan dan sasaran berikut indikatornya serta arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mewujudkan Visi daerah. Rumusan misi tersebut sekaligus menjadi acuan untuk melakukan evaluasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tahapan dan prioritas program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Oleh karena pentingnya pernyataan misi, maka dalam penyusunannya perlu memperhatikan faktor-faktor lingkungan baik internal maupun eksternal, sebagai acuan dalam perumusan strategi yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam langkah-langkah kerja atau tahapan pencapaian tujuan, yang dituangkan dalam program dan kegiatan.

Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah nasional Tahun 2020-2024. RPJM Nasional berfungsi sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran nasional yang termuat dalam RPJM Nasional. disamping itu ketentuan Permemdagri 86 tahun

2017 Pasal 160 huruf (f) Daerah Mempedomani RPJMN dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara Menyelaraskan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dengan Sasaran, Agenda Pembangunan, Strategi, Arah Pengembangan Wilayah, Dan Program Strategis Nasional Dengan Memperhatikan Kewenangan, Kondisi, Dan Karakteristik Daerah;

Sebagai penjabaran dari visi Kabupaten Morowali yang tertuang dalam P-RPJMD Kabupaten Morowali Periode 2018–2023, maka misi dirumuskan kembali berdasarkan FGD Bersama Pimpinan Daerah, masukkan melalui konsultasi publik dan forum konsultasi Perangkat Daerah (Forum OPD) sebagai berikut :

Misi 1: Menciptakan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Melalui Peningkatan Kapabilitas, Profesionalitas Dan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Daerah Berdasarkan Nilai-Nilai Kebenaran Dan Keadilan.

Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN), sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan berkualitas, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayanan kepada masyarakat, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintah melalui berbagai pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi aparatur yang profesional melalui inovasi berbasis Iptek, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien, efektif dan akuntabel.

Misi 2: Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam (SDA), Pengembangan UMKM, IKM, Koperasi Dan BUMdes Untuk Mencapai Kesejahteraan Bersama.

Misi ini, dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif berbasis kelestarian alam dan lingkungan, mendorong

peningkatan proses nilai tambah pada berbagai sektor ekonomi melalui pelibatan UKM, Koperasi, dan Korporasi guna meningkatkan PAD, penyerapan tenaga kerja lokal dan melindungi hak-hak pekerja, dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Misi ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan produksi dan ketahanan pangan melalui peningkatan dan pengembangan infrastruktur pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan; kemudahan modal usaha dan pengembangan TTG guna peningkatan produktivitas masyarakat, serta terciptanya kepastian harga dan ketersediaan pasar bagi produksi pangan daerah.

Misi 3: Mewujudkan Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Yang Berkualitas Melalui Pembiayaan Gratis, Berlandaskan Kehidupan Masyarakat Yang Beriman Dan Bertaqwa, Sehingga Tercipta Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan SDM yang cerdas, kreatif dan bertaqwa, sehingga memiliki daya saing dan inovatif, melalui peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas, pendidikan gratis, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, peningkatan dan penambahan sarana pendidikan serta pemberian beasiswa. Misi ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan gratis, peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, penambahan tenaga kesehatan, ketersediaan obat serta mendorong partisipasi masyarakat untuk hidup sehat, sehingga menciptakan keindahan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman.

Pada sisi lain misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan suasana kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa sehingga tercipta Bab V - 8 tatanan masyarakat yang menjunjung kerukunan hidup antar umat beragama, menjamin ketertiban dan keamanan bagi terlaksananya pembangunan di berbagai bidang. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka diperlukan upaya

peningkatan pembinaan keagamaan, peningkatan sarana dan prasarana ibadah serta penguatan forum dialog lintas agama.

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Peningkatan Infrastruktur Daerah, Sehingga Mengurangi Kesenjangan Wilayah Dan Terciptanya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis Dan Bahagia.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup sehingga tercipta suatu kehidupan harmonis dan bahagia, melalui peningkatan kualitas penyediaan air bersih, listrik, perumahan dan olahraga. Misi ini juga dimaksudkan untuk mengembangkan seni dan budaya dalam mendukung pengembangan obyek wisata yang ada di Kabupaten Morowali, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan aktivitas perekonomian daerah.

Misi 5: Mewujudkan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, Dan Meningkatkan Ketahanan Masyarakat Menghadapi Perubahan Iklim Dan Bencana.

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kesadaran akan lingkungan hidup berkelanjutan. Meningkatnya Daya dukung daya tampung lingkungan hidup dan ketahanan masyarakat menghadapi bencana dan Meningkatnya kemampuan pengelolaan lingkungan berkelanjutan dan ketangguhan daerah menghadapi bencana. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup menjadi isu yang penting baik secara global maupun nasional dan daerah Kabupaten Morowali khususnya terkait dengan isu perubahan iklim. Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor dan kekeringan menuntut adanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini seiring dengan isu pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di mana 3 dari 17 tujuannya adalah

berkaitan dengan lingkungan, yaitu penanganan perubahan iklim, pemeliharaan ekosistem darat dan laut.

Penurunan kuantitas dan kualitas cadangan air baku/air bersih dimasa yang datang disebabkan oleh terganggunya kawasan tangkapan air/catchment area, pencemaran, eksploitasi air tanah oleh industri dan pemanfaatan kawasan hutan untuk eksplotasi pertambangan. Kondisi ini menjadi ancaman bagi daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga Pemerintah menempatkan mewujudkan lingkungan hidup berkelanjutan, dan meningkatkan ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim dan bencana menjadi prioritas misi untuk mempersiapkan warisan lingkungan yang berkelanjutan pada generasi mendatang.

Keterkaitan Visi dan Misi dalam P-RPJMD Kabupaten Morowali Periode 2018-2023 dengan Visi Masyarakat Morowali yang Sejahtera Bersama dapat dimaknai sebagai terciptanya suatu tatanan masyarakat secara kolektif, yang maju di segala bidang sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup lahir dan bathin yang dicapai melalui pemanfaatan seluruh sumber daya secara swadaya dengan pelibatan seluruh pemangku kepentingan secara aktif dalam setiap kegiatan pembangunan. Kesejahteraan bersama dapat dimaknai di samping kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup juga memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, yang tercermin dari hilangnya berbagai bentuk diskriminasi dan ketidakadilan melalui pembagian kegiatan dan hasilhasil pembangunan secara merata sesuai potensi masing-masing, yang pada gilirannya mampu menurunkan kesenjangan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat, sehingga akan terwujud suatu tatanan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, meliputi sandang, pangan, papan dan memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dan menyerap tenaga kerja dengan penghasilan yang memadai, serta terbangunnya suasana

kehidupan masyarakat yang dan menjunjung tinggi nilai-nilai ketaqwaan. Indikator tercapainya kondisi masyarakat sesuai dengan Visi daerah tersebut adalah :

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, melalui tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, yang diimplementasikan pada pemberian pelayanan secara merata dan akuntabel, dengan dukungan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah, serta penerapan teknologi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang terangkum dalam IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang terus meningkat. Dengan demikian survey tentang IKM harus dilaksanakan setidaknya pada tahun pertama, ketiga dan kelima dari masa perencanaan;
2. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai gambaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang tercermin dari meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan, meningkatnya pelayanan dan derajat kesehatan, serta daya beli masyarakat;
3. Menurunnya angka kemiskinan, sebagai cerminan semakin meningkatnya perekonomian masyarakat, meningkatnya secara signifikan produksi pertanian dan nelayan dibarengi dengan stabilitas nilai tukar petani dan nelayan;
4. Menurunnya angka kriminalitas sebagai wujud semakin meningkatnya nilai-nilai ketaqwaan, kokohnya kerukunan kehidupan beragama dan pelestarian budaya yang kesemuanya memberikan arahan untuk saling harga menghargai baik antar pemeluk agama maupun antar golongan masyarakat. Indikator keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah :
 - a. Tersedianya jaringan air bersih, jaringan listrik secara merata ke seluruh pelosok;

- b. Tersedianya fasilitas olahraga dan lembaga seni budaya;
- c. Tersedianya rumah layak huni bagi keluarga miskin;
- d. Terbangunnya destinasi wisata melalui pengembangan obyek wisata dan promosi kepariwisataan yang dilakukan secara intensif melalui penyusunan profil dan dokumen rencana pengembangan pariwisata daerah;
- e. Pengembangan ekonomi kreatif dalam menunjang daya tarik wisata dengan memanfaatkan keunikan budaya lokal dalam merespon perubahan motif wisatawan dari motif alam ke motif budaya. Kesemuanya akan terukur dengan meningkatnya jumlah kunjungan Wisatawan baik Wisatawan Nusantara maupun Wisatawan Manca Negara.

C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan Dalam Dokumen RPJD, maka dapat disimpulkan tema atau fokus pembangunan pemerintah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Tema atau fokus pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPJMD setiap tahun. Penetapan tema tahunan pada RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran pencapaian Visi Misi RPJMD bersifat tahunan dan tema pembangunan RKPD yang sudah berjalan tahunan. adapun tema pembangunan selama 5 (Lima) tahun yaitu :

- 1 Tahun 2019 : Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Yang Merata dan Berkeadilan
- 2 Tahun 2020 : Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas melalui Peningkatan Akses dan

Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan secara Merata dan Berkeadilan

- 3 Tahun 2021 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan SDM, Penyediaan Sarana Produksi, Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Peningkatan Infrastruktur Menuju Morowali Sejahtera Bersama
- 4 Tahun 2022 : Pemulihan Sosial Ekonomi Daerah Menuju Morowali Yang Sejahtera Bersama
- 5 Tahun 2023 : Memantapkan Kesejahteraan Bersama Dengan Majukan Infrastuktur Dan Pelayanan Publik

Penentuan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023 diharapkan mendukung Prioritas Pembangunan Provinsi dan Prioritas Pembangunan Nasional. Tahun 2023 juga merupakan tahun akhir dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Morowali tahun 2018–2023 sehingga Pemerintah Daerah perlu menetapkan prioritas untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam pencapaian visi misi Bupati terpilih. Program Prioritas Tahun 2023 yang mendukung Prioritas Pembangunan termuat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.12

Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Morowali

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				180,770,452,770	330,422,169,488	332,681,560,875		270,486,804,413
1	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	119,349,465,330	187,007,312,292	166,106,339,320	100 %	122,663,400,000
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat parsitipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama	98 %	98 %	57,958,647,760	138,934,724,121	162,109,968,480	98 %	143,173,404,413
1	1	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang menerapkan Mulok TK/RA. SD/MI dan SMP/MTs	98 %	98 %	116,419,710	541,343,140	526,043,140	98 %	150,000,000
1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase sekolah yang menerapkan Mulok TK/RA. SD/MI dan SMP/MTs	98 %	98 %	3,345,919,970	3,938,789,935	3,939,209,935	98 %	4,500,000,000
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				1,948,797,840	7,208,842,900	7,291,088,278		2,060,000,000
2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan Daerah yang di Kembangkan	100 %	100 %	1,055,080,250	6,315,125,310	6,397,685,638	100 %	1,060,000,000
2	22	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dikestarikan	100 %	100 %	893,717,590	893,717,590	893,402,640	100 %	1,000,000,000
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				92,490,544,486	93,814,997,881	134,597,083,885		90,873,720,920
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Kegiatan	100 %	100 %	90,890,544,705	92,744,998,068	129,650,170,333	100 %	89,497,720,920
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan	100 %	100 %	1,599,999,781	1,069,999,813	4,946,913,552	100 %	1,376,000,000
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN								

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
			PELAYANAN DASAR								
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				11,305,883,099	23,153,319,039	23,981,784,633		13,180,558,507
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	8,987,866,735	20,657,745,526	21,475,113,814	100 %	10,490,558,507
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI)	0 %	0 %	2,080,256,364	2,440,763,513	1,997,608,819	0 %	2,440,000,000
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk	90 %	90 %	237,760,000	54,810,000	509,062,000	90 %	250,000,000
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				77,229,983,949	119,165,710,525	122,137,299,009		66,510,626,319
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	56,388,201,679	87,537,429,636	89,763,986,480	100 %	39,575,626,319

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Balita (AKB)	0.0 %	0.0 %	20,518,857,320	28,233,017,029	28,990,278,919	0.0 %	26,535,000,000
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk	50 %	50 %	38,950,000	1,193,217,080	1,184,843,430	50 %	50,000,000
1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Presentase Sarana Apotek. Toko Obat. Toko Alkes. Optikal. UMOT. IRTP dan TTU Mamin yang memenuhi Standar	90 %	90 %	148,535,000	547,255,380	547,255,180	90 %	200,000,000
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks Keluarga sehat	10 -	10 -	135,439,950	1,654,791,400	1,650,935,000	10 -	150,000,000
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				286,732,610	4,084,141,898	4,342,508,691		500,000,000

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
2	14	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan ketersediaan data bangga kencana	100 %	100 %	99,999,190	1,706,355,018	1,964,790,481	100 %	150,000,000
2	14	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Menurunnya angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahun/Age SpeciicFertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun	0 %	0 %	99,999,620	99,999,320	99,990,650	0 %	200,000,000
2	14	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase Pendapatan Ekonomi Keluarga melalui Kelompok Usaha Peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	65 %	65 %	86,733,800	2,277,787,560	2,277,727,560	65 %	150,000,000
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1,255,621,491	2,052,922,331	2,078,088,183		251,124,298
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Balita (AKB)	0.0 %	0.0 %	1,255,621,491	2,052,922,331	2,078,088,183	0.0 %	251,124,298
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN								

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
			PELAYANAN DASAR								
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				732,841,000	1,760,751,660	2,128,647,971		1,200,000,000
1	2	2	PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Balita (AKB)	0.0 %	0.0 %	732,841,000	1,760,751,660	2,128,647,971	0.0 %	1,200,000,000
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				825,641,805	1,478,595,055	1,648,421,810		1,200,000,000
1	2	2	PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Balita (AKB)	0.0 %	0.0 %	825,641,805	1,478,595,055	1,648,421,810	0.0 %	1,200,000,000
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1,095,540,200	1,936,004,200	1,945,312,100		1,100,000,000

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Balita (AKB)	0.0 %	0.0 %	1,095,540,200	1,936,004,200	1,945,312,100	0.0 %	1,100,000,000
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1,120,698,440	1,934,488,967	2,076,056,256		1,150,000,000
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Balita (AKB)	0.0 %	0.0 %	1,120,698,440	1,934,488,967	2,076,056,256	0.0 %	1,150,000,000
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1,882,832,744	2,876,152,592	3,006,235,908		1,950,000,000
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Balita (AKB)	0.0 %	0.0 %	1,882,832,744	2,876,152,592	3,006,235,908	0.0 %	1,950,000,000

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1,195,939,706	1,956,889,106	1,873,923,032		0
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Balita (AKB)	0.0 %	0.0 %	1,195,939,706	1,956,889,106	1,873,923,032	0.0 %	0
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1,172,026,464	1,920,594,964	1,977,355,508		
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Balita (AKB)	0.0 %	0.0 %	1,172,026,464	1,920,594,964	1,977,355,508	0.0 %	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1,350,318,594	2,271,766,706	2,468,081,501		1,400,000,000
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Balita (AKB)	0.0 %	0.0 %	1,350,318,594	2,271,766,706	2,468,081,501	0.0 %	1,400,000,000
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				397,277,020	1,467,084,227	1,535,105,977		1,000,000,000
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Balita (AKB)	0.0 %	0.0 %	397,277,020	1,467,084,227	1,535,105,977	0.0 %	1,000,000,000
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				317,042,200	920,976,115	1,222,073,492		400,000,000

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Balita (AKB)	0.0 %	0.0 %	317,042,200	920,976,115	1,222,073,492	0.0 %	400,000,000
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				69,694,022,707	319,700,784,626	322,481,557,179		272,920,833,643
1	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintah yang dilaksanakan	41.7 %	41.7 %	9,978,243,160	11,058,238,358	12,396,834,373	41.7 %	11,454,018,318
1	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang di layani oleh jaringan irigasi	3.6 %	3.6 %	8,800,754,090	23,150,571,803	23,850,571,803	3.6 %	9,083,115,325
1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air minum layak	6.4 %	6.4 %	11,374,264,793	6,736,171,871	6,936,171,871	6.4 %	660,000,000

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
1	3	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Sistem Pengelolaan Persampahan Regional	20 %	20 %	300,000,000	0	0	20 %	360,000,000
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Indeks Kualitas Sanitasi	8.32 %	8.32 %	1,000,000,000	300,000,000	300,000,000	8.32 %	1,150,000,000
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1.5 m)	14.92 %	14.92 %	8,018,828,154	9,066,035,046	9,166,035,046	14.92 %	6,300,000,000
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung pemerintah/fasilitas umum dalam kondisi baik	4.92 %	4.92 %	6,499,999,998	32,318,824,118	32,418,824,118	4.92 %	650,000,000
1	3	9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	100 0	100 0	123,167,650	120,217,000	286,576,500	100 0	435,225,950
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam kondisi baik	11.14 %	11.14 %	22,941,583,758	236,168,960,240	236,311,137,278	11.14 %	242,000,000,000
1	3	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	3 %	3 %	141,506,764	141,506,764	141,506,764	3 %	250,000,000

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
1	3	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Presentase Ketaatan terhadap RTRW (%)	18.89 0	18.89 0	515,674,340	640,259,426	673,899,426	18.89 0	578,474,050
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				40,948,294,508	64,525,487,054	68,479,980,298		7,947,201,620
1	4	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintah yang dilaksanakan	100 %	100 %	5,792,411,546	5,751,838,476	6,085,608,913	100 %	1,192,466,290
1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	400 unit	400 unit	706,336,600	1,086,530,000	1,336,400,000	400 uni t	710,336,600
1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Presentase Pengurangan Kawasan Kumuh di Bawah 10 Ha	40 %	40 %	20,569,912,120	20,122,983,780	21,841,805,710	40 %	50,876,000
1	4	5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana. Sarana dan Utilitas Umum)	100 %	100 %	13,879,634,242	37,564,134,798	39,216,165,675	100 %	5,993,522,730

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				2,000,000,000	9,909,752,498	9,336,269,548		0
2	10	5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan	100 %	100 %	2,000,000,000	9,909,752,498	9,336,269,548	100 %	0
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				7,907,811,033	19,186,808,640	20,032,866,537		9,209,663,641
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	4,701,056,650	5,324,385,369	5,754,165,150	100 %	3,849,663,641

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Presentase penanganan pra bencana	100 %	100 %	3,206,754,383	13,862,423,271	14,278,701,387	100 %	5,360,000,000
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				17,650,483,540	19,188,688,197	20,232,031,605		17,641,204,388
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	14,342,444,280	17,375,098,197	18,348,196,605	100 %	14,333,165,128
1	5	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	100 %	100 %	3,233,839,260	1,722,950,000	1,793,195,000	100 %	3,233,839,260
1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	100 %	74,200,000	90,640,000	90,640,000	100 %	74,200,000

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				12,784,587,173	16,531,353,621	19,288,504,201		10,509,046,000
1	6	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	3,760,688,623	4,209,520,661	4,725,948,721	100 %	1,484,301,450
1	6	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Kelompok di berdayakan	31.5 %	31.5 %	49,973,500	191,956,610	1,611,851,330	31.5 %	49,973,500
1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar. anak terlantar. lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	25.50 %	25.50 %	3,108,060,800	5,188,363,000	6,372,446,300	25.50 %	3,108,060,800
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penurunan anak terlantar dan fakir miskin (rumah tangga miskin)	98.30 %	98.30 %	5,606,313,600	6,672,994,700	6,314,459,200	98.30 %	5,607,159,600

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	212,140,000	216,420,000	216,420,000	100 %	212,140,000
1	6	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	persentase taman makam pahlawan yang terpelihara	100 %	100 %	47,410,650	52,098,650	47,378,650	100 %	47,410,650
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				6,851,819,480	14,543,763,416	14,676,649,355		7,991,722,462
2	7	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	4,823,407,851	13,035,753,587	13,191,133,335	100 %	4,596,722,462
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	100 %	100 %	986,044,209	871,479,209	893,650,500	100 %	2,000,000,000

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	100 %	100 %	616,059,620	335,170,020	319,406,520	100 %	785,000,000
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Presentase Kasus yang terselesaikan	75 %	75 %	426,307,800	301,360,600	272,459,000	75 %	610,000,000
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				338,644,500	291,314,500	420,759,980		2,100,000,000
3	32	2	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	0Persentase penempatan transmigrasi baru yang direncanakan	30 %	30 %	52,096,000	34,831,000	34,831,000	30 %	1,000,000,000
3	32	3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase tanah yang disertifikasi	26.5 %	26.5 %	49,999,000	33,087,000	33,087,000	26.5 %	600,000,000
3	32	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	0Persentase penduduk transmigrasi	46.36 %	46.36 %	236,549,500	223,396,500	352,841,980	46.36 %	500,000,000
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN								

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
			PELAYANAN DASAR								
2	9		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				1,364,979,681	1,803,197,442	1,767,593,607		1,694,209,750
2	9	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase cadangan pangan masyarakat	0.5 %	0.5 %	0	0	0	0.5 %	700,000,000
2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	29 %	29 %	1,200,569,331	1,661,617,042	1,625,823,207	29 %	755,000,000
2	9	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan tertangani	33 %	33 %	135,984,000	96,735,000	96,925,000	33 %	210,791,750
2	9	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	32 %	32 %	28,426,350	44,845,400	44,845,400	32 %	28,418,000
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				57,922,418,433	100,763,809,092	101,269,584,003		8,346,461,875
3	27	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	16,115,045,604	19,327,494,503	19,863,832,439	100 %	1,152,787,650
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	90 %	90 %	28,414,838,858	51,919,593,828	52,117,738,637	90 %	3,150,060,550
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase Pengembangan Infrastruktur Pertanian/Perkebunan	100 %	100 %	6,721,305,241	18,764,634,041	18,606,754,041	100 %	2,393,212,350
3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	100 %	100 %	390,576,320	1,088,604,902	1,048,970,010	100 %	401,401,325
3	27	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	100 %	100 %	573,674,960	573,674,960	573,674,960	100 %	574,000,000
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Keg Penyuluh Tingkat Desa/ Kecamatan/ Kabupaten	100 %	100 %	5,706,977,450	9,089,806,858	9,058,613,916	100 %	675,000,000

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				14,291,875,427	17,688,508,540	18,830,182,904		13,844,850,885
2	11	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	5,087,396,387	6,286,891,320	5,848,302,184	100 %	4,711,476,485
2	11	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen wajib perencanaan lingkungan hidup	100 %	100 %	200,000,000	331,640,000	408,312,000	100 %	285,011,000
2	11	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Standar Baku Mutu Kualitas Lingkungan	100 %	100 %	224,888,800	168,146,600	229,031,350	100 %	224,890,900
2	11	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	100 %	100 %	92,744,740	251,774,500	272,154,500	100 %	92,744,800

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
2	11	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Presentase Pengelolaan Limbah B3	100 %	100 %	30,095,000	33,800,000	42,670,000	100 %	30,096,000
2	11	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha pemilik izin Lingkungan dan Izin PPLH yang terawasi	100 %	100 %	124,771,000	83,263,000	28,400,000	100 %	124,771,100
2	11	9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup yang memperoleh penghargaan	20 %	20 %	0	0	0	20 %	0
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kasus Aduan Lingkungan Yang terselesaikan	100 %	100 %	80,000,000	84,800,000	96,312,000	100 %	80,000,000
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani di Wilayah kota	100 %	100 %	8,451,979,500	10,448,193,120	11,905,000,870	100 %	8,295,860,600

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL				5,086,927,648	5,073,551,728	5,269,532,237		2,334,356,636
2	12	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	4,321,842,648	4,372,259,372	4,582,366,881	100 %	1,525,616,530
2	12	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Perekaman KTP elektronik	66.66 %	66.66 %	381,914,000	362,791,356	348,664,356	66.66 %	373,179,106
2	12	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio pasangan berakte Nikah	100 %	100 %	167,455,000	148,045,000	148,045,000	100 %	148,045,000
2	12	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah ketersediaan data base kependudukan skala provinsi	168.733 Jiwa	168.733 Jiwa	126,916,000	61,676,000	61,676,000	168.73 3 Jiwa	126,916,000
2	12	5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Pemanfaatan data kependudukan	100 %	100 %	88,800,000	128,780,000	128,780,000	100 %	160,600,000

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				466,926,000	880,505,000	895,010,000		484,530,250
2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	52.76 %	52.76 %	66,530,000	66,260,000	67,450,000	52.76 %	66,530,000
2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 %	100 %	77,712,000	77,910,000	76,725,000	100 %	83,710,250
2	8	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase peningkatan keluarga pra sejahtera	50 %	50 %	34,824,000	34,740,000	34,740,000	50 %	37,545,900
2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	46 %	46 %	222,000,000	221,940,000	229,270,000	46 %	231,334,100

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
2	8	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100 %	100 %	65,860,000	479,655,000	486,825,000	100 %	65,410,000
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				6,858,370,298	8,802,224,139	9,277,220,319		3,280,418,267
2	13	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	4,225,448,438	5,981,708,189	6,219,568,389	100 %	626,189,217
2	13	3	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase desa yang melakukan kerjasama antar desa	29.3 %	29.3 %	110,378,300	99,539,000	99,539,000	29.3 %	113,344,450
2	13	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang tertib administrasi (%)	100 %	100 %	1,083,228,100	1,411,883,850	1,661,965,850	100 %	1,101,821,900
2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Desa yang diberdayakan/dibina (%)	100 %	100 %	1,439,315,460	1,309,093,100	1,296,147,080	100 %	1,439,062,700

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				10,207,320,503	12,585,141,082	13,172,935,481		13,785,888,355
2	15	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	6,461,947,412	7,500,579,498	7,865,849,147	100 %	7,485,750,355
2	15	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintass dan Angkutan Jalan (LLAJ)	25.00 %	25.00 %	1,372,193,000	2,857,366,000	2,972,549,000	25.00 %	3,755,588,000
2	15	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Ketersediaan Sarana. Informasi. Korodinasi dan Disiplin Angkutan Penyebrangan	100 %	100 %	2,373,180,091	2,227,195,584	2,334,537,334	100 %	2,544,550,000
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				7,515,946,660	8,255,284,466	9,259,161,474		6,851,154,413
2	16	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	3,635,062,160	3,781,005,799	3,971,986,287	100 %	3,354,599,773
2	16	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah yang diselenggarakan secara online dan offline	100 %	100 %	1,174,310,860	1,627,203,092	1,821,991,012	100 %	810,000,000
2	16	3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika	100 %	100 %	2,706,573,640	2,847,075,575	3,465,184,175	100 %	2,686,554,640
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				7,118,097,674	15,385,810,373	16,953,301,904		30,859,828,525

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
2	17	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	4,033,996,394	4,480,510,156	5,261,193,246	100 %	27,691,545,256
2	17	2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase izin Usaha simpan pinjam	75 %	75 %	0	0	0	75 %	85,000,000
2	17	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN Pemeriksaan KOPERASI	Persentase Capaian Koperasi Yang Berkualitas	38 %	38 %	106,764,200	76,525,000	76,525,000	38 %	85,000,000
2	17	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang Dinilai Kesehatannya	50 %	50 %	29,992,050	29,919,500	29,919,500	50 %	40,000,000
2	17	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan	100 %	100 %	419,288,300	510,785,400	500,775,400	100 %	453,588,200
2	17	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang di Fasilitas Bantuan Modal	2 %	2 %	507,954,000	5,248,141,000	5,253,441,000	2 %	507,961,401
2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang diberdayakan	6 %	6 %	1,180,954,990	1,267,678,190	1,366,013,190	6 %	1,108,928,588
2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pelaku Usaha Mikro yang Naik Kelas	6 %	6 %	839,147,740	3,772,251,127	4,465,434,568	6 %	887,805,080

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				7,333,660,008	8,424,013,606	8,767,203,694		7,801,867,665
2	18	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	6,033,803,558	7,062,999,746	7,324,687,244	100 %	5,240,239,665
2	18	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	capaian pemberian insentif dan kemudahan berusaha	85 persen	85 persen	310,668,450	110,566,950	100,528,950	85 persen	1,250,000,000
2	18	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi (PMA dan PMDN) di kabupaten/kota	50 %	50 %	482,319,250	505,659,500	506,249,500	50 %	50,000,000
2	18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan yang dikeluarkan tepat waktu sesuai SOP	85 persen	85 persen	347,052,750	232,631,410	304,158,000	85 persen	1,112,088,000
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Capaian Realisasi Investasi	10 Triliun	10 Triliun	159,816,000	512,156,000	531,580,000	10 Triliun	149,540,000

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				9,716,578,339	15,252,646,456	15,440,286,254		10,964,228,398
2	19	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	6,538,673,975	5,928,048,218	6,298,862,688	100 %	6,964,228,398
2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	2 %	2 %	1,460,128,250	535,930,000	535,930,000	2 %	1,600,000,000
2	19	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAAN	Prestasi yang diraih Atlit Morowali pada Tingkat Provinsi	26 %	26 %	1,517,775,864	8,304,805,638	8,121,642,666	26 %	2,100,000,000
2	19	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	30 %	30 %	200,000,250	483,862,600	483,850,900	30 %	300,000,000
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG				1,523,083,516	2,108,380,624	2,405,229,193		2,600,000,000

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
			PARIWISATA								
3	26	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Lama Tinggal Wisatawan (Leng of Stay)	3-5 Hari	3-5 Hari	632,527,006	1,291,394,209	1,102,226,328	3- 5 Hari	1,100,000,000
3	26	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara	20 %	20 %	306,320,400	249,163,900	429,934,500	20 %	500,000,000
3	26	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Pendukung Sektor Pariwisata	10 %	10 %	584,236,110	567,822,515	873,068,365	10 %	1,000,000,000
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				5,323,075,836	5,337,768,678	5,451,238,490		5,968,783,142
2	23	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian target keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	4,705,009,236	4,696,012,018	4,695,949,860	100 %	4,708,783,142

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
2	23	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase capaian pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	600,104,600	615,719,180	729,251,150	100 %	1,190,000,000
2	23	3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase jumlah koleksi Budaya Etnis yang Ditemukan di Daerah	100 %	100 %	17,962,000	26,037,480	26,037,480	100 %	70,000,000
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				264,461,350	272,974,500	382,838,760		750,000,000
2	24	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatkan Kinerja pengelola dan penciptaan arsip naskah dinas	100 %	100 %	186,762,350	177,959,500	292,946,700	100 %	500,000,000
2	24	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan Arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbaga dan bernegara untuk kepentingan negara. pemeintahan. pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	100 %	100 %	77,699,000	95,015,000	89,892,060	100 %	250,000,000
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				16,572,226,385	48,770,715,685	49,348,049,305		20,771,721,900

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
3	25	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase urusan penunjang pemerintah yang dilaksanakan	100 %	100 %	6,010,706,985	6,710,260,073	7,134,210,413	100 %	6,104,440,500
3	25	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan Tangkap (Ton)	2500 To n	2500 Ton	7,969,873,000	34,291,212,000	34,310,905,280	2500 T on	8,354,549,000
3	25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah waktu yang dibutuhkan	12 bula n	12 bulan	1,652,202,400	4,408,043,012	4,435,333,012	12 bula n	4,056,496,400
3	25	5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah waktu yang dibutuhkan	12 bula n	12 bulan	20,900,000	0	247,156,000	12 bula n	20,900,000
3	25	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah waktu yang dibutuhkan	12 bula n	12 bulan	918,544,000	3,361,200,600	3,220,444,600	12 bula n	2,235,336,000
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				6,269,416,327	6,931,025,658	7,339,148,453		6,011,211,470
3	30	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	4,506,364,584	4,376,176,065	4,499,079,966	100 %	4,576,211,470

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
3	30	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	26 %	26 %	29,236,400	29,230,500	29,230,500	26 %	55,000,000
3	30	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	29 %	29 %	1,092,835,405	1,915,219,855	1,996,775,799	29 %	850,000,000
3	30	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas dan Jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	27 %	27 %	215,205,500	215,103,000	487,375,500	27 %	115,000,000
3	30	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	16 %	16 %	268,687,138	267,829,338	264,185,788	16 %	415,000,000
3	30	7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk Dalam daerah yang dipromosikan di luar		33 %	157,087,300	127,466,900	62,500,900	33 %	0
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				1,103,337,621	1,156,394,734	1,195,710,534		1,930,000,000

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
3	31	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten		43 %	1,003,358,621	1,069,327,734	1,108,643,534	43 %	1,810,000,000
3	31	3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait	20 %	20 %	44,977,000	44,907,000	44,907,000	20 %	55,000,000
3	31	4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		23 %	55,002,000	42,160,000	42,160,000	23 %	65,000,000
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	1		SEKRETARIAT DAERAH				1,897,320,000	1,790,463,000	1,806,463,000		1,932,320,000
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kebijakan Strategis Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	865,459,840	806,276,650	711,943,650	100 %	890,459,840
4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %	100 %	1,031,860,160	984,186,350	1,094,519,350	100 %	1,041,860,160
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
4	1		SEKRETARIAT DAERAH				1,022,999,850	914,703,810	925,703,810		1,042,446,698
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	448,701,850	412,922,310	405,247,810	100 %	459,148,698
4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Perekonomian dan Pembangunan	100 %	100 %	574,298,000	501,781,500	520,456,000	100 %	583,298,000
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	1		SEKRETARIAT DAERAH				2,793,279,995	2,793,279,805	3,555,276,805		2,860,491,995
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	664,243,995	724,973,805	736,973,805	100 %	715,363,995
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase produk hukum yang dihasilkan	100 %	100 %	2,129,036,000	2,068,306,000	2,818,303,000	100 %	2,145,128,000
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	1		SEKRETARIAT DAERAH				33,851,285,000	87,199,043,100	94,501,608,100		37,799,021,304

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	614,017,960	800,753,330	751,282,080	100 %	614,621,304
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	50 %	50 %	33,237,267,040	86,398,289,770	93,750,326,020	50 %	37,184,400,000
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	1		SEKRETARIAT DAERAH				1,533,639,060	1,330,011,895	1,339,000,443		422,098,470
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kebijakan Strategis Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	77 %	77 %	1,533,639,060	1,330,011,895	1,339,000,443	77 %	422,098,470
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	1		SEKRETARIAT DAERAH				2,077,319,850	1,787,034,650	1,799,034,600		1,954,993,600
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase kebijakan strategis urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	1,405,847,520	1,220,907,330	1,171,814,330	100 %	1,283,518,200
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN	persentase kebijakan strategis dibidang pemerintahan	100 %	100 %	671,472,330	566,127,320	627,220,270	100 %	671,475,400

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
			RAKYAT								
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	1		SEKRETARIAT DAERAH				1,573,402,000	1,734,252,360	1,995,244,890		1,592,927,500
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	100 %	590,152,000	567,850,360	749,084,890	100 %	129,362,500
4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	100 %	100 %	983,250,000	1,166,402,000	1,246,160,000	100 %	1,463,565,000
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	1		SEKRETARIAT DAERAH				2,118,743,890	2,118,741,930	3,137,741,630		2,166,040,000
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	2,118,743,890	2,118,741,930	3,137,741,630	100 %	2,166,040,000
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	1		SEKRETARIAT DAERAH				31,822,217,994	33,189,428,952	34,567,183,371		32,191,836,800

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	31,822,217,994	33,189,428,952	34,567,183,371	100 %	32,191,836,800
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	2		SEKRETARIAT DPRD				25,812,155,836	36,140,589,807	36,349,913,592		56,915,498,600
4	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	20,228,948,986	27,020,007,307	27,229,331,092	100 %	51,321,727,600
4	2	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 %	100 %	5,583,206,850	9,120,582,500	9,120,582,500	100 %	5,593,771,000
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	1		PERENCANAAN				11,113,545,883	11,669,548,409	13,486,883,651		11,737,477,667
5	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	7,387,491,953	7,917,319,409	8,672,409,351	100 %	7,291,112,417

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	1,896,286,430	2,139,616,850	3,052,919,950	100 %	2,236,365,250
5	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi capaian program OPD mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 %	100 %	1,829,767,500	1,612,612,150	1,761,554,350	100 %	2,210,000,000
5	5		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				728,379,050	1,148,025,590	1,212,215,590		970,000,000
5	5	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Presentase Hasil Penelitian Dan Pengembangan yang diimplementasikan	100 %	100 %	728,379,050	1,148,025,590	1,212,215,590	100 %	970,000,000
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	2		KEUANGAN				213,476,809,254	322,217,285,861	349,536,406,710		223,563,755,000
5	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	15,759,461,711	54,973,236,701	68,273,196,462	100 %	1,343,450,140
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	100 %	100 %	197,074,972,553	265,117,148,590	279,136,309,678	100 %	221,577,557,510

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Jumlah BMD yang terkelola dengan tertib dan baik	100 %	100 %	642,374,990	2,126,900,570	2,126,900,570	100 %	642,747,350
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	2		KEUANGAN				21,451,422,921	22,497,997,767	25,866,120,857		19,751,993,503
5	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	17,905,958,721	18,300,657,017	21,602,095,858	100 %	15,909,213,353
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Potensi PAD yang Ditetapkan Sebagai Objek Penerimaan Daerah	80 %	80 %	3,545,464,200	4,197,340,750	4,264,024,999	80 %	3,842,780,150
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	3		KEPEGAWAIAN				6,845,416,647	6,542,836,836	7,009,740,987		9,825,515,942
5	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	4,625,554,647	4,535,071,836	5,000,728,987	100 %	7,666,515,942
5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pejabat Struktural Eselon III yang Sudah Mengikuti Diklat PIM	67.11 %	67.11 %	2,219,862,000	2,007,765,000	2,009,012,000	67.11 %	2,159,000,000

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
5	4		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				3,042,726,500	2,222,206,000	2,078,371,625		2,100,000,000
5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Presentase penempatan ASN sesuai ANJAB	20.00 %	20.00 %	3,042,726,500	2,222,206,000	2,078,371,625	20.00 %	2,100,000,000
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
6	1		INSPEKTORAT DAERAH				14,623,469,840	18,203,334,158	19,815,967,220		12,621,124,500
6	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	11,791,095,940	14,872,080,158	16,394,506,220	100 %	8,515,756,600
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi LHP BPK-RI yang selesai ditindak lanjuti	75 %	75 %	1,916,918,100	2,127,525,000	2,122,382,000	75 %	2,670,618,100
6	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang melaksanakan SPIP sesuai ketentuan	76,92 %	76,92 %	915,455,800	1,203,729,000	1,299,079,000	76,92 %	1,434,749,800
7			UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1		KECAMATAN				4,450,424,196	5,724,960,069	5,913,562,830		4,581,935,000
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	4,020,861,696	5,012,162,669	5,133,953,930	100 %	4,137,290,000

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	100 %	100 %	229,484,600	384,379,500	206,566,900	100 %	244,530,000
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa	100 %	100 %	70,186,900	200,579,400	446,169,500	100 %	70,200,000
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan	100 %	100 %	6,120,000	4,080,000	5,100,000	100 %	6,130,000
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	JUMLAH PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN	100 %	100 %	122,061,000	122,048,500	120,062,500	100 %	122,065,000
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN	100 %	100 %	1,710,000	1,710,000	1,710,000	100 %	1,720,000
7			UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1		KECAMATAN				3,965,801,818	4,211,655,351	4,604,256,246		3,970,517,000
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	3,436,920,318	3,414,145,501	3,730,709,496	100 %	3,435,267,000

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	100 %	100 %	19,492,500	19,580,000	27,080,000	100 %	20,000,000
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa	100 %	100 %	296,531,900	571,006,850	604,041,500	100 %	300,000,000
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan	15 %	15 %	9,877,000	4,954,250	4,954,250	15 %	10,000,000
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	JUMLAH PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN	100 %	100 %	119,354,200	79,050,000	101,022,000	100 %	120,000,000
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN	100 %	100 %	83,625,900	122,918,750	136,449,000	100 %	85,250,000
7			UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1		KECAMATAN				3,890,021,179	4,471,156,185	4,648,567,854		3,810,408,350
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	3,405,739,329	3,704,997,035	3,989,574,424	100 %	3,320,190,100

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	100 %	100 %	209,797,360	231,819,570	95,989,850	100 %	209,797,360
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa	100 %	100 %	51,983,600	246,928,500	248,970,500	100 %	53,900,000
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan	100 %	100 %	2,850,000	8,550,000	0	100 %	5,000,000
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	JUMLAH PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN	100 %	100 %	145,396,540	141,955,740	174,457,740	100 %	145,396,540
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN	100 %	100 %	74,254,350	136,905,340	139,575,340	100 %	76,124,350
7			UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1		KECAMATAN				3,520,975,270	4,764,233,429	4,913,320,683		3,520,150,812
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase urusan penunjang pemerintah yang dilaksanakan	100 %	100 %	3,057,916,465	4,118,765,924	4,261,877,398	100 %	3,066,368,507

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	100 %	100 %	40,508,105	78,358,105	78,358,105	100 %	43,508,105
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa	100 %	100 %	222,899,200	357,697,900	333,229,680	100 %	225,899,200
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan	100 %	100 %	11,400,000	11,400,000	11,400,000	100 %	13,400,000
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	JUMLAH PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN	100 %	100 %	127,975,000	127,975,000	148,205,000	100 %	130,975,000
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				60,276,500	70,036,500	80,250,500		40,000,000
7			UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1		KECAMATAN				4,373,950,454	4,714,376,962	4,904,743,065		4,368,070,000
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	4,043,567,454	4,071,906,262	4,342,404,365	100 %	4,037,275,000

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	100 %	100 %	11,400,000	5,700,000	5,700,000	100 %	11,500,000
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDDesa	100 %	100 %	284,393,000	579,220,700	500,788,700	100 %	284,495,000
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan	100 %	100 %	11,400,000	4,560,000	4,560,000	100 %	11,500,000
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN	100 %	100 %	23,190,000	52,990,000	51,290,000	100 %	23,300,000
7			UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1		KECAMATAN				9,412,937,891	10,299,846,161	10,677,029,580		2,777,688,045
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	9,143,817,891	9,006,678,711	9,216,793,014	100 %	2,508,567,625
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	100 %	100 %	72,382,000	42,928,900	42,928,900	100 %	72,382,400

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDDesa	100 %	100 %	196,738,000	1,250,238,550	1,417,307,666	100 %	196,738,020
7			UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1		KECAMATAN				999,999,971	1,199,999,726	1,207,999,704		1,115,927,286
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	383,731,510	396,118,250	425,970,349	100 %	476,398,825
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDDesa	100 %	100 %	616,268,461	803,881,476	782,029,355	100 %	639,528,461
7			UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1		KECAMATAN				1,000,000,000	1,200,000,000	1,209,499,690		1,203,350,000
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	320,447,380	311,743,375	302,496,665	100 %	332,188,000
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDDesa	100 %	100 %	679,552,620	888,256,625	907,003,025	100 %	871,162,000
7			UNSUR KEWILAYAHAN								

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
7	1		KECAMATAN				999,998,636	1,199,998,293	1,209,998,268		1,000,138,800
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	300,219,436	369,414,966	366,879,541	100 %	300,359,600
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa	100 %	100 %	699,779,200	830,583,327	843,118,727	100 %	699,779,200
7			UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1		KECAMATAN				1,000,000,000	1,200,000,000	1,210,499,885		1,000,001,100
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	265,519,600	353,593,900	372,047,001	100 %	265,520,500
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa	100 %	100 %	734,480,400	846,406,100	838,452,884	100 %	734,480,600
7			UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1		KECAMATAN				999,999,992	1,199,999,485	1,208,989,991		999,999,992
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	329,381,234	293,788,734	400,682,034	100 %	329,381,234

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDDesa	100 %	100 %	670,618,758	906,210,751	808,307,957	100 %	670,618,758
7			UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1		KECAMATAN				999,999,758	1,199,999,758	1,240,499,758		1,002,873,438
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	308,108,420	297,599,380	321,505,530	100 %	279,601,850
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDDesa	100 %	100 %	691,891,338	902,400,378	918,994,228	100 %	723,271,588
7			UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1		KECAMATAN				3,059,132,423	3,730,803,360	3,895,919,590		3,055,892,130
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	2,568,125,883	3,007,317,460	3,261,247,190	100 %	2,564,854,580
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	100 %	100 %	372,829,000	611,005,900	540,937,400	100 %	372,830,000

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDDesa	100 %	100 %	19,900,000	54,960,000	57,720,000	100 %	19,910,000
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	JUMLAH PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN	100 %	100 %	80,977,540	11,900,000	11,900,000	100 %	80,987,550
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN	100 %	100 %	17,300,000	45,620,000	24,115,000	100 %	17,310,000
7			UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1		KECAMATAN				6,925,802,501	8,128,864,464	9,036,091,392		1,651,000,000
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	6,310,313,001	7,040,560,164	7,472,911,592	100 %	1,037,000,000
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	100 %	100 %	13,500,000	13,500,000	75,570,000	100 %	14,000,000
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDDesa	100 %	100 %	113,049,500	292,444,500	559,575,000	100 %	180,000,000

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan	100 %	100 %	50,002,000	41,000,000	41,000,000	100 %	0
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	JUMLAH PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN	100 %	100 %	330,668,000	652,059,800	773,434,800	100 %	305,000,000
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN	100 %	100 %	108,270,000	89,300,000	113,600,000	100 %	115,000,000
7			UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1		KECAMATAN				999,999,796	1,199,997,456	1,209,981,978		1,019,050,000
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	300,380,660	304,176,360	320,609,050	100 %	313,050,000
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa	100 %	100 %	699,619,136	895,821,096	889,372,928	100 %	706,000,000
7			UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1		KECAMATAN				3,537,141,243	3,970,140,031	4,224,357,356		2,711,682,621
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	2,924,854,243	3,031,496,731	3,310,603,856	100 %	2,094,682,621

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
			KABUPATEN/KOTA								
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	100 %	100 %	181,798,800	361,916,300	354,796,300	100 %	182,000,000
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa	100 %	100 %	377,502,200	463,672,000	439,939,700	100 %	380,000,000
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN	100 %	100 %	52,986,000	113,055,000	119,017,500	100 %	55,000,000
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
8	1		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				8,753,191,605	9,255,700,419	9,766,242,187		7,114,540,321
8	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	3,643,894,825	3,714,461,199	3,966,960,767	1 Tahun	3,603,697,405
8	1	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase ASN yang Mendapatkan Pendidikan Bela Negara	100 %	100 %	259,734,500	1,066,780,600	1,314,386,750	100 %	260,000,000

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
8	1	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase partai politik yang mendapatkan pendidikan politik serta etika budaya poltik	100 %	100 %	3,047,979,230	2,902,908,020	2,903,073,020	100 %	1,448,135,266
8	1	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase Pengurus Ormas yang Aktif	78 %	78 %	349,570,300	273,862,300	273,817,300	78 %	349,679,650
8	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi. sosial dan pelestarian budaya di 9 kecamatan	0,33 %	0,33 %	752,056,650	677,710,300	686,765,350	0,33 %	753,028,000
8	1	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Daerah Rawan Konflik	88 %	88 %	699,956,100	619,978,000	621,239,000	88 %	700,000,000
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan	Presentase Jumlah Hasil Rakor Forkopimda	100 %	100 %	699,956,100	619,978,000	621,239,000	100 %	700,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Target	Pagu Indikatif
	Nasional dan Penanganan Konflik Sosial								
TOTAL					1,125,984,791,01 8	1,942,965,827,08 8	2,059,027,909,36 2		1,384,025,483,228

Sumber : P-RKPD Kab. Morowali Tahun 2023

D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Dalam menentukan Prioritas Pembangunan Kabupaten Morowali tidak terlepas dari arah dan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan provinsi dan nasional.

Pemerintah Kabupaten Morowali telah menetapkan 3 (tiga) prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat masa pandemi covid 19 melalui peningkatan jaring pengaman sosial, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, BUMDES dan IKM;
2. Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan bencana;
3. Memantapkan kualitas pelayanan publik dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah yang diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan dalam P-RPJMD Tahun 2018 – 2023, Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 sebagaimana yang ditampilkan pada tabel-tabel selanjutnya.

Tabel 1.13
Program Prioritas Tahun 2023 yang mendukung Prioritas Pembangunan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rumah Sakit Pratama
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	
			Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
			Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	
				Perlindungan Anak
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rumah Sakit Umum Daerah Morowali
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	SEKRETARIAT DAERAH
			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	SEKRETARIAT DAERAH
			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	SEKRETARIAT DAERAH
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	SEKRETARIAT DAERAH
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	SEKRETARIAT DAERAH
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	SEKRETARIAT DAERAH
			Administrasi Tata Pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH
			Fasilitasi Kerja Sama Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	SEKRETARIAT DAERAH
			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	SEKRETARIAT DAERAH

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
			Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
			Layanan Administrasi DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
			Peningkatan Kapasitas DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
			Fasilitasi Tugas DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	
		EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Daerah
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Mutasi dan Promosi ASN	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	
			Pengembangan Kompetensi ASN	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat Daerah
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat Daerah
			Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Daerah
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Semua Kecamatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Semua Kecamatan
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Semua Kecamatan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Semua Kecamatan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Semua Kecamatan
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Semua Kecamatan
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Semua Kecamatan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Semua Kecamatan
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamongpraja
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satuan Polisi Pamongpraja
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamongpraja
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan Daerah
			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat	Dinas Perpustakaan Daerah

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	
			Kabupaten/Kota	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Dinas Perpustakaan Daerah
			Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Dinas Perpustakaan Daerah
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung ekonomi dan pelayanan dasar	Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan bencana	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan Daerah
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan Daerah
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan Daerah
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan Daerah
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan Daerah

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	
			Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dinas Perhubungan Daerah
			Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dinas Perhubungan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan bencana	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamongpraja
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup Daerah

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Penyimpanan sementara Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup Daerah

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	
			Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan bencana	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing	Mewujudkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat masa pandemic covid 19 melalui peningkatan jaring pengaman social, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produksi dan produktivitas sector pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, BUMDES dan IKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Dinas Sosial
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Dinas Sosial
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat masa pandemic covid 19 melalui peningkatan jaring pengaman social, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produksi dan produktivitas sector pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, BUMDES dan IKM	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
			Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	
			Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
			Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan Daerah
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan Daerah
			Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dinas Perikanan Daerah
			Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan Daerah

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dinas Perikanan Daerah
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan Daerah
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Dinas Perikanan Daerah
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan Daerah
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
			Penataan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	
			Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	
				Satu Pintu
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memantapkan kualitas pelayanan public dan penguatan SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Muwujudkan ketahanan social ekonomi masyarakat ketahanan pangan, masa pandemic covid 19 melalui peningkatan jaring pengaman social, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produksi dan produktivitas sector pertanian, perkebunan, perikanan,UMKM, BUMDES dan IKM	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

Sumber : P-RKPD Kab. Morowali tahun 2023

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Secara Implementatif Kebijakan Umum APBD Kabupaten Morowali Tahun 2023 yang merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali. Kebijakan Umum tersebut telah dituangkan dalam Nota Kesepakatan dan merupakan penjabaran dari tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023 serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupten Morowali Tahun 2023 yang untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2023. KUA-APBD juga disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD tahun 203 baik pada aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

1. Urusan Pendidikan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka untuk menjamin terselenggaranya urusan wajib daerah yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada warga Negara perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Untuk merealisasikan Visi yang telah ditetapkan tahun (2019 – 2023) oleh pemerintah daerah yang bertumpu pada kesejahteraan masyarakat yang dijabarkan dalam misi daerah bidang pendidikan yang berpotensi pada sumberdaya dan ketaqwaan serta kemampuan yang dimiliki yang ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggungjawab yang optimal dan proporsional dari seluruh komponen masyarakat dan

pemerintah maka Misi yang akan dilaksanakan dapat dijabarkan sebagai berikut : Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas melalui Pembiayaan Pendidikan Gratis, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pengajar, Pemberian beasiswa dan penambahan sarana pendidikan guna menciptakan SDM yang cerdas, kreatif, inovatif dan bertaqwa.

- Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang adil dan merata.
- Mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi.
- Mewujudkan sistem pendidikan yang berorientasi pada akhlak mulia.
- Mengupayakan rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang lebih berorientasi pada pendidikan vokasi.
- Meningkatkan akses pendidikan nonformal dan informal.
- Meningkatkan infrastruktur yang mendukung pendidikan
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

2. Urusan Kesehatan

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan tahun (2016 – 2021) yang bertumpu pada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proporsional dari seluruh komponen masyarakat dan pemerintah maka Misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang paripurna, merata, bermutu dan terjangkau 2. Mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan dan menggerakkan masyarakat berperilaku hidup sehat 3. Meningkatkan

tata kelola manajemen pembangunan kesehatan Untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan strategi dan program kegiatan yang tepat sehingga visi dan misi dapat tercapai. Adapun strategi untuk itu adalah sebagai berikut :

Tabel 1.14
Strategi untuk Mewujudkan Urusan Kesehatan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Morowali yang Sejahtera Bersama.			
Misi 4 : Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui PEMBIAYAAN KESEHATAN GRATIS, peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan, tenaga Kesehatan dan ketersediaan obat yang berkualitas, serta mendorong kebersihan, Kesehatan dan keindahan lingkungan agar tercipta suasana sehat dan nyaman.			
1. Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui Pembiayaan Kesehatan Gratis	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata melalui pembiayaan kesehatan gratis;	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui pembiayaan kesehatan gratis dan terjangkau;	1. Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 2. Peningkatan pelayanan kesehatan anak & balita 3. Peningkatan pelayanan kesehatan lansia
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan;	Membangun dan meningkatkan fasilitas Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau;	4. 1. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan saran dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya Pengadaan, peningkatan dan perbaikan saran dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/
3. Peningkatan kuantitas dan Kualitas tenaga Kesehatan			
4. ketersediaan obat yang berkualitas Mendorong			

5. Masyarakat Morowali Menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat Menjaga Kesehatan lingkungan agar tercipta 6. Suasana sehat dan nyaman			rumah sakit mata
		Peningkatan Derajat kesehatan dan status gizi masyarakat yang masih rendah;	Upaya Kesehatan masyarakat
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan;	Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan;	Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur
	Terwujudnya penyediaan obat yang berkualitas;	Meningkatkan penyediaan obat;	Obat dan Perbekalan Kesehatan.
	Terwujudnya penataan lingkungan yang sehat dan nyaman.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan;	Pengembangan Lingkungan Sehat
		Pemberian insentif bagi petugas kesehatan di daerah terpencil dan pulau-pulau kecil.	

3. Urusan Sosial

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor

129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Dinas Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. SPM bidang Sosial mencakup 4 (empat) pelayanan dasar yaitu :

- Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang Sosial
- Penyediaan sarana dan prasarana sosial
- Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat
- Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.

Dari 4 (empat) jenis pelayanan dasar tersebut diatas dijabarkan lagi kedalam 6 (Enam) indikiator SPM daerah Kabupaten yang akan dicapai secara bertahap dalam kurun waktu tahun 2018 – 2023 yang terdiri dari :

- Pelayanan dasar untuk pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
- Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
- Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks napi, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)
- Program pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
- Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
- Pembinaan anak terlantar dan anak berhadapan dengan hukum

4. Urusan Perumahan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 29/PRT/M/2018 tentang standart teknis Standart Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun

2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah SPM Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Adapun jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Perumahan Kawasan Permukiman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota adalah :

- Penyediaan Pembangunan Baru Rumah Tidak Layak Huni,
- Penyediaan dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum,

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;

Untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan strategi dan program kegiatan yang tepat sehingga visi dan misi dapat tercapai. Adapun strategi untuk itu adalah sebagai berikut:

Tabel 1.15
Strategi untuk Mewujudkan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman	Meningkatkan kinerja akuntabilitas satuan polisi	Meningkatkan kinerja satuan polisi pamong praja	Meningkatkan peningkatan pengawasan	Mengembangkan sistem pengendalian intern

dan bertaqwa melalui peningkatan pembinaan agama sarana dan prasarana tempat ibadah sehingga terciptanya kerukunan hidup antar umat beragama	pamong praja		internal pemerintah daerah	pemerintah (SPIP)
			Meningkatkan penataan Organisasi, tata laksana dan tertib regulasi	Melaksanakan penataan organisasi perangkat daerah (SOTK) yang tepat fungsi

6. Urusan Pekerjaan Umum

Laporan Tahunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 29/PRT/M/2018 tentang standart teknis Standart Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta ditegaskan dalam Peraturan Mendagri atau PERMENDAGRI No 59 tahun 2021 tentang penerapan standar Pelayanan Minimal (SPM), Pemerintah daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar

yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya. Adapun jenis Pelayanan dasar untuk daerah Kabupaten Kota menurut PERMENDAGRI no 59 tahun 2021 yaitu :

- Pemenuhan Kebutuhan Pokok air Minum sehari hari;
- Penyediaan Pelayanan Pengolahan air Limbah Domestik; Perangkat Daerah melakukan pengumpulan data meliputi :
- Jumlah dan Identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan jasa kebutuhan warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.
- Jumlah dan Kualitas barang atau jasa yang tersedia termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

Pengumpulan data sesuai dengan standar teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100% dari target dan indikator kinerja pencapaian SPM setiap tahun. Hasil pengumpulan data diintegrasikan dengan system informasi pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai target dan indikator kinerja pencapaian kinerja SPM setiap tahun tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Adapun capaian kinerja makro diukur dengan menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro Kabupaten Morowali
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	Persen	72,55	73,82	1,751
2	Angka Kemiskinan	Persen	12,58	12,31	-2,224
3	Angka Pengangguran	Persen	3,20	2,84	-11,25
4	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	28,40	20,34	-28,38
5	Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah	421,701	498,605	18,237
6	Ketimpangan Pendapatan	Persen	0,285	0,281	-1,404

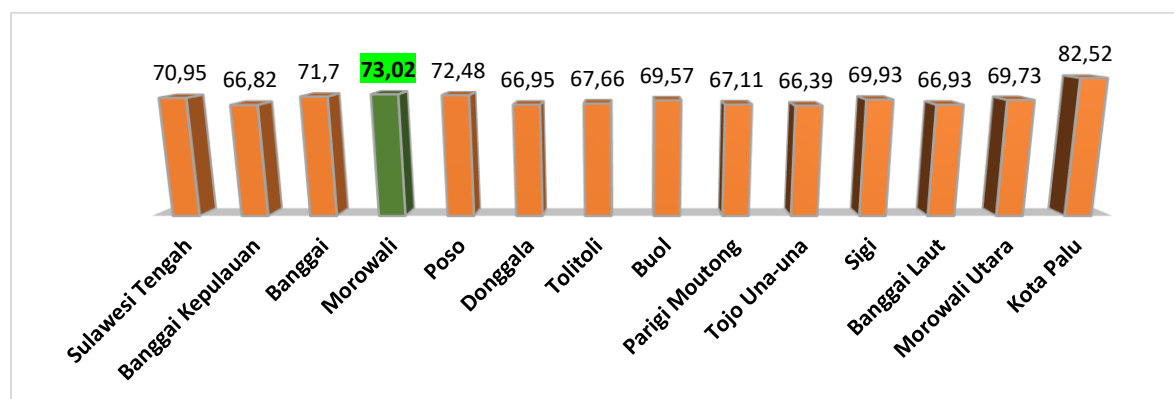
Sumber : BPS Kabupaten Morowali/BPS Sulteng Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup dengan menggunakan pendekatan tiga

dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan Usia harapan hidup (UHH), selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS). Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

IPM Kabupaten Morowali pada tahun 2023 mencapai 73,02 persen atau menempati urutan tertinggi kedua setelah kota palu dan masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan IPM Propinsi Sulawesi Tengah. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka IPM kabupaten Morowali mengalami peningkatan sebesar 0,65 persen dari tahun 2022 sebesar 72,55 persen. Dengan demikian IPM Kabupaten Morowali Tahun 2023 berada pada kategori Tinggi menurut standar United Nations Development Program (UNDP). Adapun hasil pencapaian IPM Kabupaten Morowali pada tahun 2023 yang dikeluarkan oleh BPS kabupaten Morowali maupun Sulawesi tengah dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Grafik 2.1

IPM Menurut Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun 2023

Sumber : Source Url: <https://sulteng.bps.go.id/indicator/26/48/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-kabupaten-kota.html>

- a. Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. UHH Kabupaten Morowali pada Tahun 2023 mencapai 69,37 persen atau berada pada urutan ke tujuh se-sulawesi tengah, walaupun demikian namun UHH Kabupaten Morowali masih berada diatas UHH Propinsi Sulawesi tengah. Dengan capaian 69,37 persen ini menggambarkan bahwa penduduk kabupaten morowali rata-rata memiliki harapan hidup sampai dengan usia 69,37 tahun. Untuk lebih jelasnya capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Morowlai pada tahun 2021-2023 dapat dilihat pada table 2.1 dibawah in :

Tabel 2.2
Usia Harapan Hidup (UHH) Menurut Kabupaten/ Kota
Se-Sulawesi Tengah Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota	TAHUN		
	2021	2022	2023
Sulawesi Tengah	68.83	68.93	69.17
Banggai Kepulauan	66.59	66.73	66.87
Banggai	70.88	70.88	71.02
Morowali	69.23	69.23	69.37
Poso	71.19	71.19	71.33
Donggala	67.50	67.61	67.86
Tolitoli	66.18	66.41	66.78
Buol	69.05	69.32	69.73
Parigi Moutong	64.35	64.35	64.62
Tojo Una-una	65.90	66.08	66.41
Sigi	70.09	70.15	70.35
Banggai Laut	65.67	65.81	66.08
Morowali Utara	69.71	69.77	69.97
Kota Palu	71.09	71.20	71.45

Sumber : Source Url: <https://sulteng.bps.go.id/indicator/26/46/1/-metode-baru-umur-harapan-hidup-uhh-saat-lahir-menurut-kabupaten-kota.html>

- b. Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan salah satu indikator yang memegang peranan penting dalam melakukan pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di kabupaten Morowali Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2023 berada pada angka 13,38 persen ini

mengartikan bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,38 tahun atau setara dengan Diploma I. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Morowali pada tahun 2023 berada pada urutan ke tiga setelah Kota palu dan Kabupaten Poso. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Morowali kurun waktu 2021-2023 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.3
Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/ Kota
Se-Sulawesi Tengah Tahun 2021-2023

Provinsi/Kabupaten/Kota	Tahun		
	2021	2022	2023
SULAWESI TENGAH	13,23	13,32	13,33
Banggai Kepulauan	13,07	13,08	13,09
Banggai	13,25	13,34	13,34
Morowali	13,35	13,36	13,38
Poso	13,71	13,72	13,74
Donggala	12,51	12,60	12,61
Toli-Toli	12,89	12,92	13,04
Buol	13,10	13,17	13,17
Parigi Moutong	12,48	12,50	12,51
Tojo Una-Una	12,29	12,36	12,37
Sigi	12,88	12,97	13,05
Banggai Laut	12,96	13,02	13,03
Morowali Utara	12,25	12,28	12,29
Kota Palu	16,28	16,36	16,51

Sumber: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE3IzI=/metode-baru--harapan-lama-sekolah.html>

- c. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) juga merupakan indikator yang tidak terpisahkan dan memegang peranan penting dalam melakukan pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di kabupaten Morowali Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2023 berada pada angka 9,37 persen ini mengartikan bahwa rata-rata penduduk kabupaten morowali yang masuk jenjang pendidikan formal memiliki lama sekolah 9,37 Tahun atau baru menuntaskan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Morowali pada tahun 2023 berada pada urutan ke tiga setelah Kota palu dan

Kabupaten Poso. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Morowali kurun waktu 2021-2023 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.4
Rata-Rata Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/ Kota
Se-Sulawesi Tengah Tahun 2021-2023

Provinsi/Kabupaten/Kota	Tahun		
	2021	2022	2023
Sulawesi Tengah	8.89	8.89	8.96
Banggai Kepulauan	8.44	8.46	8.62
Banggai	8.53	8.54	8.63
Morowali	9.34	9.35	9.37
Poso	9.50	9.52	9.53
Donggala	7.98	7.98	7.99
Tolitoli	8.76	8.76	8.77
Buol	9.08	9.08	9.09
Parigi Moutong	7.74	7.77	8.04
Tojo Una-una	8.40	8.41	8.51
Sigi	8.82	8.84	9.03
Banggai Laut	8.63	8.63	8.64
Morowali Utara	8.72	8.75	8.94
Kota Palu	11.72	11.73	11.74

Sumber : Source Url: <https://sulteng.bps.go.id/indicator/26/130/1/-metode-baru-rata-rata-lama-sekolah-menurut-kabupaten-kota.html>

- d. Pengeluaran Perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Indikator ini memegang peran yang sangat penting dalam pengukuran IPM, menurut data BPS Sulawesi tengah Tahun 2023 Pengeluaran Rill Perkapita Kabupaten Morowali adalah sebesar Rp. 11.708 (Juta Rupiah) Angka ini adalah yang tertinggi kedua setelah Kota Palu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini :

Kabupaten/Kota	UHH		HLS		RLS		Pengeluaran Riil per Kapita		IPM	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(10)	(11)	(14)	(15)	(18)	(19)
Banggai Kepulauan	67,19	67,35	13,08	13,09	8,46	8,62	7.712	8.066	66,30	67,05
Banggai	71,95	72,09	13,34	13,34	8,54	8,63	9.963	10.400	71,58	72,19
Morowali	70,95	71,00	13,36	13,38	9,35	9,37	11.291	11.708	73,39	73,82
Poso	72,97	72,98	13,72	13,74	9,52	9,53	9.218	9.622	72,75	73,25
Donggala	70,32	70,52	12,60	12,61	7,98	7,99	8.303	8.766	67,49	68,17
Toli-Toli	70,71	71,09	12,92	13,04	8,76	8,77	8.191	8.665	68,77	69,68
Buol	70,73	71,06	13,17	13,17	9,08	9,09	8.176	8.678	69,37	70,18
Parigi Moutong	68,55	68,62	12,50	12,51	7,77	8,04	10.063	10.471	68,29	69,06
Tojo Una-Una	70,60	70,89	12,36	12,37	8,41	8,51	8.096	8.550	67,62	68,47
Sigi	70,91	71,11	12,97	13,05	8,84	9,03	8.498	8.891	69,40	70,28
Banggai Laut	70,48	70,75	13,02	13,03	8,63	8,64	8.037	8.470	68,40	69,12
Morowali Utara	72,06	72,19	12,28	12,29	8,75	8,94	9.242	9.623	70,02	70,74
Kota Palu	73,56	73,71	16,36	16,51	11,73	11,74	15.162	15.501	83,26	83,71
Sulawesi Tengah	70,49	70,66	13,32	13,33	8,89	8,96	9.696	10.149	71,01	71,66

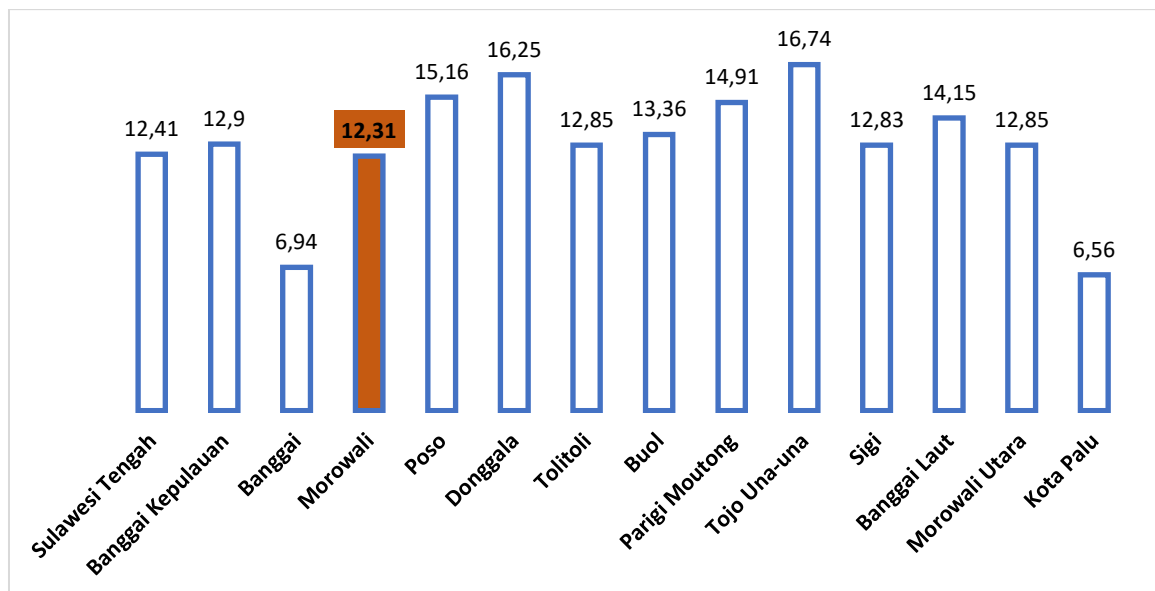
Sumber : BPS Sulawesi Tengah Tahun 2023

Gambar 2.1
IPM dan Komponen IPM Kabupaten/Kota
Se-Sulawesi Tengah Tahun 2022 dan 2023

2. Angka Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Konsep yang dipakai BPS dan juga beberapa negara lain adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), sehingga kemiskinan merupakan kondisi ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Penduduk miskin adalah

penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan (GK), yang diperoleh dari hasil survei (sampel). Angka kemiskinan yang dirilis BPS merupakan data makro dan merupakan hasil Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Secara umum angka kemiskinan dikabupaten morowali mengalami penurunan secara terus menerus setiap tahun, walaupun penurunannya belum secara signifikan. Pada tahun 2023 persentase penduduk miskin sebesar 12,31 persen atau mengalami penurunan sebesar -2,15 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 12,58 persen. Dengan demikian maka persentase penduduk miskin kabupaten morowali pada tahun 2023 berada pada urutan ketiga terendah se-seulawesi tengah setelah kota palu dan kabupaten banggai. Untuk lebih jelasnya angka kemiskinan kabupaten morolwai dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Sumber : <https://sulteng.bps.go.id/indicator/23/90/1/persentase-penduduk-miskin-p0-menurut-kabupaten-kota.html>

Grafik 2.2
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota
Se-Sulawesi Tengah Tahun 2023

Indeks Keparahan Kemiskinan, indikator ini memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada tahun 2023 indeks keparahan kemiskinan kabupaten morowali mencapai angka 0,32 persen, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berada pada angka 0,54 persen. Nilai indeks keparahan kemiskinan kabupaten morowali berada pada urutan terendah ketiga se-sulawesi tengah setelah Kota palu dan Kabupaten Banggai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Kabupaten/ Kota
Se-Sulawesi Tengah Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2021	2022	2023
Sulawesi Tengah	0,64	0,68	0,54
Banggai Kepulauan	0,42	0,35	0,63
Banggai	0,23	0,28	0,17
Morowali	0,54	0,54	0,32
Poso	0,62	0,66	0,63
Donggala	0,70	0,72	0,63
Tolitoli	0,30	0,30	0,36
Buol	0,51	0,34	0,32
Parigi Moutong	0,95	1,37	0,64
Tojo Una-una	0,95	0,78	0,52
Sigi	0,38	0,48	0,64
Banggai Laut	0,83	0,61	0,44
Morowali Utara	0,65	0,65	0,71
Kota Palu	0,20	0,25	0,19

Sumber : Source Url: <https://sulteng.bps.go.id/indicator/23/88/1/indeks-keparahan-kemiskinan-p2-menurut-kabupaten-kota.html>

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran

penduduk dari garis kemiskinan, pada tahun 2023 indeks kemiskinan kabupaten morowali berada pada angka 1,52 persen atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berada pada angka 2,03 persen. Secara umum indikator ini juga mengalami penurunan walaupun tidak secara signifikan. Dengan capaian angka 1,52 persen menempatkan kabupaten morowali berada pada urutan terendah ketiga se-propinsi Sulawesi tengah setelah kota palu dan kabupaten banggai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.6
Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Kabupaten/ Kota
Se-Sulawesi Tengah Tahun 2021-2023

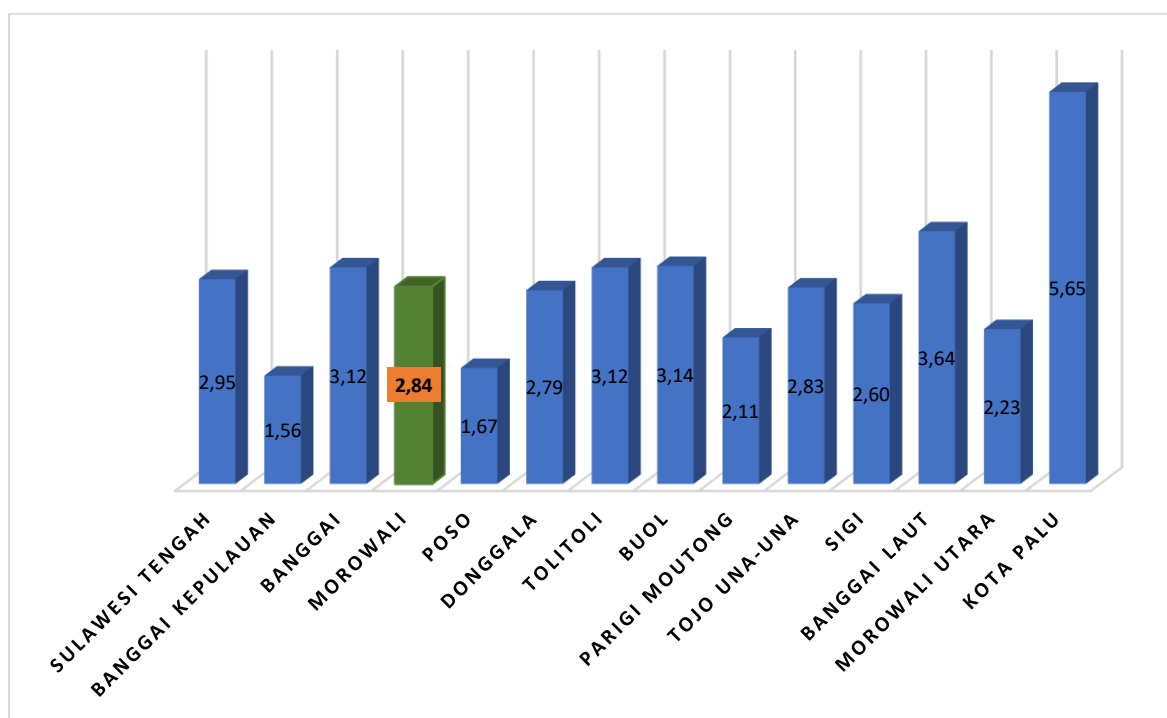
Kabupaten/Kota	Tahun		
	2021	2022	2023
Sulawesi Tengah	2,43	2,41	2,12
Banggai Kepulauan	1,89	1,79	2,23
Banggai	1,09	1,2	0,80
Morowali	2,11	2,03	1,52
Poso	2,57	2,4	2,58
Donggala	2,76	2,82	2,65
Tolitoli	1,66	1,53	1,59
Buol	2,01	1,79	1,63
Parigi Moutong	3,26	3,84	2,61
Tojo Una-una	3,25	2,8	2,42
Sigi	1,7	2,01	2,40
Banggai Laut	2,93	2,23	1,82
Morowali Utara	2,35	2,18	2,33
Kota Palu	0,86	0,94	0,84

Sumber : Source Url: <https://sulteng.bps.go.id/indicator/23/79/1/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-menurut-kabupaten-kota.html>

3. Angka Pengangguran

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran umumnya disebabkan karena

jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Menurut Hasyim (2017:197) pengangguran merupakan masalah strategi dalam perekonomian secara makro, karena berpengaruh langsung kepada standar kehidupan dan tekanan psikologis masyarakat. Pada tahun 2023 Angka pengangguran kabupaten morowali masih berada pada angka 2,84 persen atau mengalami penurunan sebesar -11,25 jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berada pada angka 12,58 persen. Walaupun mengalami penurunan dari tahun ke tahun namun jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Tengah kabupaten morowali masih ada pada peringkat ke delapan terendah se-Sulawesi Tengah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah Ini :



Sumber : <https://sulteng.bps.go.id/indicator/6/92/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sulawesi-tengah.html>

Grafik 2.3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota
Se-Sulawesi Tengah Tahun 2023

Berdasarkan grafik diatas maka hal ini tentunya sangat perlu mendapatkan perhatian khusus bagi pemerintah daerah mengingat kabupaten morowali merupakan Kawasan Industri tersbesar disulawesi tengah dengan peluang kerja yang masih sangat tinggi. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kurangnya SDM bagi pencari kerja local sehingga tenaga kerja yang tersedia belum mampu bersaing dipasar tenaga kerja yang ada di kabupaten morowali. Untuk itu Pemerintah daerah bekerja sama dengan kementerian perindustrian RI mencoba meningkatkan SDM tenaga kerja local melalui Pendidikan vokasi industry setara D1 dan telah menamatkan Angkatan 1 pada tahun 2023.

Dengan melihat data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) maka ada korelasi terhadap peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang ada. TPAK itu sendiri merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja, kurun waktu tahun 2021-2023 TPAK kabupaten morowali juga mengalami penurunan, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.6 dibawah ini. fenomena ini terjadi disebabkan karena migrasi penduduk dari luar kabupaten morowali yang begitu tinggi. Jika melihat data BPS tahun 2023 jumlah penduduk usia kerja (PUK) Kabupaten Morowali yang berusia 15 tahun keatas mencapai 124.848 orang yang terdiri dari Angkatan kerja sebesar 73.055 orang dengan uraian bekerja sebesar 70.978 orang dan menganggur sebesar 2.077 orang. Sementara Bukan Angaktan Kerja sebesar 51.793 dengan uraian sekolah 11.060 orang, mengurus rumah tangga 35.158 orang dan lainnya sebesar 5.575 orang.

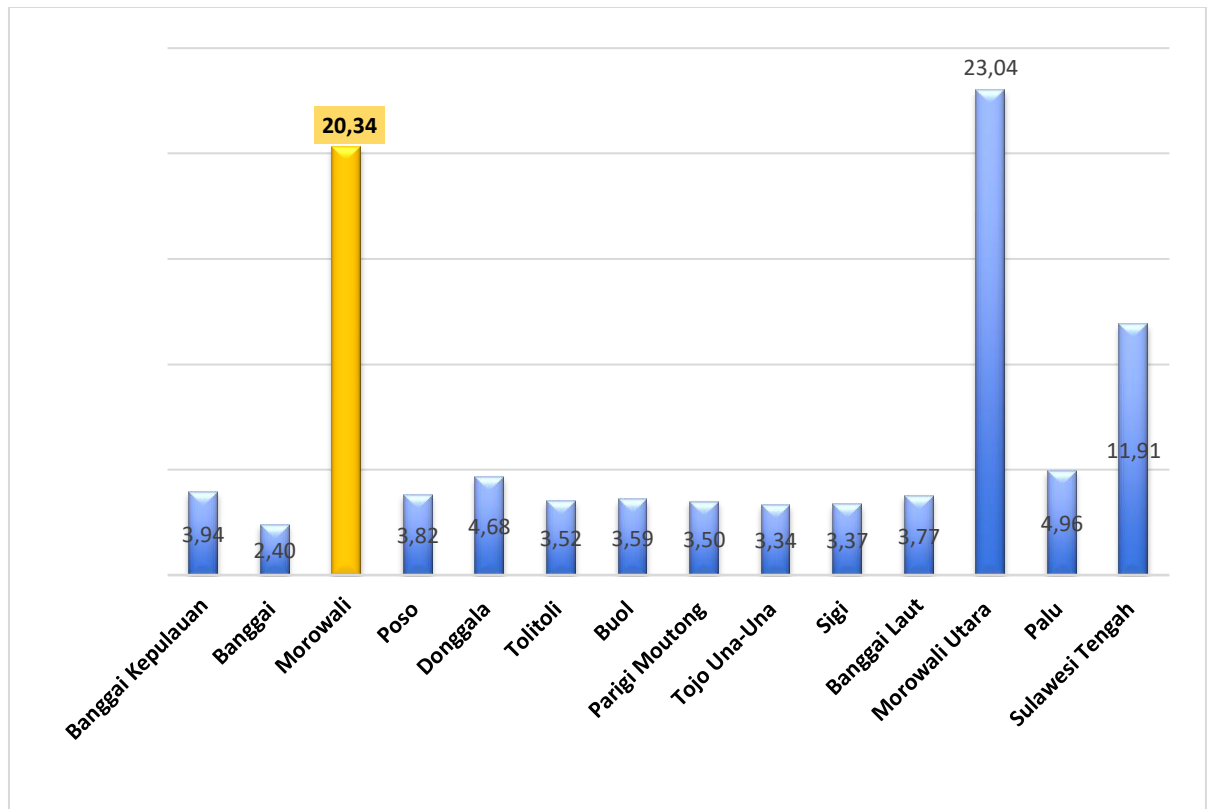
Tabel 2.7
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/ Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2021	2022	2023
Sulawesi Tengah	68,73	69,99	69,85
Banggai Kepulauan	71,98	74,63	72,76
Banggai	71,80	73,48	71,70
Morowali	63,75	60,74	58,52
Poso	73,54	72,41	71,07
Donggala	67,47	72,03	66,57
Tolitoli	64,04	64,70	68,80
Buol	67,52	69,18	69,43
Parigi Moutong	68,82	74,05	73,30
Tojo Una-una	74,86	68,47	75,06
Sigi	70,76	72,69	70,94
Banggai Laut	61,42	58,37	59,17
Morowali Utara	68,47	69,93	70,33
Kota Palu	65,07	64,68	69,28

Sumber : Source Url: <https://sulteng.bps.go.id/indicator/6/91/1/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-tpak-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sulawesi-tengah.html>

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu (Ali Ibrahim Hasyim). Pertumbuhan ekonomi kabupaten morowali pada tahun 2023 mencapai 20,34 persen atau menempati urutan kedua pertumbuhan ekonom tertinggi se-sulawesi tengah setelah kabupaten morowali utara. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka pertumbuhan ekonomi kabupaten morowali mengalami penurunan sebesar -28,38 persen yang mana pertumbuhan ekonomi kabupaten morowali pada tahun 2022 yaitu sebesar 28,40 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Sumber : BPS Sulteng, Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2024 hal. 774

Grafik 2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun 2023

Tentunya hal ini harus menjadi perhatian yang lebih serius dan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pada tahun berikutnya mengingat penduduk morowali sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Lebih jelasnya laju PDRB ADKH 2010 menurut lapangan usaha tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>		2019	2020	2021	2022 *	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	1,84	-2,77	3,22	1,81	-0,29
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	19,77	34,38	23,13	17,22	14,08
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	24,09	35,25	24,88	31,91	25,29
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	1,98	4,47	2,90	10,85	10,10
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	0,17	5,95	3,06	2,40	1,83
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	13,31	-16,58	74,45	34,62	2,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	2,90	-4,98	9,00	62,22	5,19
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	6,47	102,94	6,53	151,76	5,86
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	4,01	-10,48	14,20	56,25	16,93
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	6,80	7,09	9,83	23,56	6,70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	0,17	13,23	7,88	5,92	0,29

Lanjutan:

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022 *	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
L	Real Estat/Real Estate Activities	2,78	0,79	1,22	28,73	20,20
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	4,98	-1,17	1,28	14,38	10,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	5,05	1,06	4,59	-3,00	2,51
P	Jasa Pendidikan/Education	3,00	-0,18	0,74	0,48	4,53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	8,35	6,91	4,05	2,21	7,21
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	2,59	6,90	5,13	4,49	5,40
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		20,26	28,74	25,28	28,40	20,34

Sumber : BPS Morowali, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2024 hal. 293-294

Gambar 2.2
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha
Di Kabupaten Morowali tahun 2019-2023

5. Pendapatan Per kapita

Pendapatan Per Kapita adalah ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk. Pendapatan per kapita untuk suatu daerah dihitung dengan membagi pendapatan nasional suatu daerah tersebut dengan penduduknya. Kabupaten Morowali merupakan salah satu Kawasan industri terbesar yang ada di Sulawesi Tengah tentunya memegang peran

yang sangat penting dalam peningkatan PDRB perkapita. Pada tahun 2023 PDRB ADHK Kabupaten Morowali mencapai Rp. 498.605 (Ribu Rupiah), angka ini merupakan yang tertinggi se-Sulawesi tengah. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka PDRB per kapita kabupaten morowali mengalami peningkatan sebesar 18,24 persen dari tahun 2022 sebesar Rp. 421.701 (Ribu Rupiah). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.3 dibawah ini :

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2019	2020	2021	2022 *	2023 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten/Regency					
Banggai Kepulauan	22.609	21.732	22.594	23.481	24.172
Banggai	51.763	51.230	51.525	54.473	55.186
Morowali	282.072	274.654	334.609	421.701	498.605
Poso	25.373	25.491	26.435	27.128	27.894
Donggala	28.164	27.217	28.223	29.042	30.130
Tolitoli	24.400	24.608	25.435	26.091	26.746
Buol	24.501	26.499	27.453	28.098	28.747
Parigi Moutong	23.871	25.249	26.148	26.800	27.424
Tojo Una-Una	25.038	22.796	23.463	24.003	24.537
Sigi	26.083	23.846	24.863	25.366	25.893
Banggai Laut	22.385	22.843	23.565	24.207	24.796
Morowali Utara	63.252	67.002	72.984	98.002	118.785
Kota/Municipality					
Palu	41.517	41.516	43.411	44.690	46.301
Jumlah Kabupaten/Kota Total Regency/Municipality	42.268,21	45.291,85	49.883,10	56.758,49	62.743,70
Sulawesi Tengah	42.054,50	45.052,32	56.577,06	62.584,06	62.584,06

Sumber : BPS Sulteng, Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2024 hal. 777

Gambar 2.3
PDRB Per Kapita ADHK 2010 Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Tengah (Ribu Rupiah) 2019-2023

6. Gini Ratio

yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien Gini bernilai nol, jika pendapatan secara nyata menyebar merata, dan mendekati 1 jika secara nyata distribusi pendapatan menyebar tidak merata. Berdasarkan nilai gini ratio, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu : ketimpangan tinggi jika nilai koefisien gini ratio 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30. Pada tahun 2023 Indeks Gini Ratio kabupaten morowali mencapai 0,281 dengan kata lain Indeks Gini kabupaten Morowali berada pada kategori rendah. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berada pada angka 0,285 persen maka Indeks Gini kabupaten morowali mengalami penurunan sebesar -1,40 persen, walaupun penurunan ini tidak secara signifikan namun terjadi secara terus menerus setiap tahunnya. Pada tahun 2023 kabupaten morowali masih berada pada urutan ke delapan terendah indeks gini untuk seluruh kabupaten/kota yang ada di provinsi Sulawesi tengah, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.8
Gini Ratio Menurut Kabupaten/ Kota Se-Sulawesi Tengah
Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2021	2022	2023
Sulawesi Tengah	0,316	0,308	0,304
Banggai Kepulauan	0,279	0,28	0,272
Banggai	0,277	0,315	0,283
Morowali	0,297	0,285	0,281
Poso	0,270	0,256	0,265
Donggala	0,261	0,28	0,237

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2021	2022	2023
Tolitoli	0,349	0,295	0,345
Buol	0,321	0,266	0,258
Parigi Moutong	0,287	0,279	0,298
Tojo Una-una	0,247	0,25	0,262
Sigi	0,291	0,265	0,281
Banggai Laut	0,251	0,247	0,244
Morowali Utara	0,301	0,269	0,284
Kota Palu	0,308	0,355	0,324

Sumber : Source Url: <https://sulteng.bps.go.id/indicator/23/52/1/gini-rasio-menurut-kabupaten-kota.html>

2.1.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Jumlah	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR						
1	URUSAN PENDIDIKAN					
		Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	6,246	88.220339	Dinas Pendidikan Daerah	
		Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan	7,080			
		Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	19,672	99.5345072	Dinas Pendidikan Daerah	
		Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kab/Kota yang Bersangkutan	19,764			
		Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	8,151	93.5820896	Dinas Pendidikan Daerah	
		Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan	8,710			
		Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	1,676	100	Dinas Pendidikan Daerah	
		Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kab/Kota yang Bersangkutan	1,676			
2	URUSAN KESEHATAN					
		Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan	392	2.1309328	Dinas Kesehatan dan KB	
		Jumlah Penduduk di kabupaten/kota	183,957			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Jumlah	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi	2	100	Dinas Kesehatan dan KB	
		Jumlah RS di kabupaten/kota	2			
		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	2,408	100	Dinas Kesehatan dan KB	
		Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota	2,408			
		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	2,932	100	Dinas Kesehatan dan KB	
		Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota	2,932			
		Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	2,966	100	Dinas Kesehatan dan KB	
		Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota	2,966			
		Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	10,186	100	Dinas Kesehatan dan KB	
		Jumlah balita di kabupaten/kota	10,186			
		Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	30,891	100	Dinas Kesehatan dan KB	
		Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota	30,891			
		Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	84,618	100	Dinas Kesehatan dan KB	
		Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota	84,618			
		Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	9,411	100	Dinas Kesehatan dan KB	
		Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota	9,411			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Jumlah	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	16,044	100	Dinas Kesehatan dan KB	
		Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota	16,044			
		Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3,783	100	Dinas Kesehatan dan KB	
		Jumlah penderita DM di kabupaten/kota	3,783			
		Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	320	100	Dinas Kesehatan dan KB	
		Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota	320			
		Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2,499	100	Dinas Kesehatan dan KB	
		Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota	2,499			
		Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	3,993	100	Dinas Kesehatan dan KB	
		Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota	3,993			
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
		Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)	72,455.42	51.3449456	Dinas PU dan Penataan Ruang daerah	
		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)	141,115			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Jumlah	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m)	783,941	56,602.24	Dinas PU dan Penataan Ruang daerah	
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m)	1,385			
		Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting	1,957	68.2595047	Dinas PU dan Penataan Ruang daerah	
		Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota	2,867			
		Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota	28,679	70.4643735	Dinas PU dan Penataan Ruang daerah	
		Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut.	40,700			
		Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	29,093	78.2848532	Dinas PU dan Penataan Ruang daerah	
		Jumlah rumah di Kabupaten A	37,163			
		Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya	582	100	Dinas PU dan Penataan Ruang	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Jumlah	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku	582	45.0572902	daerah	
		Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap	323,241			
		Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota	717.4			
		Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	66	100	Dinas PU dan Penataan Ruang daerah	
		Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	66			
		Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi	127	100	Dinas PU dan Penataan Ruang daerah	
	Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	127				
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN					
		Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n	30	100	Dinas Perumahan dan Pertahan Daerah	
		Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	30			
		Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	444	100	Dinas Perumahan dan Pertahan Daerah	
		Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	444			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Jumlah	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	1.7	2.5088548	Dinas Perumahan dan Pertahan Daerah	
		Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	67.76			
		Jumlah unit rumah tidak layak huni	6,300	17.2164075	Dinas Perumahan dan Pertahan Daerah	
		Jumlah total unit rumah kabupaten/kota	36,593			
		Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	510	1.3937092	Dinas Perumahan dan Pertahan Daerah	
	Jumlah unit rumah kab/kota	36,593				
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
		Jumlah pengaduan yang ditangani	14	100	Satpol PP	
		Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	14			
		Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	13	92.8571429	Satpol PP	
		Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	14			
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan		Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0	Satpol PP	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana		Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Jumlah	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	48	100		
		Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	48			
		Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat	11	78.5714286		
		Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota	14			
		Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	13	13		
6	SOSIAL					
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	3,275	39.2027771		
		Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	8,354			
		Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	334	100		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Jumlah	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	334			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR						
7	TENAGA KERJA					
		Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	4	26.6666667		
		Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota	15			
		Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	4,366	5.8527038		
		Jumlah tenaga kerja keseluruhan	74,598			
		PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	70,515.62	94.527494		
		Jumlah tenaga kerja	74,598			
		Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	64	100		
		Jumlah Perusahaan	64			
		Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan	16,356	59.9933976		
		Jumlah pencaker yang terdaftar	27,263			
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
		Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD	27,875,433,481	6.8872818		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Jumlah	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah seluruh belanja operasi dan modal APBD	404,737,807,425			
		Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi	26	100		
		Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	26			
		Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	17	20.0270955		
		Jumlah penduduk perempuan	84,885			
9	PANGAN					
		Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	30	50.8474576		
		Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan	59			
10	PERTANAHAN					
		Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	19,185,474.54	100		
		seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	19,185,474.54			
		Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	19,327	83.7899939		
		Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	23,066			
		Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	1,918.55	100		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Jumlah	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan	1,918.55	57.6		
		Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha;	144			
		Jumlah penerima tanah obyek landreform	250			
		Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah	0	0		
		Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan	-1			
		Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	1	100		
	Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	1				
11	LINGKUNGAN HIDUP					
				80.01		
		Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani	4,565	14.1924452		
		Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalan kabupaten/kota	32,165			
		Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota	2	33.3333333		
		usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	6			
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Jumlah	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	129,707	100		
		Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	129,707			
		Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	33,415	61.5581592		
		Jumlah anak usia 0-17 tahun	54,282			
		Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	53,863	97.1659992		
		Jumlah anak usia 0-18 tahun	55,434			
		Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	7	70		
		Jumlah PD	10			
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAY DAN DESA					
		Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	19	44.1860465		
		Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)	43			
		Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	19	23.75		
		Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)	80			
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARAG BERENACANA					

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Jumlah	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$		2.04		
		$ASFR_i = \frac{bi}{f} \times k$				
		Jumlah peserta KB Aktif Modern	20,828	72.1790962		
		Jumlah Pasangan Usia Subur	28,856			
		Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	2,543	8.8127253		
		Jumlah Pasangan Usia Subur	28,856			
15	PERHUBUNGAN					
		Rasio konektivitas Provinsi = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)		0.51		
		IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut)				
		IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)=jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut)				
		Keterangan:				
		1. IK1 (Angkutan Jalan)				

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Jumlah	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKDP				
		Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKDP dalam kurun waktu tertentu				
		2. IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)				
		Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil				
		Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu				
		3. Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan :				
		Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)				
		Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)				

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Jumlah	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)				
		Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)				
		Bobot Trayek atau lintas :				
		1. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1				
		2. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8				
		3. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah(<3>), bobot= 0.5				
		V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota		0		
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
		Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	29	76.3157895		
		Jumlah PD	38			
		Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	36	97.2972973		
		Jumlah Layanan Publik	37			
		Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	125,755	68.3610844		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Jumlah	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah Penduduk	183,957			
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					
		Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset	14	21.5384615		
		Jumlah seluruh koperasi aktif	65			
		Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	200	4.0477636		
		Jumlah usaha mikro keseluruhan	4,941			
18	PENANAMAN MODAL					
		(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota	-4,816,430,000,000	-4.9858218		
		Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota	96,602,530,000,000			
19	KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA					
		Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kab/kota	375	2.2125199		
		Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	16,949			
		Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	10,542	62.1983598		
		jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	16,949			
		Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional		15		
20	STATISTIK					

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Jumlah	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	38	100		
		Jumlah PD	38			
		Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	38	100		
	Jumlah PD	38				
21	PERSANDIAN					
		Jumlah nilai per area keamanan informasi	0	0		
		Jumlah Area Penilaian	645			
22	KEBUDAYAAN					
		Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	83	90.2173913		
		Jumlah cagar budaya yang terdata	92			
23	PERPUSTAKAAN					
				61.28		
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)		27.81		
		UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan				

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Jumlah	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket	
		UPLM 2 = Ketercukupan koleksi					
		UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan					
		UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan					
		UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP					
		UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan					
		UPLM 7 = Anggota perpustakaan					
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat = $\frac{\sum UPLM}{ALM} \times 100$					
24	KEARSIPAN						
		$T = \frac{(a+i+s+j)}{4}$		27.51			
		T =				Tingkat ketersediaan arsip	
		a =				Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	
		i =				Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	
		s =	<i>Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik</i>				

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Jumlah	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		j =	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN		1		
		$T = \frac{(m+b+g+a+c+i)}{6}$					
		T=	tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban				
		m =	tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK				
		b =	tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK				
		g =	tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota dengan NSPK				

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Jumlah	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		a =	tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK				
		c =	tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK				
		i =	tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK				
URUSAN PILIHAN							
1	Kelautan & Perikanan						
	Jumlah Total Produksi Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota		72,075.8	118.2559189		
	(Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan		60,949			
2	Pariwisata						
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1)		347	439.2405063		
		Jumlah wisatawan tahun n-1		79			
	Persentase peningkatan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1)		350	460.5263158		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Jumlah	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Jumlah wisatawan tahun n-1	76			
	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual	4,699	28.608828		
		Jumlah kamar yang tersedia	16,425			
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB	0.1	0.1		
		Total PDRB Berlaku	100			
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Total realiasi PAD dari sektor pariwisata	60,000,000	0.0104605		
		Total realisasi PAD	573,586,338,709			
3	Pertanian					
	Produktivitas pertanian per hektar per tahunProduktivitas pertanian per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun	32,073.32	536.7874746		
		Luas Panen	5,975.05			
		Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	475	48.3706721		
		Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	982			
4	Kehutanan					
5	Energi dan Sumber Daya Mineral					

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Jumlah	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
				0		
		Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin	0	0		
		Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	1			
6	PERDAGANGAN					
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	23	100		
		Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota	23			
	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi	1,398,506	8.3333328		
		RDKK	16,782,073			
	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan	28	0.173525		
		jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota	16,136			
7	PERINDUSTRIAN					
	Pertambahan jumlah industri kecil dan	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n– Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1)	60	5.6285178		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Jumlah	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	menengah di kab/kota	Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1	1,066			
		Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan yang disepakati dengan capaian pada akhir tahun tersebut dan setiap sasaran memiliki bobot 20%. dokumen perencanaan pembangunan industri daerah yang terdiri dari:				
		1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan persentase) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian sasaran Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 30 %, dengan rumus: $\text{Capaian} \times \text{Bobot} = \text{hasil capaian sasaran}$				
		Contoh perhitungan:				
		Jika capaian 100% maka perhitungan $(100\% \times 30\%) = 30\%$;				
		Jika Capaian 90% maka perhitungan $(90\% \times 30\%) = 27\%$;				
		jika Capaian 80% maka perhitungan $(80\% \times 30\%) = 24\%$;				
		dst				

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Jumlah	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi (satuan persentase) diperoleh dengan mengalikan persentasi capaian sasaran Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi dengan bobot maksimal 30 %, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran				
		Contoh perhitungan:				
		Jika capaian 100% maka perhitungan (100% X 30%) = 30%;				
		Jika Capaian 90% maka perhitungan (90% x 30%) = 27% ;				
		jika Capaian 80% maka perhitungan (80% x 30%) = 24% ;				
		dst				
		3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan orang) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 15 %, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran				
		Contoh perhitungan:				
		Jika capaian 100% maka perhitungan (100% X 15%) = 15%;				
		Jika Capaian 90% maka perhitungan (90% x 15%) = 13,5%;				

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Jumlah	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		jika Capaian 80% maka perhitungan $(80\% \times 15\%) = 12\%$;				
		dst				
		4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan US\$) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 5%, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran				
		Contoh perhitungan:				
		Jika capaian 100% maka perhitungan $(100\% \times 5\%) = 5\%$;				
		Jika Capaian 90% maka perhitungan $(90\% \times 5\%) = 4,5\%$;				
		jika Capaian 80% maka perhitungan $(80\% \times 5\%) = 4\%$;				
		dst				
		5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terdiri dari Penanaman Modal Asing (satuan US\$) dan Penanaman Modal Dana Negeri (satuan Rp.) Provinsi diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 20 %, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran				
		Contoh perhitungan:				

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Jumlah	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jika capaian 100% maka perhitungan (100% X 20%) = 20%;				
		Jika Capaian 90% maka perhitungan (90% x 20%) = 18% ;				
		jika Capaian 80% maka perhitungan (80% x 20%) = 16% ;				
		dst				
		Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	113	35.2024922		
		Jumlah izin yang dikeluarkan	321			
		Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	0	0		
		Jumlah izin yang dikeluarkan	1			
		Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	2	100		
		Jumlah izin yang dikeluarkan	2			
		1) Informasi industri:				
		Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)				
		Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)				
		Tidak menyampaikan informasi industri (0%)				
		2) Kelengkapan informasi industri:				
		Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)				
		Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)				

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Jumlah	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Informasi bahan bakar/ energy (10%)				
		Informasi tenaga kerja (10%)				
		Informasi Investasi (10%)				
		Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)				
8	TRANSMIGRASI					
				100		
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
1	PERENCANAAN DAN KEUANGAN					
		Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	262,701,260,543	13.6953399		
		Jumlah APBD	1,918,179,931,068			
		Jumlah PAD	596,733,080,591.29	30.8698725		
		Jumlah Pendapatan pada APBD	1,933,059,749,383.3			
		Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP		3		
		Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP		3		
		Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures	1,026,116,982,926	53.4943029		
		jumlah belanja APBD	1,918,179,931,068			
		Opini Laporan Keuangan		90		
2	PENGADAAN					

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Jumlah	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n	15	100		
		jumlah kontrak keseluruhan tahun n	15			
		jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	1,064	56.5957447		
		Jumlah seluruh pengadaan	1,880			
		Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan	378,677,301,158	93.4957772		
		total belanja operasi dan modal	405,020,753,158			
		Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)	1,556,112,028,054	92		
		Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)	1,691,426,117,450			
3	KEPEGAWAIAN					
		Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas	999	63.6305732		
		Jumlah seluruh pegawai	1,570			
		Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	304	19.3630573		
		Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1,570			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Jumlah	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	27	8.8815789		
		seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	304			
4 MANAJEMEN KEUANGAN						
		Realisasi Belanja	1,918,179,931,068	1.2757		
		Total Belanja APBD	1,942,965,827,088			
		Total PAD dalam realisasi	596,733,080,591.29	49.0267		
		Total PAD dalam APBD	400,420,232,119			
		1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)				
		2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)				
		3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)				
		4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)				
		Nilai realisasi SiLPA	367,728,485,917.67	24.9256689		
		Total belanja anggaran tahun sebelumnya	1,475,300,370,937			
5 TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK						
		Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	2,021,816,876,638.1	94.0022545		
		Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	2,150,817,432,038			
		Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda	10	83.3333333		
Total jumlah dokumen yang telah dirinci	12					

2.1.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR					
1	URUSAN PENDIDIKAN				
		Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	63	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	256	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	6246	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	254	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Jumlah pendidik pada PAUD	609	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	98	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pem	84	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	162	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1237	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	687	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	19672	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	8151	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	575	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	387	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1451	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	603	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	63	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	59	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	64	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	452	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	183	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	107	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	64	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	773	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	773	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	79	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
		Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	
2	KESEHATAN				
		Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	351500	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	670	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	10734	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	670	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	14423	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	670	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	94932	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	1444	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	6000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan	1507	Dinas Kesehatan,	
		anak usia pendidikan dasar sesuai standar		Pengendalian Penduduk dan KB	
		umlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	358420	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	749	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2161	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	749	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	665064	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	722	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	390256	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	749	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	154	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	26	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4295	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	333	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	6170	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	748	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	141.115	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	182	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	1.385	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	92.361	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/ oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	58.333	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	20.14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	97,164	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	94.823	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada/Tidak)	ADA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	TIDAK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	ADA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	1036	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	172	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	1208	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestic	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
				Penataan Ruang Daerah	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	1312	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	ADA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	ADA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	1050	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	55	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	717,4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Panjang jalan yang dibangun	12.83	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Panjang jembatan yang dibangun	185.5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	80.061	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Panjang jembatan yang direhabilitasi	8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Panjang jalan yang dipelihara	1.5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Panjang jembatan yang dipelihara	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	66	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	74	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa	0	Dinas Pekerjaan Umum dan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya		Penataan Ruang Daerah	
		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	52	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang memb	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	66	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	66	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha,	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	7405	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	7405	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	7405	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		umlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
		Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	444	Dinas Perumahan ,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	
		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	30	Dinas Perumahan ,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	30	Dinas Perumahan ,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	
				Pertanahan Daerah	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	12	Dinas Perumahan ,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	12	Dinas Perumahan ,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	18	Dinas Perumahan ,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	
		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	Dinas Perumahan ,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	30	Dinas Perumahan ,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	
		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	13	Dinas Perumahan ,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	2	Dinas Perumahan ,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan ,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	
		umlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan ,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	444	Dinas Perumahan ,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	6300	Dinas Perumahan ,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	
		Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	Dinas Perumahan ,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	67.76	Dinas Perumahan ,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	
		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	175	Dinas Perumahan ,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	
		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	1.7	Dinas Perumahan ,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	
		Jumlah rumah di kab/kota	36593	Dinas Perumahan ,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	
		Jumlah unit PK RTLH	175	Dinas Perumahan ,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	
		Jumlah rumah tidak layak huni	6300	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	
		Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	
		Rasio rumah dan KK	57	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	
		umlah rumah pembangunan baru	444	Dinas Perumahan ,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	35363	Dinas Perumahan ,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	
		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	0	Dinas Perumahan ,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	30.532	Dinas Perumahan ,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	0	Dinas Perumahan ,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	9	Dinas Perumahan ,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	21769	Dinas Perumahan ,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	
		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	9	Dinas Perumahan ,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	
		Jumlah pengembang yang terregistrasi	9	Dinas Perumahan ,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	
		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	9	Dinas Perumahan ,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	6	Satua Polisi Pamong Praja	
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	135	Satua Polisi Pamong Praja	
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	14	Satua Polisi Pamong Praja	
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	22	Satua Polisi Pamong Praja	
		Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	7	Satua Polisi Pamong Praja	
		Tersedianya sarana prasarana minimal	65	Satua Polisi Pamong Praja	
		Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	1	Satua Polisi Pamong Praja	
		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana			
		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0		
		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	1		
		Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	30		
		Persentase warga negara yang ikut pelatihan			
		Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana			
		Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan			
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB			
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana			
		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana			
		Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi	7		
		pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota			
		Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	1		
		Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	80		
		Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	1		
		Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	36		
		Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	65		
		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	135		
		Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	80		
6	SOSIAL				
		Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki	1	Dinas Sosial Daerah	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	8354	Dinas Sosial Daerah	
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	47	Dinas Sosial Daerah	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	3275	Dinas Sosial Daerah	
		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	3	Dinas Sosial Daerah	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	2900	Dinas Sosial Daerah	
		Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	0	Dinas Sosial Daerah	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	324	Dinas Sosial Daerah	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	6	Dinas Sosial Daerah	
		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	0	Dinas Sosial Daerah	
		Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	0	Dinas Sosial Daerah	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0	Dinas Sosial Daerah	
		Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	Dinas Sosial Daerah	
		Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	103	Dinas Sosial Daerah	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	0	Dinas Sosial Daerah	
		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	45	Dinas Sosial Daerah	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	0	Dinas Sosial Daerah	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	0	Dinas Sosial Daerah	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	1	Dinas Sosial Daerah	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	1	Dinas Sosial Daerah	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	0		
		Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	334		
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	27		
		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	35		
		jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0		
		Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	103		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
7	TENAGA KERJA				
		Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	0	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	0	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	0	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	66.67	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	100	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	6.25	Dinas Tenaga Kerja Dan	
				Transmigrasi	
		Persentase LPK yang terakreditasi	100	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		Persentase LPK yang memiliki perizinan	100	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		Jumlah penganggur yang dilatih	64	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		Persentase penyerapan lulusan	90.6	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		Lulusan bersertifikat kompetensi	50	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	0	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	100	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		Data tingkat produktivitas total	0	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	100	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	12.5	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	18	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	100	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	100	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	35.93	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		Jumlah mogok kerja	3	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		Jumlah penutupan perusahaan	0	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		Jumlah perselisihan kepentingan	1	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah perselisihan PHK	23	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	2025	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	52	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	86.8	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	7249	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	27263	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	4	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	22	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	2	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	4	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	9511	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	14215	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	0	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	0	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	0	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
		Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	4	Dinas Peberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan PA	
		Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	2	Dinas Peberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan PA	
		Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	0	Dinas Peberdayaan	
		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1	Dinas Peberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan PA	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	26	Dinas Peberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan PA	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	1	Dinas Peberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan PA	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	1	Dinas Peberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan PA	
		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	10	Dinas Peberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan PA	
		Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	45	Dinas Peberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan PA	
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	5	Dinas Peberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan PA	
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	2	Dinas Peberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan PA	
		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	5	Dinas Peberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan PA	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	0	Dinas Peberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan PA	
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	17	Dinas Peberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan PA	
9	PANGAN				
		Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan daerah	
		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	30	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan daerah	
		Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan local	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan daerah	
		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan daerah	
		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan daerah	
		Tertanganinya kerawanan pangan	1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan daerah	
		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	30	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan daerah	
		Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan daerah	
10	PERTANAHAN				
		SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	17	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	1	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	1	Dinas Perumahan ,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	
		Dokumen Izin membuka tanah		Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	
		Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/ Kota	1	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	
11	LINGKUNGAN HIDUP				
		Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA)	67.33	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	
		Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	83.33	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	
		Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	92.26	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	
		Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	14.19	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	
		Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	6	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	
		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah	6	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	
		kabupaten/kota			
		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota	0	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	
		Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani. Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkung	9	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				
		Penerbitan akta perkawinan	50728	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
		Penerbitan akta perceraian	1144	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
		Penerbitan akta kematian	5177	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
		Penyajian data kependudukan	2	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
		Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	15	Dinas Peberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan PA	
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	10	Dinas Peberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan PA	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	6	Dinas Peberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan PA	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	34	Dinas Peberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan PA	
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
		Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	1	Dinas Kesehatan,Pengendalian Penduduk dan KB	
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	20.8	Dinas Kesehatan,Pengendalian Penduduk dan KB	
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	46.2	Dinas Kesehatan,Pengendalian Penduduk dan KB	
		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	75.87	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	72.18	Dinas Kesehatan,Pengendalian Penduduk dan KB	
		Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	133	Dinas Kesehatan,Pengendalian Penduduk dan KB	
				Penduduk dan KB	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	75.74	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	8.81	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	66.23	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
15	PERHUBUNGAN				
		Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	0	Dinas Perhubungan Daerah	
		Terlaksananya pelayanan uji berkala	18	Dinas Perhubungan Daerah	
		Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	0	Dinas Perhubungan Daerah	
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	48.71	Dinas Perhubungan Daerah	
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
		Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	76.31	Dinas Komunikasi dan Kominfo	
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	76.31	Dinas Komunikasi dan Kominfo	
		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	100	Dinas Komunikasi dan Kominfo	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	97.29	Dinas Komunikasi dan Kominfo	
		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	42.1	Dinas Komunikasi dan Kominfo	
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	97.36	Dinas Komunikasi dan Kominfo	
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100	Dinas Komunikasi dan Kominfo	
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	100	Dinas Komunikasi dan Kominfo	
		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100	Dinas Komunikasi dan Kominfo	
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	100	Dinas Komunikasi dan Kominfo	
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100	Dinas Komunikasi dan Kominfo	
		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100	Dinas Komunikasi dan Kominfo	
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100	Dinas Komunikasi dan Kominfo	
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	52.89	Dinas Komunikasi dan Kominfo	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	100	Dinas Komunikasi dan Kominfo	
		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	28.57	Dinas Komunikasi dan Kominfo	
		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	100	Dinas Komunikasi dan Kominfo	
		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	100	Dinas Komunikasi dan Kominfo	
		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100	Dinas Komunikasi dan Kominfo	
		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100	Dinas Komunikasi dan Kominfo	
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
		Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	8,57	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah	
		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantuan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	18.18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah	
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	63.8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	21.95	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah	
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	21.95	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah	
		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti	184.62	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah	
		pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah	
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	32.3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah	
		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	26.15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	3.08	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah	
		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi Pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	3.08	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	3.08	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	4.61	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	4.05	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	50.82	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah	
		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0.53	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0.28	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0.84	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah	
		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	3.44	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah	
18	PENANAMAN MODAL				
		PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah	
		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	1	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah	
		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah	
		Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah	
		Kegiatan pameran penanaman modal	3	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah	
		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah	
		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	6	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	4138	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah	
		Laporan realisasi penanaman modal	91786100000000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah	
		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	46	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah	
		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	79	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah	
		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota	7448	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah	
19	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
		Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	80	Dinas Pemuda olah raga dan Pariwisata	
		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	24	Dinas Pemuda olah raga dan Pariwisata	
		Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	88	Dinas Pemuda olah raga dan Pariwisata	
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0	Dinas Pemuda olah raga dan Pariwisata	
		Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	26	Dinas Pemuda olah raga dan Pariwisata	
		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	2	Dinas Pemuda olah raga dan Pariwisata	
20	STATISTIK				
		Tersedianya buku profil daerah	1	Badan Pusat Statistik Kab. Morowali	
		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	0	Badan Pusat Statistik Kab. Morowali	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	273	Badan Pusat Statistik Kab. Morowali	BPS belum Pernah Melaksanakan kompilasi statistik sektoral
		Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0	Badan Pusat Statistik Kab. Morowali	Belum ada OPD yang meminta rekomendasi BPS
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	3	Badan Pusat Statistik Kab. Morowali	Belum Pernah dilaksanakan
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	29.92	Badan Pusat Statistik Kab. Morowali	
		Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan Statistik	35.96	Badan Pusat Statistik Kab. Morowali	
21	PERSANDIAN				
		Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	
		Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	
		Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	
22	KEBUDAYAAN				
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	106	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	103	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, m dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah	
		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah	
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	39	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah	
		Perlindungan cagar budaya Kabupaten (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah	
		Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah	
		Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	59	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah	
		Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	59	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah	
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah	
		Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah	
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah	
		Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi	7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah	
		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budya	8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah	
		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah	
		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman kabupaten/kota	14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah	
		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah	
		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah	
23	PERPUSTAKAAN				
		Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	21.6	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	3.38	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0.06	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	2.78	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		Jumlah pemasyarakatangemar membaca di masyarakat	6.212	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	12	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
24	KEARSIPAN				
		persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	17.02	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	11.89	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	81.13	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kabupaten yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
URUSAN PILIHAN					
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	8710	Dinas Kelautan Dan Perikanan Daerah	
		Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	50	Dinas Kelautan Dan Perikanan Daerah	
		Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	0	Dinas Kelautan Dan Perikanan Daerah	
		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)	355	Dinas Kelautan Dan Perikanan Daerah	
		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	0		
2	PARIWISATA				
		Jumlah entitas pengelolaan destinasi	35	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	56	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	514	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	426	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	4	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
		Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	0	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	8	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	100	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	100	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	10	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
3	PERTANIAN				
		Jumlah Sarana dan Prasarana pertanian yang diberikan	604	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		Prasarana pertanian yang digunakan	129	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		Penerbitan izin usaha pertanian	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		Persentase prasarana yang digunakan	100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	48	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
4	KEHUTANAN				

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura			Diluar kewenangan
		Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Penyangga			Diluar kewenangan
		Pemulihan Ekosistem pada Tahura			Diluar kewenangan
		Menurunya gangguan kawasan TAHURA			Diluar kewenangan
5	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
		Penerbitan Izin Pemanfaatan langsung Panas Bumi dalam Daerah Kab/Kota			Diluar kewenangan
6	PERDAGANGAN				
		Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko swalayan	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase penerbitan TDG	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	98	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	16782073	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	0.174	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	1.724	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
7	PERINDUSTRIAN				
		Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	5.417	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
8	TRANSMIGRASI				
		Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Jumlah satuan pemukiman yang dibina	50	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

2.1.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Jumlah	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR						
1	Perencanaan dan Keuangan					
		Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	262,701.260.543	13,6953399		
		Jumlah APBD	1.918.179.931.068			
		Jumlah PAD	596.733.080.591,29	30,8698725		
		Jumlah Pendapatan pada APBD	1.933.059.749.383,3			
		Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP		3		
		Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP		3		
		Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures	1.026.116.982.926			
		jumlah belanja APBD	1.918.179.931.068	90		
		Opini Laporan Keuangan				
3	Pengadaan					

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Jumlah	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n	15	100		
		jumlah kontrak keseluruhan tahun n	15			
		jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	1.064	56,5957447		
		Jumlah seluruh pengadaan	1.880			
		Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan	378.677.301.158	93,4957772		
		total belanja operasi dan modal	405.020.753.158			
		Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)	1.556.112.028.054	92		
		Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)	1.691.426.117.450			
4	Kepegawaian					
		Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas	999	63,6305732		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Jumlah	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah seluruh pegawai	1.570			
		Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	304	19,3630573		
		seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1.570			
		umlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	27	8,8815789		
		umlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	304			
4	Manajemen Keuangan					
		Realisasi Belanja	1.918.179.931.068	1,2757		
		Total Belanja APBD	1.942.965.827.088			
		Total PAD dalam realisasi	596.733.080.591,29	490,267		
		Total PAD dalam APBD	400.420.232.119			
		Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	1.7	2.5088548		
		Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	67.76			
		1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)				

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Jumlah	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)				
		3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)				
		4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)				
		Nilai realisasi SiLPA	367.728.485.917,67	24,9256689		
		total belanja anggaran tahun sebelumnya	1.475.300.370.937			
6	Transparansi dan Partisipasi Publik					
		Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	2.021.816.876.638,1	94,0022545		
		Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	2.150.817.432.038			
		umlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda	10	83,3333333		
		total jumlah dokumen yang telah dirinci	12			

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

2.3.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Komitmen Pelaksanaan Pembangunan yang berorientasi pada hasil dan berpijak pada Birokrasi berdampak maka kinerja pelaksanaan pembangunan harus memiliki kualitas output yang dinilai sejak dari perencanaan yang dapat diukur secara logis dan mampu diketahui *logical framework* nya. Berikut Perjanjian Kinerja Tahun 2023 :

Tabel 2.9 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

TUJUAN STRATEGIS 1				
Menciptakan Pemerintah yang Baik dan Bersih				
NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023	
1.1	Indeks Refromasi Birokrasi Kab. Morowali	Kategori	B	
	Sasaran Strategis 1.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah			
	1.1.1.1	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP)	Nilai	BB
	Sasaran Stretegis 1.1.2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik			
	1.1.2.1	Indeks kepuasan masyarakat	Kategori	B
	Sasaran Stretegis 1.1.3 Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah			
	1.1.3.1	Opini hasil pemeriksaan oleh BPK	Opini	WTP
	Sasaran Stretegis 1.1.4 Meningkatkan Kualitas Pembangunan dan Pemberdayaan Desa			
	1.1.4.1	Indeks Desa Membangun (IDM) Kab. Morowali	Indeks	0,7647
1.1.4.2	Persentase Status Desa Maju	%	12-13	

TUJUAN STRATEGIS 2 Meningkatkan Skala Ekonomi Daerah untuk Kesejahteraan Bersama			
NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023
2.1	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	5-6
	Sasaran Strategis 2.1.1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi		
	2.1.1.1	Pertumbuhan Ekonomi	% 10-15
	Sasaran Stretegis 2.1.2 Tumbuhnya Investasi Daerah		
	2.1.2.1	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	% 4-6
	Sasaran Stretegis 2.1.3 Meningkatnya PDRB perkapita akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah		
	2.1.3.1	PDRB Perkapita	Konstan Rp. (juta) 300-400
	Sasaran Stretegis 2.1.4 Rendahnya Ketimpangan Pendapatan antar Masyarakat		
	2.1.4.1	Gini Rasio	Indeks 0,30-0,24
	Sasaran Stretegis 2.1.5 Menurunnya Jumlah Pengangguran		
	2.1.5.1	Tingkat Pengagguran Terbuka (TPT)	% 2-3
	Sasaran Stretegis 2.1.6 Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan		
	2.1.6.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	% 100-102
	2.1.6.2	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	% 106
	Sasaran Stretegis 2.1.7 Meningkatkan Ketersediaan Pangan		
	2.1.7.1	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Poin 86,00-88,00
	Sasaran Stretegis 2.1.8 Menurunnya Penduduk Miskin		
	2.1.8.1	Persentase Penduduk Miskin	% 12,40-9,8
	Sasaran Stretegis 2.1.9 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat		
	2.1.9.1	Persentase PMKS Kebutuhan Dasarnya	% 75-80

TUJUAN STRATEGIS 3 Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)			
NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023
3.1	Indeks Pembangunan Pembangunan Manusia	Indeks	75,00-76,00
	Sasaran Strategis 3.1.1 Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan dalam Meciptakan Generasi Muda yang Imtaq		
	3.1.1.1	Indeks Pendidikan	Indeks 50,00-55,00
	3.1.1.2	Harapan Lama Sekolah	Tahun 14,30-14,50
	3.1.1.3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun 10-10,30
	Sasaran Stretegis 3.1.2 Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan		
	3.1.2.1	Indeks Kesehatan	Indeks 69,50-70
	3.1.2.2	Usia Harapan Hidup	Tahun 69,50-70
	3.1.2.3	Angka Stunting	Persen 6,60-6,10
	Sasaran Stretegis 3.1.3 Meningkatkan Partisipasi Oraganisasi Kepemudaan dan Prestasi Olahraga Daerah		
	3.1.3.1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepemudaan	Persen 100
	3.1.3.2	Peningkatan Partisipasi olahraga	Jumlah Medali Juara 37
	Sasaran Stretegis 3.1.4 Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Daerah		
	3.1.4.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks 85-90
	Sasaran Stretegis 3.1.5 Meningkatkan Pelestarian Seni dan Budaya Lokal		
	3.1.5.1	Persentase Budaya Lokal yang dilestarikan	% 75-80
	3.1.5.2	Persentase Kesenian Lokal yang dilestarikan	% 75-80
	Sasaran Stretegis 3.1.6 Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Umat Beragama Kabupaten Morowali		
	3.1.6.1	Indeks Kerukunan Beragama	Indeks 70-80

TUJUAN STRATEGIS 4			
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar			
NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023
4.1	Indeks Infrastruktur Kabupaten	Kategori (Nasional)	1,51-3,75 (Tinggi)
	Sasaran Strategis 4.1.1 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar daerah		
	4.1.1.1	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	% 30,00-35,00
	4.1.1.2	Rasio Elektrifikasi	% 99,00-99,20
	4.1.1.3	Persentase Rumah Layak Huni	% 80-85
	4.1.1.4	Persentase RT berakses air bersih	% 90-92
	Sasaran Strategi 4.1.2 Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi		
	4.1.2.1	Persentase desa/kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi	% 90-95
	4.1.2.2	Persentase koneksi internet Desa	% 80-90

TUJUAN STRATEGIS 5			
Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH) dan Berkurangnya Resiko Bencana			
NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	55-60
	Sasaran Strategis 5.1.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		
	5.1.1.1	Indeks rawan Bencana	Indeks 90-95
	5.1.1.2	Persentase Desa Tangguh Bencana	% 19,84-23,80
	Sasaran Strategis 5.1.2 Meningkatnya Layanan Kebersihan dan Penataan Lingkungan Kota Bungku		
	5.1.2.1	Cakupan pelayanan persampahan kota	% 100
	Sasaran Strategis 5.1.3 Meningkatnya Respon dan Layanan kebakaran kabupaten		

TUJUAN STRATEGIS 5				
Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH) dan Berkurangnya Resiko Bencana				
NO	INDIKATOR		SATUAN	TARGET 2023
	5.1.3.1	Cakupan layanan kebakaran skala kabupaten	%	100,00
	Sasaran Stretegis 5.1.4			
	Menurunnya Gangguan ketentraman dan Ketertiban			
	5.1.4.1	Angka kriminalitas	%	8-5

2.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun Sebelumnya dan Target serta analisis faktor pendukung keberhasilan/kegagalan

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Morowali.

Capaian indikator kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Adapun Pengukuran Kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi pencapaian kinerja yang semakin baik, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja, maka menggunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Berdasarkan indikator tujuan dan indikator sasaran serta menggambarkan pula

tingkat capaian pada program / kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian tujuan dan sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Morowali. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 2.10

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2.	Lebih dari 75% s.d 100%	Baik(B)
3.	55% s.d 75%	Cukup (C)
4.	Kurang dari 55%	Kurang (K)

Secara umum Pemerintah Kabupaten Morowali telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) Kabupaten Morowali tahun 2018-2023.

3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Tujuan Strategis I “ Menciptakan Pemerintah yang Baik dan Bersih

Misi I Menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih melalui Kapabilitas, Profesionalitas dan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Daerah Berdasarkan Nila-nilai Kebenaran Keadilan”. Dengan Tujuan Strategis I adalah Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Reformasi Birokrasi, capaian kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.11
Capaian Indikator Tujuan Strategis 1

TUJUAN STRATEGIS (T.S) I								
Menciptakan Pemerintah yang Baik dan Bersih								
NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI		CAPAIAN (%) 2023	Keterangan	Sumber Data
				2022	2023			
1.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Morowali	Kategori	B(60-70)	CC (52,45)	CC(55,56)	79,50	Belum mencapai target	LHE Reformasi Birokrasi Kementrian PAN RB
	Sasaran Strategis (S.S) 1.1.1							
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah							
	1.1.1.1	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP)	Nilai	(75)BB	CC(51,73)	CC(52,99)	74,63	Belum mencapai target
	Sasaran Stretegis (S.S) 1.1.2							
	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik							
	1.1.2.1	Indeks kepuasan masyarakat	Kategori	B	B	n/a	n/a	Belum rilis
	Sasaran Stretegis (S.S) 1.1.3							
	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah							
	1.1.3.1	Opini hasil pemeriksaan oleh BPK	Opini	WTP	WTP		Belum rilis	
	Sasaran Stretegis (S.S)1.1.4							
	Meningkatkan Kualitas Pembangunan dan Pemberdayaan Desa							

TUJUAN STRATEGIS (T.S) I									
Menciptakan Pemerintah yang Baik dan Bersih									
NO	INDIKATOR		SATUAN	TARGET 2023	REALISASI		CAPAIAN (%) 2023	Keterangan	Sumber Data
					2022	2023			
1.1.4.1	Indeks Desa Membangun (IDM) Kab. Morowali	Indeks		0,7647	Status Desa Mandiri = 3 Desa	22 Desa Status Desa Mandiri IDM = 0,8165 s/d 0,8719	114,02	Melebihi target	Dinas Pemerintahan Desa
					Status Desa Maju = 36 Desa	Status Desa Maju = 31 Desa IDM 0,7127 s/d 0,8129			
1.1.4.2	Persentase Status Desa Maju	%		12-13	28,6	24,6	189,23	Melebihi target	

Pada tabel 3.1 diatas nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Morowali tahun 2023 adalah 55,56 dengan kategori CC.

Gambar 3.1
Nilai Indeks RB Pemerintah Kabupaten Morowali

No	Penilaian	Bobot	Nilai
A	RB General	100	50,21
B	RB Tematik	20	5,35
C	Indeks RB	120	55,56
			(CC)

Dari data diatas dapat terlihat nilai Indeks RB adalah 55,65 dengan ketgori CC. Namun nilai hasil evaluasi tahun 2023 tidak dapat di perbandingkan dengan tahun sebelumnya karena komponen penilaian tahun 2023 berbeda, karena Perubahan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB nomor 3 Tahun 2023 tentang Road Map Refromasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan. Nilai Indeks RB Tahun 2023 belum mencapai target dengan kategori B dengan nilai 65.

Analisis Faktor kegagalan : dari Indikator Indeks Reformasi Birokrasi belum dapat mencapai target yaitu pada penyusunan rencana kasi Rb tematik, sesuai dengan rekomendasi penilaian Indeks RB Pemerintah Kabupaten Morowali dari Kementrian PAN RB yaitu :

- a. Memastikan rencana aksi telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB tematik instansi Pemerintah;
- b. Menyempurnakan Rencana Aksi yang meunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain.

Pada Tujuan Strategis 1 Menciptakan Pemerintah yang Baik dan Bersih ada beberapa Sasaran Strategis :

Tabel 2.12

NO	SASARAN TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGE T	REALISASI		CAPAIA N 2023 (%)	Ket
					2022	2023		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP)	Nilai	(75)BB	CC(51,73)	CC(52,99)	74,63	Belum mencapa i target
2	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Indeks kepuasan	Kategori	B	B	n/a		Belum rilis
3	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini hasil pemeriksaan oleh BPK	Opini	WTP	WTP			Belum rilis
4	Meningkatkan Kualitas Pembangunan dan Pemberdayaan Desa	Indeks Desa Membangun (IDM) Kab. Morowali	Indeks	0,7647	Status Desa Mandiri = 3 Desa	22 Desa Status Desa Mandiri IDM =0,8165 s/d 0,8719	114,02	Melebihi Target
					Status Desa Maju = 36 Desa	Status Desa Maju =31 Desa IDM 0,7127 s/d 0,8129		
5		Persentase Status Desa Maju	%	12-13	28,6	24,6	189,23	

Sasaran Strategis “ Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah”

Pada Sasaran strategis 1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dengan Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 3.1.1
Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Morowali

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	16,13	16,48
b. Pengukuran Kinerja	30	12,90	13,26
c. Pelaporan Kinerja	15	9,30	9,53
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,40	13,72
Nilai Hasil Evaluasi	100	51,73	52,99
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC

Adapun analisis faktor penyebab kegagalan nilai indikator belum mencapai target yakni :

- Berdasarkan hasil Evaluasi bahwa dokumen perencanaan masih perlu ditingkatkan diselaraskan dengan isu strategis daerah;
- Masih kurangnya kinerja Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah harus mencakup pencapaian kinerja, dan relevansi formulasi perhitungan pada masing-masing indikator yang telah ditetapkan;
- Penetapan target pada setiap indikator belum spesifik dalam pencapaian kinerja periode sebelumnya;
- Masih perlunya dorongan dalam melakukan pengumpulan dan pengukuran kinerja secara berkala dengan menyusun pedoman atau SOP

✚ Sasaran Strategis “Meningkatkan kualitas Pembangunan dan Pemberdayaan Desa”

Dari tabel 3.2.1 Sasaran strategis meningkatnya kualitas pembangunan dan pemberdayaan desa dapat dilihat melebihi target. Analisa Faktor Penyebab Keberhasilan indikator Indeks Membangun Desa tersebut adalah : adanya peran desa dalam pembangunan Daerah yang terukur dalam indeks Desa Membangun (IDM). Dengan demikian persentase status desa maju mengalami peningkatan dengan capaian 189,23%.

No.	Sasaran Program Strategis	IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Peningkatan Peran Desa dalam Pembangunan Daerah yang terukur dalam Indeks Desa Membangun (IDM)	Status Desa				
		Mandiri	%	2	22	
		Maju	%	20	31	
		Berkembang	%	59	49	
		Tertinggal	%	45	24	
		Sangat Tertinggal	%	0	0	

Sumber data : LKjIP DPMDP3A 2023

3.1. 2 Capaian Indikator Kinerja Tujuan Strategis III “ Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Pengembangan UMKM, IKM daan Bumdes untuk mencapai kesejahteraan Bersama, dengan Tujuan Strategis II adalah Meningkatkan Skala Ekonomi Daerah untuk Kesejahteraan Bersama, capaian kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.13
Capaian Indikator Tujuan Strategis II

Meningkatkan Skala Ekonomi Daerah untuk Kesejahteraan Bersama									
NO	INDIKATOR		SATUAN	TARGET 2023	REALISASI		CAPAIAN (%)	Keterangan	Sumber Data
					2022	2023	2023		
2.1	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif		Indeks	5-6	n/a	n/a			BPS (sulteng)
	Sasaran Strategis (S.S) 2.1.1								
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi								
	2.1.1.1	Pertumbuhan Ekonomi	%	10-15	28,21	20,34	135,6	Mencapai Target	BPS (Morowali dalam Angka)
	Sasaran Stretegis (S.S) 2.1.2								
	Tumbuhnya Investasi Daerah								
	2.1.2.1	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	%	4-6	28	-26,58	-0,21	Belum mencapai target	Dinas Penanaman Modal -PTSP
	Sasaran Stretegis (S.S) 2.1.3								
	Meningkatnya PDRB perkapita akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah								
	2.1.3.1	PDRB Perkapita	Konstan Rp. (juta)	300-400	146.599,32	n/a		Belum mencapai target	BPS (Morowali dalam Angka)
	Sasaran Stretegis (S.S) 2.1.4								
	Rendahnya Ketimpangan Pendapatan antar Masyarakat								
	2.1.4.1	Gini Rasio	Indeks	0,30-0,24	0,285	0,281	106,33	Melebihi Target	Bapelitbangda
	Sasaran Stretegis (S.S) 2.1.5								

Meningkatkan Skala Ekonomi Daerah untuk Kesejahteraan Bersama									
NO	INDIKATOR		SATUAN	TARGET 2023	REALISASI		CAPAIAN (%)	Keterangan	Sumber Data
						2022	2023		
	Menurunnya Jumlah Pengangguran								
	2.1.5.1	Tingkat Pengagguran Terbuka (TPT)	%	2-3	3,2	2,84	142	Melebihi Target	BPS Sulteng
	Sasaran Stretegis (S.S) 2.1.6								
	Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan								
	2.1.6.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	100-102	101,75	101,75	101,75	Melebihi Target	Dinas Pertanian
	2.1.6.2	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	106	102	100	94,34	Belum mencapai target	Dinas Perikanan
	Sasaran Stretegis (S.S) 2.1.7								
	Meningkatkan Ketersediaan Pangan								
	2.1.7.1	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Poin	86,00-88,00	85,3	85,3	99,19	Belum mencapai target	Dinas Pertanian
	Sasaran Stretegis (S.S) 2.1.8								
	Menurunnya Penduduk Miskin								
	2.1.8.1	Persentase Penduduk Miskin	%	12,40-9,8	12,58	12,31	100,7	Mencapai target	BPS (sulteng)
	Sasaran Stretegis (S.S)2.1.9								
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat								
	2.1.9.1	Persentase PMKS Kebutuhan Dasarnya	%	75-80	79	89,3	111,63	Melebihi Target	Dinas Sosial

Tujuan Strategis I Meningkatkan Skala Ekonomi Daerah untuk Kesejahteraan Bersama dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Pencapaian misi ini Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali mengambil tujuan pembangunann daerah yaitu meningkatkan skala ekonomi daerah untuk kesejahteraan bersama dengan tolak ukur peningkatan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) yang hasil pengukurannya dikeluarkan oleh kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas. Adapun hasil pengukuran tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Sumber data : Dokumen Evaluasi RKPD 2023

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Berdasarkan grafik diatas dapat dijelskan bahwa Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Morowali dari tahun 2019 sampai dengan 2021 cenderung mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan melampaui target dalam P-RPJMD 2018-2023, sementara untuk tahun 2022 dan 2023 masih menunggu rilis dari Bappenas.

Pada Tujuan Strategis 2 Meningkatkan skala ekonomi daerah untuk kesejahteraan bersama, memiliki beberapa Sasaran Strategis beserta Indikator kinerja utamanya

Tabel 2.14
Data Capaian Sasaran Strategis

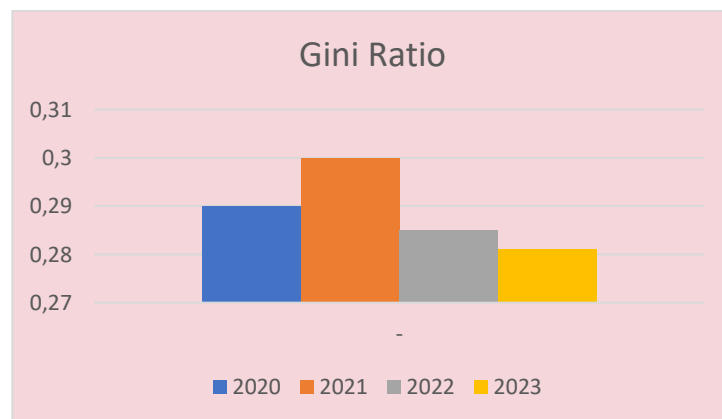
NO	SASARAN TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI		CAPAIAN 2023 (%)	Ket
					2022	2023		
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	%	10-15	28,21	0		Belum rilis
2	Tumbuhnya Investasi Daerah	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	%	4-6	28	-26,58	-0,21	Belum mencapai target
3	Meningkatnya PDRB perkapita	PDRB Perkapita	Konstan Rp. (juta)	300-400	380	n/a		Belum rilis
4	Rendahnya Ketimpangan Pendapatan antar Masyarakat	Gini Rasio	Indeks	0,30-0,24	0,285	0,281	106,33	Melebihi Target
5	Menurunnya Jumlah Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2-3	3,2	2,84	142	Melebihi Target
6	Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	100-102	101,75	101,75	101,75	Melebihi Target
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	106	102	100	94,34	Belum mencapai target
7	Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	%	86,00-88,00	85,3	85,3	99,19	Belum mencapai target

NO	SASARAN TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI		CAPAIAN 2023 (%)	Ket
					2022	2023		
8	Menurunnya Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	%	12,40-9,8	12,58	12,31	100,7	Mencapai target
9	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase PMKS Kebutuhan Dasarnya	%	75-80	79	89,3	111,63	Melebihi Target

Sasaran Strategis “Rendahnya ketimpangan Antar Masyarakat”

Gini ratio adalah menggambarkan pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi, rentan skor 0-1. Indeks 0 menunjukkan pemerataan total, sedangkan nilai 1 terjadi ketidakmerataan atau ketimpangan sama sekali.

Pada indikator kinerja Gini Ratio dengan capaian di tahun 2023 yakni 106,33% dari target yang telah ditentukan. Realisasi gini ratio di tahun 2023 juga dikatakan berhasil karena melebihi target pada P-RPJMD 0,30-0,24. Hasil indikator gini ratio dapat dilihat pada grafik di bawah :



Sumber data LKjIP 2022

Dari grafik di atas terlihat bahwa di akhir tahun PRPJMD 2018-2023 indikator nilai Gini Ratio sangat baik, dari tahun 2022 gini ratio berada 0,285 dan di tahun 2023 menjadi 0,281, terjadi penurunan 0,004 poin sehingga di akhir P-RPJMD indikator gini ratio mencapai dengan capaian kategori baik karena Semakin kecil atau mendekati nol (0) nilai Gini menunjukkan semakin meratanya distribusi pendapatan aktual dan pengeluaran konsumsi.

Sasaran Strategis “Menurunnya Jumlah Pengangguran”

Pada tabel 3.2.1 di atas indikator tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2023 dengan capaian 142% dan capaian ini melebihi target pada PRPJMD 2018-2023 yakni antara 2-3% dan realisasi 2,84%. Berikut grafik perbandingan tahun sebelumnya :



Sumber data LKjIP 2022

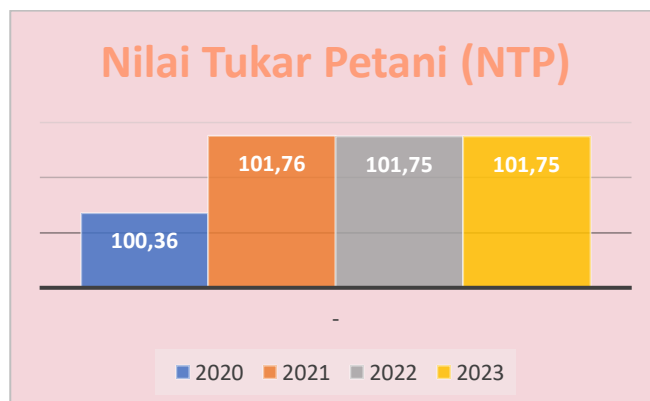
Dari grafik di atas tentunya dapat terlihat bahwa indikator tingkat pengangguran dari tahun 2020 sampai dengan di tahun terakhir tahun 2023 terjadi peningkatan, sehingga di akhir PRPJMD tahun 2023 indikator tingkat pengangguran adalah 2,84%.

Sasaran Strategis “Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan”



Nilai Tukar Petani

Indikator Nilai Tukar Petani di tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.3.1 di atas capain dari indikator tersebut adalah melebihi target dengan capain 101,75%. Berikut grafik/bagan nilai tukar petani dari tahun sebelumnya.



Sumber data LKjIP 2022

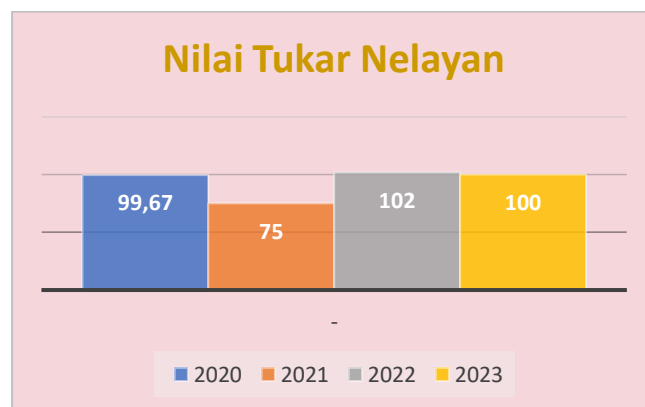
Dari grafik/bagan di atas dapat terlihat bahwa nilai tukar petani tertinggi di tahun 2021 yakni 101,76% dan di tahun 2022 dan 2023 Nilai tukar petani di angka 101,75%.

Analisis Faktor Kegagalan indikator Nilai tukar Petani hingga belum mencapai target pada PRPJMD 2018-2023 adalah :

- Belum pengelolaan lahan pertanian bidang
- pemanfaatan teknologi tepat guna yang belum optimal
- Petani masih tergantung pada pupuk subsidi
- Pola tanam petani belum maksimal

Nilai Tukar Nelayan

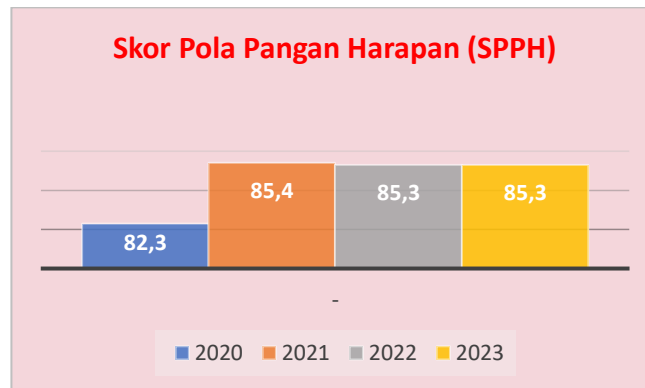
Indikator Nilai Tukar Nelayan pada tabel 2.3.1 adalah 100%. Di banding dengan target pada PRPJMD 2018-2023 adalah 106 maka Nilai tukar nelayan belum memenuhi target. Perbandingan tahun sebelumnya dan tahun sekarang pada indikator Nilai Tukar Nelayan dapat dilihat pada bagan di bawah :



Sumber data LKjIP 2022

Dari grafik/bagan di atas dapat terlihat Nilai Tukar Nelayan tertinggi adalah di tahun 2022 dan di tahun 2023 capaian NTN hanya berada di angka 100% dengan target pada PRPJMD 2018-2023 adalah 106%. Adapun Analisis kegagalan dari pencapaian Nilai Tukar Nelayan tahun 2023 adalah masih kurangnya sumber daya baik personil maupun keahlian dan faktor sarana dan prasarana serta penyesuaian aktifitas.

Sasaran Strategis “ Meningkatkan Ketersediaan Pangan”



Pada tabel 3.2.1 indikator Skor Pola Pangan Harapan dengan capaian di tahun 2023 adalah 99,19, Dengan realisasi 85,30. Pada grafik/bagan diatas kenaikan Skor Pola Pangan Harapan tidak mengalami kenaikan signifikan setiap tahunnya.

Pengukuran skor PPH ketersediaan merupakan instrumen yang menunjukkan ketersediaan pangan yang ideal di suatu wilayah termasuk Kabupaten Morowali. Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan merupakan pola tentang ketersediaan pangan di suatu wilayah berbasis pola ketersediaan ideal yang mengacu pada pola pangan harapan. Pangan yang tersedia secara beragam dalam jumlah seimbang akan mampu menyediakan kebutuhan zat gizi. Keanekaragaman pangan tersebut mencakup kelompok padi-padian, umbi- umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah dan biji berminyak, kacang- kacangan, gula, sayuran dan buah-buahan serta lain-lain.

Situasi ketersediaan energi di Kabupaten Morowali telah melebihi standar yang dianjurkan oleh Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2018 sebesar 2100 kkal/kap/hari. Kontribusi terbesar dari ketersediaan energi tersebut berasal dari pangan nabati yaitu sebesar 91,50 % sedangkan yang berasal dari pangan hewani hanya 8,50 %.

Sedangkan untuk ketersediaan protein telah melebihi standar yang dianjurkan oleh Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2018 sebesar 63 gram/kap/hari yaitu 109 gram/kap/hari.

Kontribusi terbesar dari ketersediaan protein tersebut berasal dari pangan nabati yaitu sebesar 73,39% sedangkan yang berasal dari pangan hewani sebesar 26,61%.

Adapun Analisis keberhasilan pada indikator kinerja Skor pola pangan Harapan antara lain :

- a. Tersedianya data harga pangan ditingkat produsen dan konsumen untuk panel harga yang diolah sebagai bahan untuk mengukur ketersediaan pangan di daerah.
- b. Tersusunnya laporan Neraca Bahan Makanan yang menggambarkan situasi dan kondisi ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk di suatu wilayah (Negara/Provinsi/Kabupaten) pada waktu tertentu.
- c. Telah dilaksanakannya intervensi penanganan kerawanan pangan berdasarkan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas).
- d. Terlaksananya sinkronisasi program/kegiatan lintas OPD melalui Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Morowali guna mendukung peningkatan ketahanan pangan di daerah.

Selain terdapatnya penyebab keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan/kendala dalam mencapai kinerja. Adapun penyebab kegagalan/kendala dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

- a. Belum optimalnya pengelolaan keberadaan lumbung pangan masyarakat di daerah.
- b. Belum berkembangnya kelembagaan pangan yang mendukung peningkatan ketersediaan cadangan pangan pemerintah daerah untuk mengantisipasi masalah kekurangan pangan di daerah rawan pangan.
- c. Masih terjadi gejolak harga bahan pangan terutama menjelang/menghadapi Hari-Hari Besar Keagamaan Nasional.

Sasaran Strategis “ Menurunnya Penduduk Miskin”



Sumber data : LKjIP 2022

Dari grafik di atas terlihat terjadi penurunan di akhir P-RPJMD 2018-2023, yakni berada di angka 12,31% namun jika dilihat pada target P-RPJMD antara 12,41-9,8 Menurunnya angka kemiskinan masih melampaui target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data BPS Indikator Persentase Penduduk Miskin dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.2

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2021	2022	2023
Sulawesi Tengah	13,00	12,33	12,41
Banggai Kepulauan	13,72	13,44	12,90
Banggai	7,83	7,33	6,94
Morowali	13,75	12,58	12,31
Poso	15,92	15,18	15,16
Donggala	16,73	16,30	16,25
Tolitoli	13,51	12,74	12,85
Buol	14,06	12,85	13,36
Parigi Moutong	15,28	14,63	14,91
Tojo Una-una	16,60	16,12	16,74
Sigi	13,05	12,30	12,83
Banggai Laut	14,17	13,17	14,15
Morowali Utara	13,90	12,97	12,85
Kota Palu	7,17	6,63	6,56

Sumber data BPS Sulteng

Sasaran Strategis “ Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”

Pada tabel 3.2.1 Indikator Kinerja Persentase PMKS Kebutuhan dasarnya di tahun 2023 dengan capaian 111,63% yakni melebihi target. Perbandingan dari tahun sebelumnya dapat di lihat pada grafik di bawah ini :



Sumber data :LKjIP 2022

Dari grafik diatas terlihat persentase PMKS tertinggi kebutuhan dasarnya ada di tahun 2021 dengan nilai 93%, dan di akhir tahun P-RPJMD persentase PMKS dia angka 89,3% dan dibandingkan dengan target pada P-RPJMD 2018-2023 yaitu 75-80% dapat di katakan berhasil melebihi target yang telah di tentukan.

Dari Analisis bahwa Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 melampaui target, hal ini disebabkan adanya komitmen Pemerintah dalam rangka penurunan angka kemiskinan dan dukungan anggaran bantuan PKH, Bantuan Sembako, Bantuan PBI, Bantuan Anak Yatim, Bantuan Gercep Gaskan Berdaya, bantuan alat bantu penyandang cacat merupakan program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementrian Sosial dan Propinsi melalui APBD I dan Bantuan Keuangan Program ini menyasar penduduk miskin yang pencatatannya masuk dalam DTKS dan data Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstreem (P3KE).

3.1.3 Capaian Indikator Kinerja Tujuan Strategis III “ Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

Misi III Mewujudkan pelayanan pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas melalui pembiayaan gratis, berlandaskan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa sehingga tercipta kerukunan hidup antar umat beragama, dengan Tujuan Strategis III adalah Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), capaian kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.15
Capaian Indikator Tujuan Strategis III

TUJUAN STRATEGIS (T.S) III Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)								
NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI		CAPAIAN (%) 2023	Keterangan	Sumber Data
				2022	2023			
3.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75,00-76,00	73,39	73,82	98,43	Belum mencapai target	Bappelitbangda
Sasaran Strategis (S.S) 3.1.1								
Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan dalam Meciptakan Generasi Muda yang Imtaq								
3.1.1.1	Indeks Pendidikan	Indeks	50,00-55,00	n/a	n/a	n/a		
3.1.1.2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,30-14,50	13,36	13,38	93,57	Belum mencapai target	Bappelitbangda
3.1.1.3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10-10,30	9,35	9,37	93,7	Belum mencapai target	Bappelitbangda
Sasaran Stretegis (S.S) 3.1.2								
Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan								
3.1.2.1	Indeks Kesehatan	Indeks	69,50-70	0,4	0,43	0,62	Belum mencapai target	Dinas Kesehatan
3.1.2.2	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,50-70	54	85,3	121,86	Melebihi target	Dinas Kesehatan
3.1.2.3	Angka Stunting	Persen	6,60-6,10	5,7	6,7	101,52	Melebihi	Dinas

TUJUAN STRATEGIS (T.S) III									
Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)									
NO	INDIKATOR		SATUAN	TARGET 2023	REALISASI		CAPAIAN (%)	Keterangan	Sumber Data
					2022	2023	2023		
								target	Kesehatan
Sasaran Stretegis (S.S) 3.1.3									
Meningkatnya Partisipasi Oraganisasi Kepemudaan dan Prestasi Olahraga Daerah									
3.1.3.1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepemudaan	Persen	100	20	25	25		Belum mencapai target	Dinas Pemuda Olahraga & Pariwisata
3.1.3.2	Peningkatan Partisipasi olahraga	Jumlah Medali Juara	37	9	10	27,03		Belum mencapai target	
Sasaran Stretegis 3.1.4									
Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Daerah									
3.1.4.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	85-90	85,14	n/a			Belum Rilis	BPS
Sasaran Stretegis (S.S) 3.1.5									
Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Lokal									
3.1.5.1	Persentase Budaya Lokal yang dilestarikan	%	75-80	n/a	n/a			Belum rilis	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.1.5.2	Persentase Kesenian Lokal yang dilestarikan	%	75-80	n/a	n/a			Belum Rilis	
Sasaran Stretegis (S.S) 3.1.6									

TUJUAN STRATEGIS (T.S) III Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)									
NO	INDIKATOR		SATUAN	TARGET 2023	REALISASI		CAPAIAN (%)	Keterangan	Sumber Data
					2022	2023	2023		
	Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Umat Beragama Kabupaten Morowali								
	3.1.6.1	Indeks Kerukunan Beragama	Indeks	70-80	n/a	n/a		Belum Rilis	

Dalam pencapaian misi ini Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali mengambil tujuan pembangunan daerah yaitu Meningkatkan Daya Saing Sumberdaya Manusia (SDM) dengan tolak ukur peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang hasil pengukurannya dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun hasil pengukuran tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3. 1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



Sumber data : Dokumen Evaluasi RKPD 2023

Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa pencapaian IPM dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan di akhir P-RPJMD 2018-2023 nilai Indeks Pembangunan Manusia sangat meningkat yakni 97,6%.

Sejak tahun 2010, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung dengan metode baru, komponen IPM metode baru adalah angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita.

Tercapainya indikator tujuan startegis ke III juga didukung oleh 12 (dua belas) Indikator sasaran strategis. Berikut tabel Sasaran strategis beserta Indikator kinerja utama :

Tabel 2.16

Capaian Sasaran Strategis pada Tujuan III

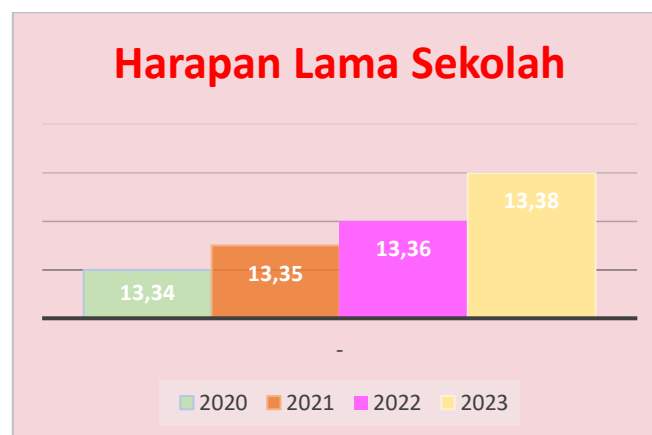
NO	SASARAN TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI		CAPAIAN 2023 (%)	Ket
					2022	2023		
1	Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan dalam Meciptakan Generasi Muda yang Imtaq	Indeks Pendidikan	Indeks	50,00-55,00	n/a	n/a	n/a	Tidak terukur
2		Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,30-14,50	13,36	13,38	92,28	Belum Mencapai Target
3		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10-10,30	9,35	9,37	90,97	Belum Mencapai Target
4	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Indeks Kesehatan	Indeks	69,50-70	0,8	0,43	0,62	Belum Mencapai Target
5		Usia Harapan Hidup	Tahun	69,50-70	54	85,3	121,86	Melebihi target
6		Angka Stunting	Persen	6,60-6,10	5,7	6,7	101,52	Melebihi target
7	Meningkatnya Partisipasi Oraganisasi Kepemudaan dan Prestasi Olahraga Daerah	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepemudaan	Persen	100	60	25	67,57	Belum Mencapai Target
8		Peningkatan Partisipasi olahraga	Jumlah Medali Juara	37	90	5	13,51	Belum Mencapai Target

NO	SASARAN TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI		CAPAIAN 2023 (%)	Ket
					2022	2023		
9	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Daerah	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	85-90	85,14	n/a		Belum rilis
10	Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Lokal	Persentase Budaya Lokal yang dilestarikan	%	75-80	n/a	n/a		Belum rilis
11		Persentase Kesenian Lokal yang dilestarikan	%	75-80	n/a	n/a		Belum rilis
12	Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Umat Beragama Kabupaten Morowali	Indeks Kerukunan Beragama	Indeks	70-80	n/a	n/a		Tidak terukur

Sasaran Strategis “ Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan dalam menciptakan Generasi Muda yang Imtaq
Harapan Lama Sekolah

Pada Indikator Harapan Lama Sekolah pada akhir PRPJMD terlihat mengalami peningkatan di banding tahun 2022 sehingga capaian di akhir PRPJMD adalah 92,28% dari target yang pada P-RPJMD yakni diantara 14,30-14,50. Berikut perbandingan nilai dari indikator kinerja utama Harapan Lama Sekolah dari sasaran strategis meningkatnya standar pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dalam menciptakan Generasi Muda yang Imtaq :

Grafik 3.1 Indikator
Kinerja Utama Harapan Lama Sekolah (HLS)



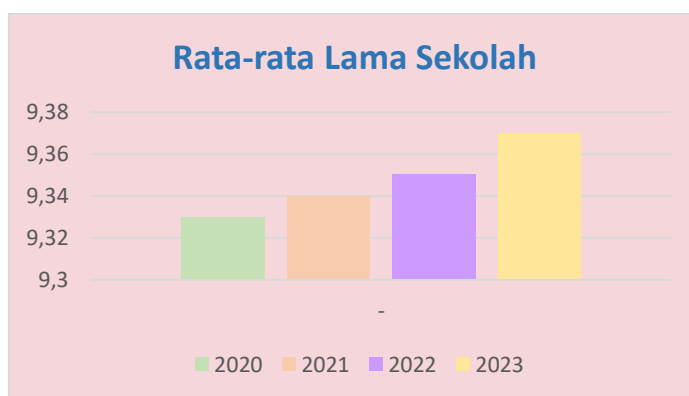
Harapan Lama Sekolah merupakan salah satu indikator yang memegang peranan penting dalam melakukan pengukuran IPM, di kabupaten Morowali HLS pada tahun 2023 berada pada angka 13,38 ini mengartikan bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,38 tahun atau setara dengan Diploma I. Berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2023 persentase realisasi HLS mencapai 92,28 persen dari target RKPD tahun 2023. Secara umum pencapaian Indikator HLS selama 5 tahun terakhir di kabupaten morowali mengalami peningkatan secara terus menerus namun peningkatan ini tidak begitu signifikan sehingga perlu adanya upaya dan perhatian dari pemerintah daerah dalam meningkatkan HLS di kabupaten morowali. Saat ini pemerintah daerah melalui dinas

Pendidikan juga telah memberikan bantuan Pendidikan gratis bagi mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu. Untuk tahun 2023 terdapat 3.214 mahasiswa yang mendapatkan bantuan Pendidikan dari pemerintah daerah

Rata-rata Lama Sekolah

Berikut Grafik Indikator Rata-rata Lama sekolah dari tahun 2020 sampai dengan tahun terakhir P-RPJMD 2018-2023 :

Grafik 3.1
Rata-rata Lama sekolah



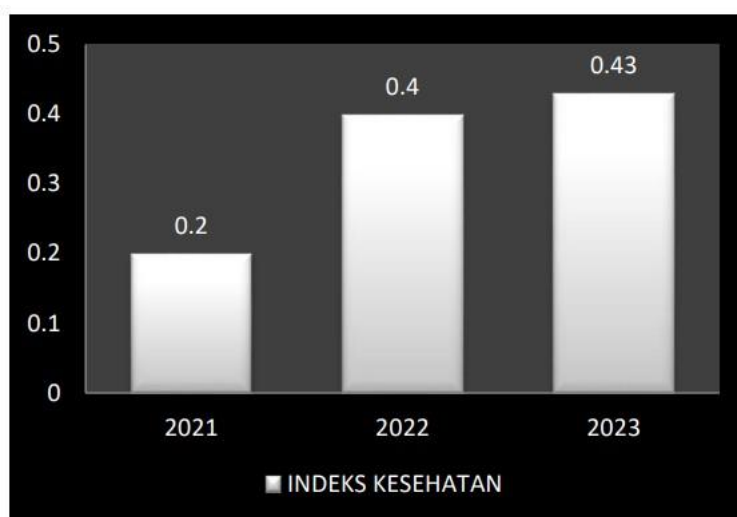
Dari grafik diatas dapat terlihat Indikator Rata-rata lama sekolah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan di akhir PRPJMD 2018-2023 indikator rata-rata lama sekolah meningkat secara signifikan.

Rata-Rata Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Jika melihat pencapaian indikator ini pada tahun 2023 berada pada angka 9,37 Ini berarti rata-rata tahun pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Morowali adalah setara kelas tiga SMP/Sederajat. Dari capaian ini menunjukkan bahwa secara umum, sebagian besar penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Morowali telah sepenuhnya tuntas pendidikan dasar sembilan tahun. berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2023 persentase realisasi RLS mencapai 90,97 persen dari target RKPD tahun 2023. Secara umum pencapaian Indikator RLS selama 5 tahun terakhir di kabupaten morowali juga mengalami peningkatan secara terus menerus namun peningkatan ini tidak begitu signifikan. Kendala yang dihadapi saat ini adalah penambahan

penduduk yang begitu signifikan sehingga ruang kelas belajar yang tersedia saat ini masih sangat terbatas sehingga diperlukan upaya dari pemerintah dalam menyediakan sarana, prasarana maupun fasilitas pendidikan di kabupaten morowali.

Sasaran Strategis “ Terpenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Indeks Kesehatan



Sumber data : LKjIP Dinas Kesehatan

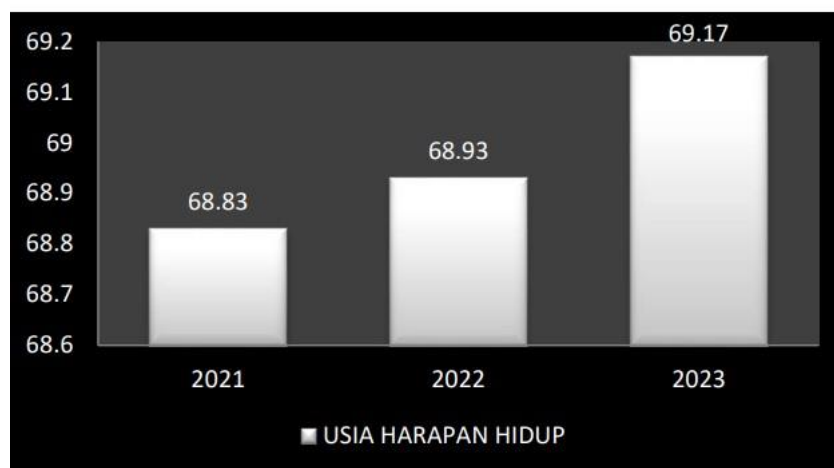
Indeks Kesehatan di kabupaten morowali masih kategori tidak sehat hal tersebut dikarenakan beberapa faktor antara lain kurang updatenya pada aplikasi pendataan PIS-PK yang di akibatkan oleh kendala jaringan sehingga tidak ter update secara berkala dan masih belum optimalnya pelayanan kesehatan yang dikarenakan kurangnya sarana prasarana serta pendukung pelayanan kesehatan sesuai standard Selain itu gaya hidup sebagian besar masyarakat belum mengarah ke pola hidup sehat sehingga kurang mendukung peningkatan indeks kesehatan. Pola hidup tersebut antara lain kebiasaan merokok, Konsumsi sayur dan buah yang kurang, kesadaran masyarakat untuk melaksanakan cek kesehatan secara rutin yang rendah.

Indeks Kesehatan, indikator ini merupakan salah satu indikator yang dapat mempengaruhi nilai indeks pembangunan manusia oleh United National Development Programe (UNDP). Berdasarkan hasil

evaluasi kinerja terhadap indikator ini pada RKPD Kabupaten Morowali tahun 2023 mencapai indeks 75,95 atau 109,29 dari target RKPD yang ditetapkan yaitu pada indeks 69,50-70,00. pencapaian ini merupakan kategori sangat tinggi mengingat berbagi program yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas kesehatan di Kabupaten Morowali antara lain Penjaminan Kesehatan Gratis melalui BPJS Kesehatan sebanyak 33.355 jiwa dengan alokasi anggaran Rp. 14.991.480.000,00. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, pembangunan Puskesmas baru di Pulau Umbele kec. Bungku selatan dan menjamin ketersediaan tenaga kesehatan, sampai dengan tahun 2023 tenaga kesehatan yang ada sebanyak 1.620 orang yang terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, dan tenaga kesehatan lainnya. Dengan pencapaian ini bukan berarti pemerintah daerah tidak mendapatkan hambatan dan kendala salah satu tantangan yang dihadapi saat ini yaitu dengan tingginya pertumbuhan penduduk sehingga mengakibatkan terbatasnya sarana dan prasana kesehatan dan penyediaan obat-obatan, sehingga masih perlu upaya dan kerja keras dari pemerintah daerah dalam menangani hal ini.

Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) masih rendah di Kabupaten Morowali disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kematian neonatus (bayi) masih cukup tinggi (34 kematian bayi), kematian yang disebabkan oleh Penyakit Tidak Menular cukup tinggi, rendahnya cakupan skrining kesehatan bagi lansia dan akses pelayanan kesehatan yang belum maksimal di beberapa daerah sulit (wilayah kepulauan). Berikut Grafik Indikator Usia Harapan Hidup (UHH) dari tahun sebelumnya :



Dari grafik di atas tentunya terlihat nilai Indikator Usia Harapan Hidup dari tahun 2021 hingga akhir P-RPJMD 2018-2023 nilai indikator tersebut meningkat. Namun belum memenuhi target pada akhir P-RPJMD antara 69,50-70 tahun.

Kegagalan Peningkatan rata-rata Umur Harapan Hidup dari rencana kinerja 70 tahun hanya dapat terealisasi sebesar 69 tahun. Salah satu indikator pokok untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat adalah Umur Harapan Hidup. Umur yang panjang namun tidak berkualitas (mengalami sakit kronis) akan membawa konsekuensi logis pada perubahan pola penyakit degeneratif yang timbul. Strategi untuk meningkatkan Capaian Usia Harapan Hidup di tahun berikutnya adalah melalui pelaksanaan program PHBS, peningkatan dan perluasan jangkauan pelayanan kesehatan, pencegahan dan penanggulangan penyakit, peran SDM kesehatan pada desa siaga serta penyehatan lingkungan.

Angka Stunting

Angka Stunting atau stunting adalah keadaan saat balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan usia dan jenis kelamin yang diukur dengan standar pertumbuhan anak dari WHO. Masalah stunting di kabupaten morowali merupakan masalah kesehatan yang belum dapat diatasi sepenuhnya oleh pemerintah daerah, hal tersebut dibuktikan dengan prevalensi stunting kabupaten morowali pada tahun 2022 hanya mengalami penurunan sebesar 5,6

persen dari angka stunting tahun sebelumnya sebesar 28.9 persen. Berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2023 penurunan stunting mencapai 6,60-6,10 persen, capaian ini masih menggunakan data sementara sambil menunggu data hasil survey Gizi Indonesi (SSGI) yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan RI. Pada tahun 2023 Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk penanganan stunting sebesar Rp. 42.773.372.372 yang terdiri dari APBD Murni Tahun 2023 sebesar Rp. 31.819.459.512 dan Dana Transfer (DAK, DAU, DBH, DID, Dll) sebesar Rp. 10.953912.860. Adapun upaya atau langkah kongkrit yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal menurunkan angka stunting di kabupaten morowali adalah dengan pemberian makanan tambahan pada balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.500/Orang selama 90 hari dan pendampingan balita stunting dan keluarga beresiko stunting. Dalam hal menurunkan stunting pemerintah daerah akan terus berupaya dan mejadikan sebagai salah satu prioritas dalam perencanaan RKPD tahun 2025. Berikut grafik peningkatan Indikator Kinerja Utama Angka Stunting dari tahun 2020 sampai dengan akhir P RPJMD 2018-2023



Penurunan Prevalensi Stunting di kabupaten Morowali dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. berdasarkan data PSG (Pemantauan Status gizi) Kemenkes pada tahun 2017, jumlah balita Stunting mencapai 3608 balita (34%), berdasarkan data RISKESDAS (Riset Kesehatan Dasar) Kemenkes pada tahun 2018, Prevalensi balita stunting yaitu 30,40%. Sedangkan Pada tahun 2019 menurut data e-

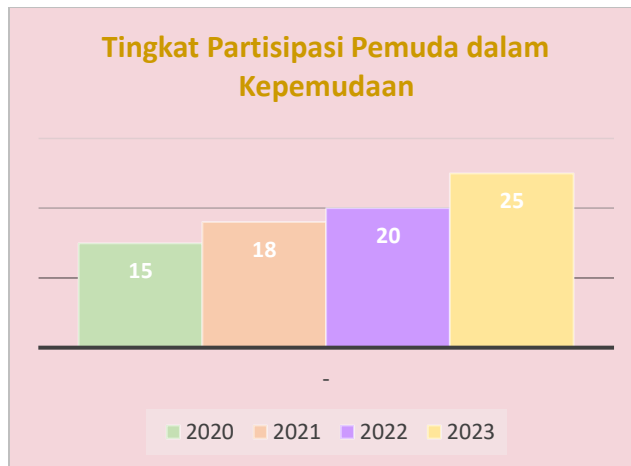
PPGBM balita stunting yaitu 1042 (12%), pada tahun 2020 data per agustus yaitu 849 balita (7.8%), Selanjutnya pada tahun 2023 Kabupaten Morowali mengalami penurunan yaitu pada bulan Desember 2023 menjadi 6,7% (648 Balita), hal tersebut di tunjang dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah baik dari segi penyediaan sarana pelayanan, SDM Kesehatan yang terstandar juga Logistik untuk mendukung jalannya kegiatan penurunan stunting Pelaksanaan Intervensi Spesifik Maupun Sensitif juga dilaksanakan secara konfergensi oleh Lintas Program dan Lintas Sektor.

Hal ini juga di dukung oleh beberapa faktor adalah pendidikan dan pengetahuan orang tua sudah meningkat terutama masalah kesehatan dan gizi yang diperoleh melalui informasi-informasi baik melalui penyuluhan langsung maupun dari media-media yang ada, selain itu upaya penurunan status gizi kurang telah dilakukan yaitu dengan dukungan program upaya perbaikan gizi masyarakat (UPGK) dengan kegiatan penimbangan balita setiap bulannya di posyandu yang disertai dengan kegiatan-kegiatan lainnya seperti pemberian makanan tambahan baik PMT penyuluhan maupun PMT pemulihan dan perawatan bagi penderita gizi kurang/buruk yang memerlukan perawatan.

Sasaran Strategis Meningkatnya Partisipasi Organisasi Kepemudaan dan Prestasi Olah raga Daerah

Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepemudaan

Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan, berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2023 realisasi terhadap indikator ini masih sangat rendah atau hanya mencapai 25 persen dari target yang telah di tetapkan, sehingga diperlukan upaya oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan parsipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan. Berikut grafik realisasi indikator kinerja tingkat Partisipasi pemuda dalam kepemudaan :



Sumber data LKjIP Dinas Pemuda Olahraga

Dari grafik di atas bahwa indikator tersebut setiap tahunnya meningkat. Dan diakhir P-RPJMD tingkat partisipasi pemuda dalam kepemudaan adalah 25%, namun pada akhir periode P-RPJMD belum memenuhi target.

Peningkatan Partisipasi Olahraga

Peningkatan Prestasi Olahraga berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2023 realisasi terhadap indikator ini masih sangat rendah atau hanya mencapai 13,51 persen dari target yang telah ditetapkan, Pada tahun 2023 kabupaten morowali hanya mendapatkan 5 (lima) medali juara dari semua even olahraga yang diikuti, sehingga diperlukan upaya oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Morowali melalui peningkatan kualitas atlet yang ada saat ini dan peningkatan sarana maupun prasarana olahraga. Berikut disajikan grafik realisasi peningkatan partisipasi olahraga dari tahun 2020 sampai dengan akhir periode P-RPJMD 2018-2023 :

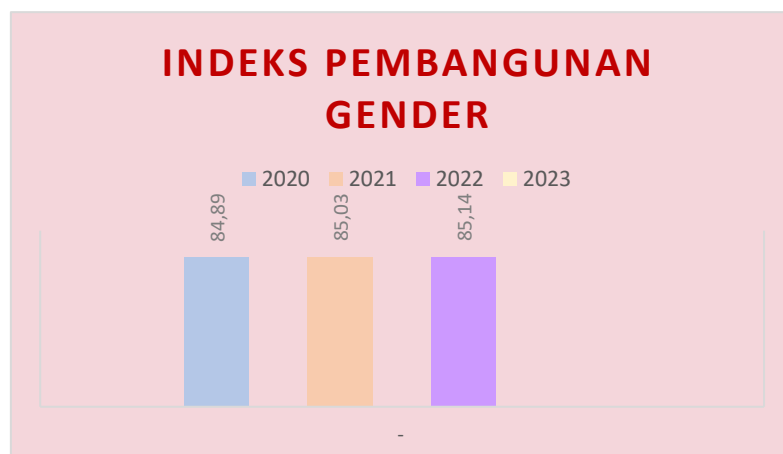


Sumber data LKjIP Dinas Pemuda Olahraga

Dari grafik di atas terlihat angka peningkatan partisipasi Olahraga terjadi peningkatan sampai akhir periode P-RPJMD 2018-2023, namun dari target P-RPJMD angka peningkatan partisipasi mencapai 27,03% sehingga indikator peningkatan partisipasi Olahraga belum memenuhi target pada akhir P-RPJMD 2018-2023.

Sasaran Strategis Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Daerah

Pada sasaran strategis meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah dengan indikator kinerja utama Indeks Pembangunan Gender (IPG).



Berdasarkan grafik di atas indeks pembangunan gender dari tahun 2020 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan, untuk tahun 2023 Indeks Pembangunan gender masih menunggu rilis resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

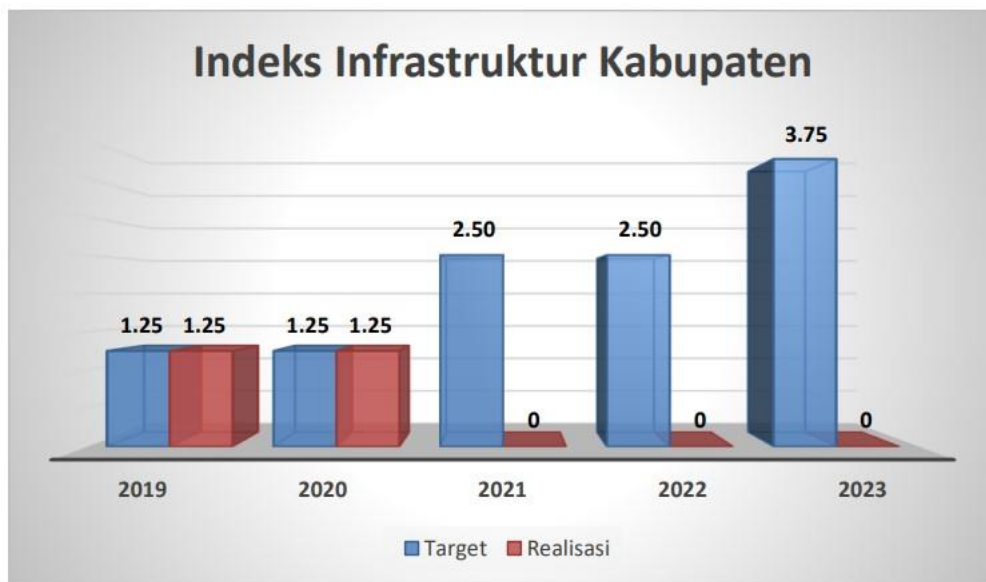
3.1.3 Capaian Indikator Kinerja Tujuan Strategis IV “ Meningkatkan Kualitas Infrasturktur Dasar

Misi IV Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Peningkatan Infrastruktur Daerah sehingga Mengurangi Kesenjangan Wilayah dan Terciptanya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Bahagia, dengan Tujuan Strategis IV adalah Menigkatkan Kualitas Infra struktur Dasar dengan Indikator Kinerja Utama yaitu indeks Infrastruktur Kabupaten, capaian kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.17
Capaian Indikator Tujuan Strategis IV

TUJUAN STRATEGIS (T.S) IV Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar								
NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI		CAPAIAN (%) 2023	Keterangan	Sumber Data
				2022	2023			
4.1	Indeks Infrastruktur Kabupaten	Kategori (Nasional)	1,51-3,75 (Tinggi)	n/a			Belum rilis	
	Sasaran Strategis (S.S) 4.1.1							
	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar daerah							
	4.1.1.1	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	%	25,550-30,00	30,95	40,48	134,93	Melebihi Target Dinas PUPR
	4.1.1.2	Rasio Elektrifikasi	%	99,00-99,20	98,17	98,3	99,29	Belum mencapai target Bapelitbangda
	4.1.1.3	Persentase Rumah Layak Huni	%	80-85	100	87	102,35	Melebihi Target Dinas Perumahan
	4.1.1.4	Persentase RT berakses air bersih	%	90-92	84,87	91,88	100,97	Melebihi Target Dinas PUPR
	Sasaran Stretegis (S.S) 4.1.2							
	Meningkatnya Pemanfaatn Teknologi Informasi dan Komunikasi							
	4.1.2.1	Persentase desa/kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi	%	90-95	92,41	93,3	103,67	Melebihi Target Dinas Kominfo
	4.1.2.2	Perentase koneksi internet Desa	%	80-90	86,33	88,24	110,3	Melebihi Target

Dalam pencapaian misi ini Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali menetapkan tujuan pembangunan daerah yaitu Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dengan tolak ukur peningkatan Indeks Infrastruktur Kabupaten. Adapun hasil pengukuran tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Sumber data : Dokumen Evaluasi P-RPJMD 2018-2023

Tercapainya Indikator Indeks Infra struktur Kabupaten pada Tujuan startegis IV ini juga di dukung oleh beberapa indikator, berikut lima (5) indikator sasaran satrategis :

Tabel 2.18
Capaian Sasaran Strategis pada Tujuan IV

NO	SASARAN TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI		CAPAIAN 2023 (%)	Ket
					2022	2023		
1	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar daerah	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	%	25,550-30,00	30,95	40,48	134,93	Melebihi Target
2		Rasio Elektrifikasi	%	99,00-99,20	98,17	98,3	99,29	Belum mencapai target
3		Persentase Rumah Layak Huni	%	80-85	100	87	102,35	Melebihi Target
		Persentase RT berakses air bersih	%	90-92	84,87	91,88	100,97	Melebihi Target
4	Meningkatnya Pemanfaatn Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase desa/kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi	%	90-95	92,41	87,3	97	Belum mencapai target
5		Perentase koneksi internet Desa	%	80-90	86,33	38,46	48,075	Belum mencapai target

Sasaran Strategis “Meningkatkan kualitas Infrastruktur Dasar Daerah”

Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik

Berikut di sajikan grafik peningkatan realisasi indikator Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi baik dari tahun 2020 sampai dengan di akhir P-RPJMD tahun 2023 :



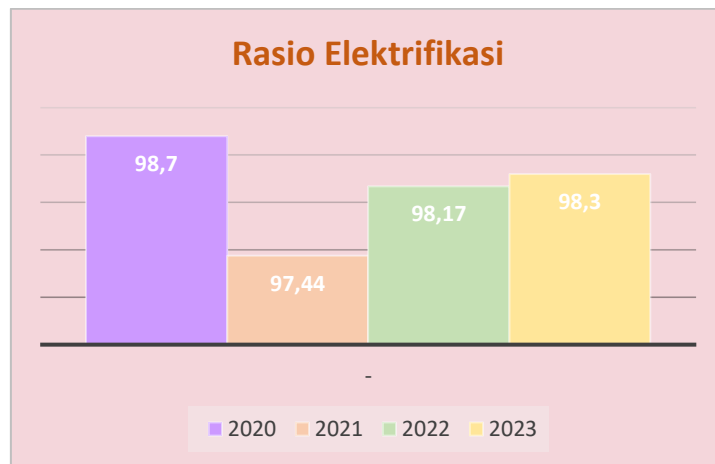
Dari grafik di atas terlihat nilai tertinggi yaitu di tahun 2021, namun di tahun 2023 indikator proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat dikatakan berhasil melebihi target yang telah di tentukan pada P-RPJMD 2018-2023 yakni berkisar antara 25,550-30,00 dan realisasi tahun 2023 adalah 40,48% dengan capaian 134,93%. Sehingga capaian pada indikator ini adalah sangat baik.

Pencapaian tersebut merupakan kontribusi dari kegiatan peningkatan jalan tahun 2023 sepanjang 68,37 KM jalan yang ditingkatkan dan dilaksanakan di beberapa ruas di antaranya peningkatan ruas jalan Atananga lambelu-Limbomamur, ruas jalan Bahoea-Trans Kabera, ruas jalan dalam desa Bahodopi, ruas jalan dalam desa bahomakmur, ruas jalan dalam desa kolono, Ruas jalan dalam desa lambelu, ruas jalan dalam desa Limbo Makmur, ruas jalan dalam desa makarti jaya, jalan lingkaran atas emea-uedago, ruas jalan lingkaran menui, Ruas jalan lingkaran Pulau paku Kaleroang, ruas jalan Umpanga -trans Umpanga.

Rasio Elektrifikasi

Pada Indikator Rasio elektrifikasi yang merupakan indikator pendukung dari sasaran stretegis meningkatkan kualitas infrastruktur daerah, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut diakhir P-RPJMD 2018-2023 hampir mencapai target, capaian yakni : 98,3% dari target pada P-RPJMD antara 99,00%-99,20 %.

Berikut grafik realisasi Indikator Rasio Elektrifikasi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 20203 :



Persentase Rumah Layak Huni

Persentase rumah layak huni juga merupakan salah satu indikator dari sasaran strategis meningkatkan kualitas infrastruktur daerah, berikut di sajikan grafik perbandingan realisasi capaian indikator tersebut :

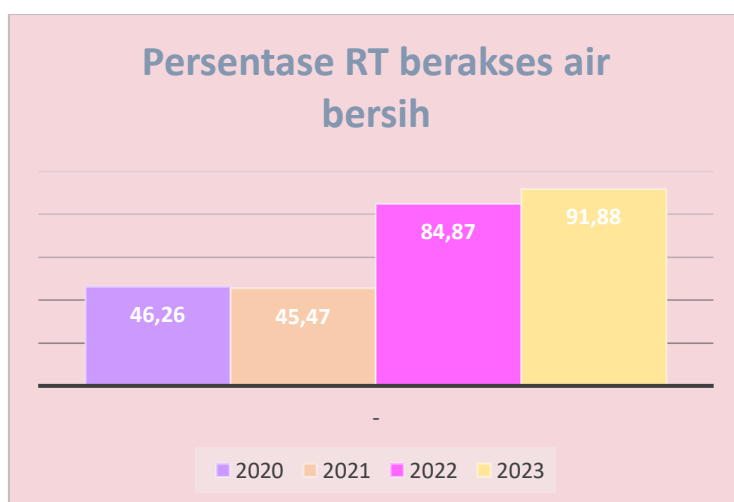


Dari grafik diatas tentunya terlihat persentase tertinggi dari indikator tersebut berada di tahun 2021 dengan realisasi 99,57%. Di akhir tahun P-RPJMD 2018-2023 indikator dengan realisasai 87% mengalami penurunanjika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2022. Namun di akhir P-RPJMD persentase ini melebihi target yang telah di tetapkan dengan capaian 102,3% seperti pada tabel sasaran startegis di atas. Adapaun indikator pendukung keberhasilan persentase rumah layak huni yaitu :

- Jumlah ruma layak huni yang tertangani dari sebanyak 444 unit dari target 400 unit rumah yang tertangani
- Jumlah rumah yang dibangun/rehab pasca bencana terealisasi 12 unit dari 20 unit target yang telah di tentukan
- Jumlah pembangunan rumah bagi korban yang terkena bencana terealisasi 18 unit rumah yang telah di bangun.

Persentase RT berakses Air Bersih

Capaian Indikator Persentase RT berakses Air bersih dihitung berdasarkan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih di wilayah Kabupaten Morowali yaitu Jumlah penduduk dengan akses air minum yang terlindungi dan berkelanjutan dibagi jumlah penduduk seluruhnya di kabupaten morowali. Berikut grafik perbandingan persentase RT berakses air bersih dari tahun 2020 sampai kahir P-RPJMD 2023 :



Dari grafik di atas jelas terlihat bahwa dari tahun ke tahun persentase RT berakses air bersih meningkat, di akhir tahun 2023 realisasi 91,88% dari target P-RPJMD 2018-2023 adalah 90-92% dengan capaian 100,97% sehingga dapat dikatakan baik sekali karena melebihi target P-RPJMD 2018-2023.

Sasaran Strategis “Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi”

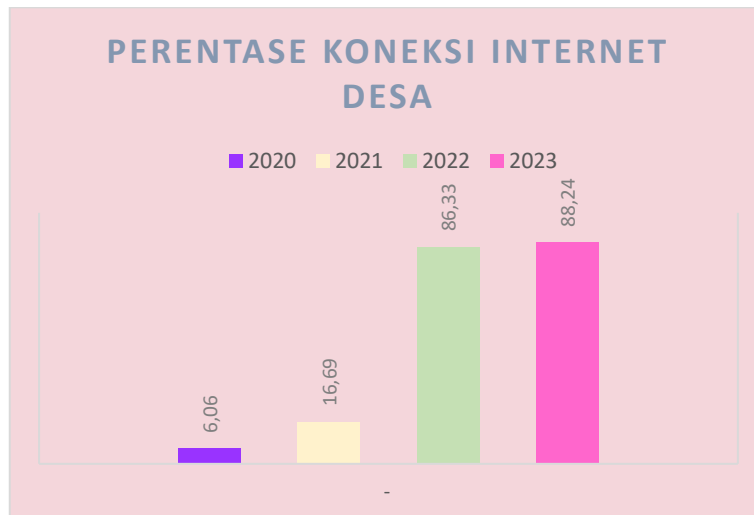
Persentase desa/kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi



Dari grafik di atas terlihat di akhir P-RPJMD 2018-2023 persentase Desa/kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi meningkat setiap tahunnya dengan realisasi 98,3% dari target 90-95% dengan capaian adalah 103,67%. Adapun pendukung keberhasilan indikator tersebut yaitu :

- ✓ Tersedianya 14 BTS Bakti komunikasi dan Informatika
- ✓ Adanya dukungan dari perkembangan wilayah yang mendorong provider telekomunikasi untuk ikut serta.

Persentase koneksi internet Desa



Dari grafik di atas terlihat persentase koneksi internet desa dari tahun sebelumnya hingga di akhir P-RPJMD 2018-2023 mengalami peningkatan, di tahun 2023 realisasi persentase koneksi internet desa adalah 88,24% dari target P-RPJMD 80-90% sehingga capaian di tahun akhir P-PRIMD 2018-2023 adalah 110,3% sehingga capaian tersebut sangat baik karena melebihi target yang telah ditentukan. Keberhasilan tersebut tentunya didukung oleh beberapa faktor yaitu : telah tersosialisasi dan terbentuknya kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat Desa.

3.1.3 Capaian Indikator Kinerja Tujuan Strategis V “ Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH) dan Berkurangnya Resiko Bencana

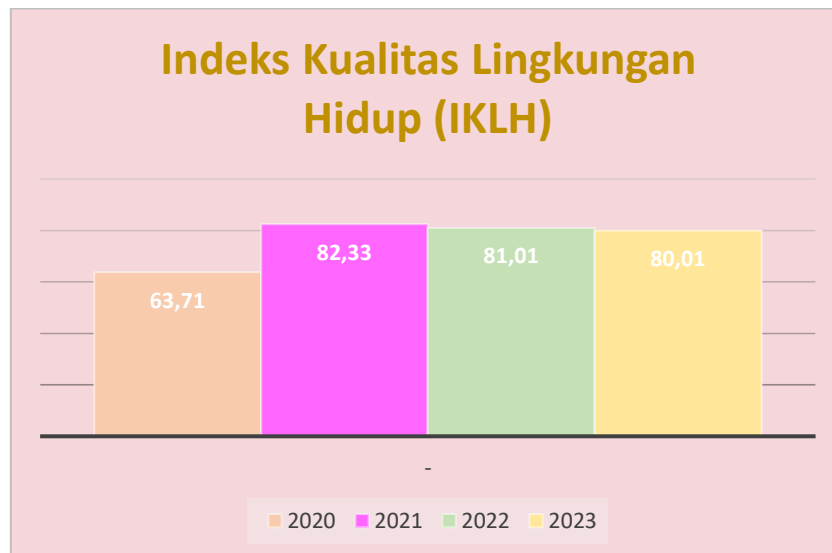
Misi IV Mewujudkan Lingkungan Hidup berkelanjutan, dan meningkatkan ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim dan bencana, dengan Tujuan Strategis V adalah Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH) dan Berkurangnya Risiko Bencana dengan Indikator Kinerja Utama yaitu indeks Kualitas Lingkungan Hidup, capaian kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.19
Capaian Indikator Tujuan Strategis V

TUJUAN STRATEGIS (T.S) V Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH) dan Berkurangnya Resiko Bencana								
NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI		CAPAIAN (%)	Keterangan	Sumber Data
				2022	2023	2023		
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	55-60	81,01	80,01	133,35	Melebihi target	Dinas Lingkungan Hidup
	Sasaran Strategis (S.S) 5.1.1							
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup							
	5.1.1.1	Indeks rawan Bencana	Indeks	90-95	174,82		Belum rilis	Data IRB
	5.1.1.2	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	19,84-23,80	2,38	7,94	40,02	Belum mencapai target Bappelitbangda
	Sasaran Strategis (S.S) 5.1.2							
	Meningkatnya Layanan Kebersihan dan Penataan Lingkungan Kota Bungku							
	5.1.2.1	Cakupan pelayanan persampahan kota	%	100	77	49,41	49,41	Belum mencapai target Dinas Lingkungan Hidup
	Sasaran Strategis (S.S) 5.1.3							
	Meningkatnya Respon dan Layanan kebakaran kabupaten							
	5.1.3.1	Cakupan layanan kebakaran	%	100,00	100	n/a	n/a	Tidak Terukur Damkar

TUJUAN STRATEGIS (T.S) V Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH) dan Berkurangnya Resiko Bencana									
NO	INDIKATOR		SATUAN	TARGET 2023	REALISASI		CAPAIAN (%)	Keterangan	Sumber Data
					2022	2023	2023		
		skala kabupaten							
	Sasaran Stretegis (S.S) 5.1.4								
	Menurunnya Gangguan ketentraman dan Ketertiban								
5.1.4.1	Angka kriminalitas	%		8-5	436			tidak mencapai target	Belum dirilis

Dalam pencapaian misi ini Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali menetapkan tujuan pembangunan daerah yaitu Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) dengan Indikator kinerja utama Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), adapun hasil pengukuran tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Sumber data : LKjIP 2023 dinas Lingkungan Hidup

Dari Grafik di atas terlihat IKLH tertinggi yaitu di tahun 2021 dengan realisasi mencapai 82,33. Namun di akhir P-RPJMD 2018-2023 IKLH juga masih melebihi dari target yang telah di tentukan dengan indeks 55-60 sehingga realisasi IKLH adalah 80,01 dan capaian 133,35% dengan kategori Baik sekali.

Adapun yang faktor pendukung keberhasilan dari Indikator tersebut adalah :

- Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2023.
- Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.

- c. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.
- d. Adanya peraturan perundangan yang mendukung kegiatan pengelolaan lingkungan.
- e. Adanya kedisiplinan pelaku usaha/kegiatan untuk memperkecil pencemaran lingkungan, dan intensifnya pengawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah.
- f. Adanya peraturan perundangan beserta sanksi pelanggaran yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah
- g. Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.

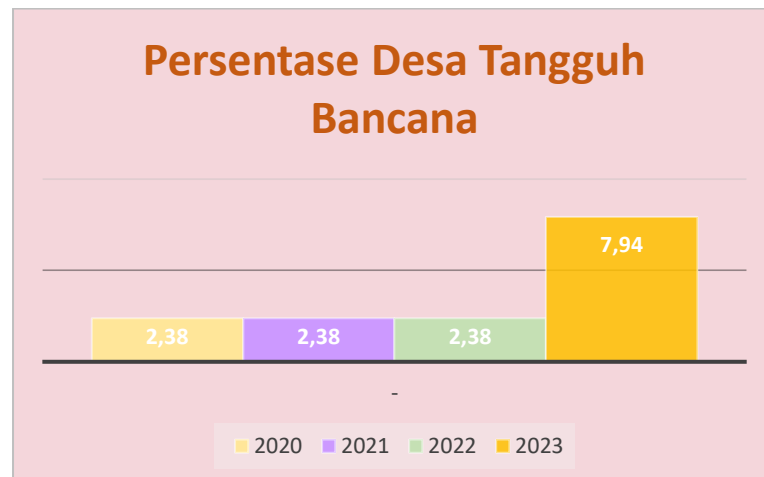
Dalam mewujudkan Indikator Indeks Kualitas Lingkungan hidup (IKLH) di dukung beberapa sasaran strategis dan indikatornya, berikut di sajikan dalam tabel :

Tabel 2.20
Capaian Sasaran Strategis pada Tujuan IV

NO	SASARAN TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI		CAPAIAN 2023 (%)	Ket
					2022	2023		
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks rawan Bencana	indeks	90-95	174,82			Belum rilis
2		Persentase Desa Tangguh Bencana	%	19,84-23,80	2,38	7,94	40,02	Belum rilis
4	Meningkatnya Layanan Kebersihan dan Penataan Lingkungan Kota Bungku	Cakupan pelayanan persampahan kota	%	100	77	49,41	49,41	Belum mencapai target
	Meningkatnya Respon dan Layanan kebakaran kabupaten	Cakupan layanan kebakaran skala kabupaten	%	100,00	100			Belum rilis
5	Menurunnya Gangguan ketentraman dan Ketertiban	Angka kriminalitas	%	8-5	436			Belum rilis

Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”

Persentase Desa Tangguh Bencana



Sumber data : Dokumen Evaluasi RKPD 2023

Dari grafik di atas dapat terlihat di akhir P-RPJMD 2018-2023 persentase desa tangguh bencana tertinggi yaitu di tahun 2023 dengan capaian realisasi 7,94% dari target 19,84-23,80. Indikator persentase desa tangguh bencana belum mencapai target.

Sasaran Strategis Meningkatkan Layanan Kebersihan dan Penataan Lingkungan Kota Bungku”

Cakupan Pelayanan Persampahan Kota



Sumber data : Dokumen Evaluasi RKPD 2023

Dari grafik diatas terlihat perbandingan indikator cakupan Pelayanan Persampahan, di akhir P-RPJMD 2018-2023 persentase cakupan pelayanan persampahan kota meningkat di banding dengan tahun 2022, yaitu 16,11% dan di tahun 2023 meingkat 33,3

poin sehingga capaian realisasi 49,41% namun peningkatan tersebut belum dapat memenuhi dari target yang telah di tentukan dalam P-RPJMD 2018-2023 yaitu 100%.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN

TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Urusan Pemerintahan yang ditugas Pembantuan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada kota/kabupaten untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi tugas tertentu . kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Sedangkan Dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya penugasan atau pelimpahan wewenang dari Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah.

Dana tugas pembantuan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan di daerah serta menciptakan keselarasan dan sinergi secara nasional antara program dan

kegiatan yang didanai dari APBN dan program dan kegiatan yang didanai dari APBD. Namun, pada Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali tidak melaksanakan Tugas Pembantuan dan Penugasan dari Pemerintah Tingkat Atasnya. Hal ini dikarenakan tidak adanya Transfer dana Tugas Pembantuan Pada Tahun 2023 yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dan pelaksanaan Tugas Pembantuan telah selesai dilaksanakan Pada Tahun 2022.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota, jenis dan penerima pelayanan dasar sebagai berikut :

- Jenis Pelayanan Dasar
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Pendidikan Dasar
 - c. Pendidikan Kesetaraan
- Penerima Pelayanan Dasar
 - a. Penerima pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan Anak Usia Dini merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.
 - b. Penerima pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan pada Pendidikan Dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
 - c. Penerima pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan pada Pendidikan Kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
 - d. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Menengah merupakan Peserta Didik yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
 - e. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Khusus merupakan Peserta Didik penyandang disabilitas yang berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Dinas Pendidikan telah memasukan target SPM pada RENSTRA, Target pencapaian SPM bidang Pendidikan pada Tahun 2023 di Kab. Morowali berdasarkan RENSTRA/Renja Dinas Pendidikan Kab. Morowali tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 4.1
TARGET CAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN
TAHUN 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar : 28.039	27.823	2023	Jumlah barang jasa dan sumber daya manusia : 2.054	2.100	2023	
			99%					
		Rata-rata kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional : 61,58	61,58	2023		98%		
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan : 1.676	1.676	2023	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia : 60	65	2023	
			100%					
		Rata-rata kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa berdasarkan hasil	61,58	2023		96%		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		PenerimaLayanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
		Asesmen Nasional : 61,58						
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usis 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD : 6.246	6892	2023	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia : 609	700	2023	
			91%					
		Rata-rata kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional : -	-	2023		91%		

4.1.3 REALISASI

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	JUMLAH (Rp)	
				ANGGARAN	REALISASI
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	DAK FISIK, PAD	17.195.321.920	16.711.747.971
		Penambahan Ruang Kelas Baru	DBH, DAU	7.563.875.927,00	6.486.229.206,00
		Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	DAU	3.099.541.204,00	2.960.917.599,00
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	DAU	1.536.089.191,00	1.514.447.000,00
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DBH, DAU	3.099.065.188,00	3.067.489.774,00
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala	DAU	2.794.999.592,00	2.789.263.949,00

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	JUMLAH (Rp)	
				ANGGARAN	REALISASI
		Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah			
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	DAU	3.086.914.417,00	2.978.976.742,00
		Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	DAU	33.667.973,00	32.928.000,00
		Pengadaan Mebel Sekolah	DAU	1.200.796.800,00	1.196.978.750,00
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	PAD	378.235.000,00	0,00
		Pengadaan Perlengkapan Siswa	PAD	349.966.000,00	349.573.450,00
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	PAD	234.874.580,00	65.315.000,00
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	PAD	333.747.670,00	328.856.920,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	PAD	2.248.701.720,00	2.203.915.500,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	PAD	21.013.160.000,00	20.873.000.000,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	PAD	434.302.380,00	398.976.840,00
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	DAK NON FISIK	18.381.309.142,00	0,00
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	PAD	152.707.330,00	98.677.088,00
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	DAK FISIK, PAD	14.033.990.064,00	13.807.621.497,00
		Penambahan Ruang Kelas Baru	DAU	2.208.129.801,00	1.491.538.935,00
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	DAU	927.509.806,00	482.402.704,00
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	DAU	499.999.920,00	482.402.704,00

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	JUMLAH (Rp)	
				ANGGARAN	REALISASI
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DAU	812.723.503,00	811.563.948,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	DAU	162.831.888,00	162.248.000,00
		Pengadaan PerlengkapanSiswa	PAD	20.795.398.900,00	20.626.163.900,00
		Perlengkapan Belajar Peserta Didik	DAU	3.919.879.000,00	3.900.920.000,00
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	PAD	313.240.350,00	96.899.750,00
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	PAD	441.636.510,00	439.767.510,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	PAD, DBH	14.010.565.440,00	14.132.844.440,00
		Pengelolaan Dana BOS SekolahMenengahPertama	DAK NON FISIK	7.273.849.142,00	0,00
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	PAD	189.898.110,00	169.070.500,00
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	DAU	2.752.600.634,00	2.669.057.722,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	PAD	1.820.000.000,00	1.820.000.000,00
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	PAD	163.592.770,00	159.892.770,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	PAD	4.089.000.000,00	3.971.000.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	PAD	139.659.070,00	133.447.410,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	PAD	122.337.650,00	113.617.650,00
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	DAK NON	4.852.200.000,00	0,00

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	JUMLAH (Rp)	
				ANGGARAN	REALISASI
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		FISIK		
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	PAD	163.644.580,00	156.750.941,00
		Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	PAD	1.806.165.340,00	1.711.552.055,00
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	DAK NON FISIK	1.384.200.000,00	0,00

4.1.4 ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk& Keluarga Berencana Kabupaten Morowali Tahun 2023 berjumlah Rp. 127.139.797.282,-. Untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan bidang kesehatan berjumlah Rp 40.565.659.001 yang terdiri dari program kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023

4.1.5 DUKUNGAN PERSONIL

Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan di Kab. Morowali pada Tahun 2023 didukung oleh personil baik langsung maupun tidak langsung sebanyak 80 orang yang terdiri dari :

a. PNS

Pegawai Negeri sipil yang ada di Dinas Pendidikan Kab. morowali pada Tahun 2023 terbagi menjadi yang bertugas di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Morowali, UPTD Pendidikan Daerah. Adapun bila melihat jumlah keseluruhan sebagai berikut:

Eselon II	= 1 Orang
Eselon III	= 5 Orang
Eselon IV	= 13Orang
Staf	= 18 Orang
JUMLAH	= 37Orang

b. Honorer

Pegawai Honorer yang ada di Dinas Pendidikan Kab. morowali pada Tahun 2023 terbagi menjadi yang bertugas di Kantor Dinas Pendidikan Kab Morowali, berjumlah 43 Orang. (Jumlah diatas belum termasuk tenaga UPT Dinas)

4.1.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Tabel 4.4

Kendala	Permasalahan	Solusi
Perencanaan	Belum semua pelaksana SPM, memahami SPM sebagai sebuah instrumen yang komprehensif	Mengadakan sosialisasi tentang penerapan SPM
	Tidak semua indikator dapat dipahami dan mudah dimengerti	Perlu adanya kesepakatan indikator dan definisi yang belum jelas atau sulit dimengerti
Koordinasi	Tidak semua data dasar tersedia dan data cenderung kurang update	Perlu kerjasama yang intensif pihak penyedia data
Pendanaan	Disharmoni RPJMD dan Renstra terkait masalah penerapan SPM	Sinkronisasi antara SPM dengan dokumen perencanaan lainnya
	Penganggaran yang belum berorientasi pada SPM	Penerapan kebijakan penganggaran yang berorientasi pada SPM
	Terjadi perubahan kebijakan keuangan baik di pusat maupun daerah	Review dokumen RPJMD, Renstra dan Renja.

4.2 URUSAN KESEHATAN

4.2.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2019 Pemenuhan Mutu Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten /Kota dan Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan yaitu Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- d. Pelayanan Kesehatan Balita
- e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
- j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
- k. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)
- l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

4.2.1 TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

Tabel 4.5
TARGET CAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
TAHUN 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian						
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Ket.
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	3.690 orang 100%	Setiap tahun	Indikator mutu Minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	3.522 Orang 100%	Setiap Tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian						
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Ket.
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	3.354 Orang 100 %	Setiap Tahun	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan	18.962 Orang 100 %	Setiap Tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian						
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Ket.
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	23.723 Orang 100%	Setiap tahun	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	119.400 Orang 100%	Setiap tahun	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	12.762 Orang 100%	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian						
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Ket.
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan	41.895 Orang 100%	Setiap tahun	
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	370 Orang 100%	Setiap tahun	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan	11.234 Orang 100%	Setiap tahun	
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	2.393 Orang 100%	Setiap tahun	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian						
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Ket.
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan	4.025 Orang 100%	Setiap tahun	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	100%	Setiap tahun	

4.2.1 REALISASI

Realisasi pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kab morowali pada Tahun 2023 belum tersedia data yang dipilah antara Kontribusi pemerintah Daerah dan Kontribusi swasta/masyarakat. Adapun Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kab morowali sebagai berikut :

Tabel 4.6

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Kinerja (%)	Realisasi (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.690 Orang (100%)	65,26 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.522 Orang (100%)	83,25%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.354 Orang (100%)	88,43%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Kinerja a(%)	Realisasi (%)
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18.962 Orang (100%)	53,72%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23.723 Orang(100 %)	130%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	119.400 Orang(100 %)	71,31%
7	Pelayanan Kesehatan	Jumlah	12.762	73,74%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Kinerja (%)	Realisasi (%)
	hatan Pada Usia Lanjut	Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang (100%)	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41.895 Orang (100%)	38,30%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.234 Orang (100%)	33,67%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Kinerja (%)	Realisasi (%)
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	370 Orang (100%)	86,49%
11	Pelayanan Kesehatan Penderita Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2.393 Orang (100%)	104%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan	4.025 Orang (100%)	99,20%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Kinerja (%)	Realisasi (%)
		Pelayanan Sesuai Standar		

4.2.1 ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kabupaten Morowali Tahun 2023 berjumlah Rp. 127.139.797.282, -Untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan bidang kesehatan berjumlah Rp 40.565.659.001 yang terdiri dari program kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun

4.2.1 DUKUNGAN PERSONIL

Dalam Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali didukung oleh personil sebanyak 4.342 orang yang terdiri dari :

1. Tenaga Kesehatan :
 - a) Dokter / Dokter Spesialis / Dokter Gigi: 37 Orang
 - b) Bidan: 415 Orang
 - c) Perawat: 229 Orang
 - d) Ahli Gizi: 27 Orang
 - e) Kesehatan Masyarakat : 52 Orang
 - f) Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM) : 26 Orang
 - g) Kader Kesehatan : 780 Orang
- Jumlah : 1.566 orang

Non Kesehatan

- a. Guru Paud : 536 Orang
 - b. Guru : 2.240 Orang
- Jumlah : 2.776

4.2.6 PERMASLAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan Bidang Kesehatan di Kabupaten Morowali sebagai berikut :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar dengan target capaian sebesar 65,26 %. Indikator ini secara umum menurun dibandingkan tahun lalu yang mencapai target 100 %. hal tersebut dikarenakan masih banyak K1 Akses, 2 desa di Puskesmas Tanjung Harapan tidak mempunyai bidan desa dan mobilisasi penduduk yang tinggi menyebabkan ada ibu yang hamil diluar wilayah, saat datang ke Morowali usia kehamilan sudah >3 bulan dan tidak pernah kontak dengan petugas kesehatan
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar capaian target etnia sebesar 83,25%. Indikator ini capaian targetnya menurun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 90,6 % dikarenakan tingginya sasaran ibu bersalin yang dilayani dibandingkan dengan Real sasaran yang ada

sehingga capaian pelayanan ibu bersalin tidak memenuhi target dan keberhasilan tercapainya indikator tersebut dikarenakan Capaian Persalinan Nakes di Fasyankes. Masih ada persalinan nakes di non fasyankes dan persalinan dukun.

3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar capaian

Targetnya sebesar 88,43%. Indikator ini juga menurun dibandingkan dengan tahun 2022. Faktor penyebab turunnya capaian dikarenakan ada neonatus yang tidak mendapat HBO, sebanyak 37 kasus kematian neonatus sehingga tidak mendapat layanan KN lengkap dan mobilisasi penduduk tinggi.

4. Pelayanan kesehatan balita sesuai standar tidak mencapai target dari 100 % Terealisasi hanya sebesar 53,72%. Indikator ini belum mencapai target dikarenakan sama halnya dengan Indikator Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin pada penetapan sasaran Balita secara Proyeksi berdasarkan data BPS lebih tinggi dibanding Sasaran Real yang ditemukan di lapangan serta kurangnya jumlah kunjungan di posyandu pada saat dilakukan SDIDTK

5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar capaian Sebesar 130 %. Indikator ini melebihi target sasaran dikarenakan kegiatan penjangkaran anak Usia Pendidikan Dasar yang dilakukan oleh petugas kesehatan (puskesmas) melebihi jumlah sasaran yang sudah ditetapkan.

6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar realisasi capaian sebesar 71,31 %. Indikator ini belum

mencapai target walaupun menggunakan data real dikarenakan salah satu Pelayanan Usia Produktif terstandar harus dilakukan pemeriksaan IVA /sadanin namun masih banyak wanita di usia 30-50 tahun yang sudah menikah/aktif seksual yang tidak mau di skrining IVA/Sadanis karena malu.

7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar realisasi capaiannya sebesar 73,74 %. Indikator ini jugabelum mencapai target dikarenakan sama halnya dengan permasalahan indikator sebelumnya penetapan sasaran sesuai aturan yang berlaku yaitu Permenkes 04 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang menggunakan Proyeksi sehingga Sasaran terlalu tinggi di banding data real sasaran yang ada dilapangan dan Kurangnya Partisipasi Masyarakat ke Posbindu Lansia.
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar realisasi capaian sebesar 38,30%. Indikator ini tidak mencapai target dikarenakan penghitungan sasaran harus menggunakan prevalensi Riskesdas tahun 2018 yaitu 31,7% Jumlah penduduk diatas 15 tahun namun kasus yang ditemukan tidak sebesar prevalensi (estimasi kasus hipertensi) dan Kurangnya kesadaran penderita hipertensi untuk melakukan pemeriksaan setiap bulan.
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar. Realisasi Capaian Indikator sebesar 33,67%. Indikator ini tidak mencapai target dikarenakan beberapa faktor yaitu :
 - Estimasi Sasaran yang terlalu tinggi
 - Kurangnya kesadaran penderita diabetes melitus untuk melakukan pemeriksaan setiap bulan

- Data Kasus Diabetes Melitus tidak dilaporkan
- 10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan gangguan Jiwa berat. Realisasi Capaian indikator ini sebesar 86,49 %. Capaian indikator ini juga belum memenuhi target dikarenakan Selain Penetapan Sasaran Proyeksi yang terlalu tinggi dibanding data real, belum adanya kerjasama lintas sektor dalam penanganan kasus ODGJ berat serta Kurangnya perhatian keluarga pada pelayanan orang dengan gangguan jiwa berat sehingga dapat menimbulkan ke kambuhan.
- 11. Pelayanan kesehatan penderita tuberkulosis sesuai standar. Realisasi Capaian indikator ini sebesar 104 %. Capaian Indikator ini sudah melebihi target karena giatnya tenaga puskesmas dalam mencari penderita TBC yang ada di wilayah kerjanya masing – masing puskesmas menyebabkan jumlah capaian penderita TBC melebihi sasaran yang ditetapkan di awal tahun. Selain itu juga faktor ketersediaan logistik yang memadai mendukung petugas puskesmas untuk melakukan pemeriksaan secara aktif.
- 12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar realisasi capaiannya yaitu sebesar 99,20 %. Indikator ini hampir mencapai target, namun ada beberapa faktor yang menyebabkan belum maksimalnya pencapaian yaitu selain penetapan sasaran proyeksi yang terlalu tinggi di banding data real, Masih ada ODIV yang belum mau untuk pengobatan ARV putus obat dan hilang kontak, Masih sulitnya untuk menjangkau populasi kunci khususnya LSL

c. **Solusi**

Untuk mengoptimalkan pengumpulan datas asaran pelayan terhadap 12 indikator pelayanan SPM perlu adanya peningkatan koordinasi antar sarana pelayanan kesehatan dalam mengumpulkan hasil kegiatan pelayanannya melalui laporan tepat waktu serta meningkatkan pemahaman indikator kegiatan pelayanan bidang kesehatan pada petugas kesehatan.

Membangun Sistem Informasi Kesehatan dengan pendekatan teknologi (bukan manusia) agar data diperoleh secara “Real Time“,Penambahan tenaga kesehatan di berberapa sarana pelayanan kesehatan khususnya Bidan sehingga untuk masing- masing Desa bisa memiliki tenaga dengan kompetensi yang sesuai.Meningkatkan peran aktif kader kesehatan serta kerjasama dengan lintas sektor khusus nya yang berhubungan langsung dengan peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan pemantauan tumbuh kembang balita, rujukan kasus komplikasi Ibu, Bayi dan Balita,desa siaga, serta pokja penyakit menular.

4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Jenis pelayanan dasar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kab. Morowali sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis layanan dasar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- 2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik

4.3.2 TARGET PENCAPAIAN SPM OELH DAERAH

Target pencapaian pelayanan dasar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kab. Morowali tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Tabel Target Pencapaian sebagai berikut :

Tebel. 4.8
TARGET CAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM
TAHUN 2022

No	Jenis pelayanan	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indicator	Target	Batas waktu	Indikator	Target	Batas waktu	Keterangan
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum	- Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%) - Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)	70,22% 15,59 %	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan Jasa	100% (sesuai dengan jumlah warga negara yang membutuhkan air minum untuk keperluan sehari hari)	Setiap Tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik	- Persentase Pencapaian Penerima Layanan	70,22%	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan Jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah)	Setiap Tahun	

		Dasar (80%) Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)	6,91 %			domestik yang akan dipenuhi)		
--	--	--	-----------	--	--	---------------------------------	--	--

4.3.3 REALISASI

Realisasi Program dan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 yang mendukung pelayanan dasar Pemenuhan kebutuhan pokok air minum curah lintas Kabupaten/Kota pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Morowali yang bersumber dari dana DAU dan DAK terlaksana dengan atau 100 % adalah sebagai berikut :

N O	Jenis Pelayana Dasar	REALISASI
1	PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	89%
	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	94%
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	99%

4.3.4 ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapandan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari APBD Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2023

- Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum
Rp. 33.576.743.674
- Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestic
Rp. 300.000.000.-

4.3.4 DUKUNGAN PERSONIL

Dukungan personil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali memiliki sumberdaya manusia aparatur sebanyak 149 orang yang terdiridari 55 orang PNS, dan 94 Orang pegawai non PNS. Data yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM menurut Menurut Pangkat/Golongan Ruang.

Tabel 4.10

No	Golongan	Jumlah		Jumlah Total
		Laki	Perempuan	
1.	IV/b	1 orang	-	1 orang
2.	IV/a	3 orang	-	3 orang
3.	III/d	6 orang	5 orang	11 orang
4.	III/c	4 orang	2 orang	6 orang
5.	III/b	6 orang	2 orang	8 orang
6.	III/a	9 orang	4 orang	13 orang
7.	II/d	5 orang	-	5 orang
8.	II/c	2 orang	1 orang	3 orang
9.	II/b	3 orang	1 orang	4 orang
10.	I/d	1 orang	-	1 orang
11.	PHL	62 orang	32 orang	94 orang
JUMLAH				149 orang

4.3.5 PERMASLAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan dan Solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

- a. Belum semua urusan yang telah didelegasikan kepada daerah memiliki SPM yang dikeluarkan oleh kementerian.
- b. Belum samanya pemahaman tentang implementasi SPM.
- c. Indikator SPM masih banyak yang belum diinternalisasikan sebagai target kinerja (output/outcome) dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- d. Kualitas perencanaan dan pemrograman perlu ditingkatkan untuk menyusun rencana dan program yang optimal dalam upaya pencapaian SPM.
- e. Belum sinerginya upaya implementasi SPM.
- f. Belum adanya pedoman operasional lanjutan pelaksanaan SPM.
- g. Belum tersedianya database yang akurat di setiap urusan.
- h. Monitoring dan evaluasi masih minim untuk menghasilkan data capaian SPM tiap tahun.

4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimum Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat, mencakup SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal yang dimaksud sebagai berikut :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan

- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

4.4.2 TARGET PENCAPAIAN SPM OELH DAERAH

Pemenuhan Standar pelayanan Minimal Bidang Perumahan dapat dilaksanakan melalui:

Tebel. 4.11
TARGET CAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Terbangunnya Rumah Akibat Korban Bencana	100%	1 Tahun	- Terbangunnya Rumah Akibat Korban Bencana - Terehapnya rumah Akibat Korban Bencana Alam	280%	1 Tahun	

2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Terpenuhinya Rumah Akibat Relokasi Program Pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0%	1 Tahun	- Terbangunnya Rumah Akibat Relokasi Program Pemerintah - Terehapnya Rumah Akibat Relokasi Program Pemerintah	0	1 Tahun	
---	---	--	----	---------	--	---	---------	--

4.4.1 REALISASI

Tabel 4.12

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Ket
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Terbangunnya Rumah Akibat Korban Bencana	18 Unit	18 Unit	
		Terehabnya Rumah Akibat Korban Bencana Alam			
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Terbangunnya Rumah Akibat Relokasi Program pemerintah	12 Unit	12 Unit	
		Terehappnya Rumah Akibat Relokasi Program Pemerintah	0	0	

4.4.1 ALOKASI ANGGARAN

Adapun Program dan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022 yang mendukung pelayanan dasar Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dengan Anggaran sebesar :

- Program Pengembangan Perumahan / Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu
 - Terbangunnya Rumah Akibat Korban Bencana Rp. 700.000.000,-
 - Terehabnya Rumah Akibat Korban Bencana Alam Rp. 250.000.000,-

4.4.3 DUKUNGAN PERSONIL

Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Morowali dibantu oleh 69 Orang yang terdiri dari PNS : 30 Orang dan PHL : 35 Org

Tabel 4.13

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JML	STATUS		KETERANGAN
			PNS	PHL	
1.	S-2	6	6	-	
2.	S-1	32	16	16	

3.	D-3	1	-	1	
4.	D-2/D-1/SMA	26	8	18	
	JUMLAH	66	30	35	

4.4.6 PERMASLAHAN DAN SOLUSI

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Morowali pada Tahun 2022adalah :

- Pengumpulan data untuk mengevaluasi kegiatan masih belum optimal terutama sumber data yang berasal dari Desa/Kelurahan dan Kecamatan maupun pelayanan Perumahan lainnya yang berada di Kab morowali dalam ketepatan waktu laporan serta pemahaman akan definisi operasional dari masing – masing indikator yang masih kurang.
- Sumber Daya Manusia secara jumlah dan kualitas terutama masih dirasakan kurang terutama Teknis yang memahami Penuh tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perumahan
- Sumber Dana Pendukung Kegiatan Bantuan Perumahan yang bersumber Dana dari APBN dan APBD.
- Belum Adanya Legalitas Dokumen Perencanaan RP3KP dan RP2KPKP sebagai Acuan Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman dikabupaten Morowali sebagai dasar untuk Pengembangan Perumahan serta Pengembangan Kawasan di Kabupaten Morowali.
- Pengelolaan Data Base perumahan yang masih belum akurat dikarenakan tidak Adanya Dukungan Aplikasi Online Antara Desa Kelurahan Kecamatan dan di Kabupaten Khususnya Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan.
- Ketidak Pahaman TIM TAPD dan Juga Penanggung Jawab Pelaporan SPM tentang pentingnya Penyediaan Anggaran

Bagi Program dan Kegiatan yang terkait dengan Pelaporan SPM bagi Setiap SKPD.

c. Solusi

Untuk mengoptimalkan pengumpulan data perlu adanya peningkatan koordinasi antar Desa/Kelurahan Kecamatan dan Pihak Kabupaten Khususnya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Morowali.

Kegiatan pelayanannya melalui laporan tepat waktu serta peningkatan pemahaman indikator SPM bidang Perumahan di semua sarana yang ada di Kab morowali, Membangun Sistem Informasi Perumahan dengan pendekatan teknologi (bukan manusia) system Aplikasi agar data diperoleh secara “Real Time“ dan Penambahan Sumber Daya Manusia yaitu Tenaga Teknis yang memahami Bidang Perumahan dengan mengikutsertakan dalam Pelatihan-pelatihan atau Bimbingan Teknis Masalah perumahan.

Mengalokasikan Dana Pendukung Operasional Masalah Bantuan-bantuan Bidang Perumahan Khususnya DAK dan Bantuan APBN Bid Perumahan, serta menyusun seluruh Dokumen Perencanaan terkait dengan Bantuan Rumah Korban Bencana Alam Khususnya.

Pemahaman akan pentingnyaPenyediaan Anggaran oleh Tim TAPD dan juga Bagian Tata Pemerintahan selaku Penanggung jawab dari Pelaporan yang berkaitan dengan Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan pelaporan Standar pelayanan Minimum.

4.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1 JENIS PELAYANAN DASAR

- 1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 2. Pelayanan dan penyelamatan evakuasi korban kebakaran
- 3. Pelayanan informasi rawan bencana
- 4. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- 5. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana

4.5.2 TARGET PENCAPAIAN SPM OELH DAERAH

Target pencapaian SPM satpol pp daerah kab.morowali telah memasukan target SPM pada RPJMD target pencapaian SPM pada program ketertiban umum dan ketentraman masyarakat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah seabgaiaman dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4.14

TARGET DAN PENCAPAIAN INDIKATOR SPM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH KABUPATEN MOROWALI

NO	JENIS PELAYANAN	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan
		Penerima Pelayanan dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		INDIKATOR	Target	Batas waktu	INDIKATOR	Target	Batas waktu	
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, jasa dan Sumber daya manulasi	100%	Setiap Tahun	Indikator Mutu minimal layanan dasar berupa barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang di tetapkan statndar teknis mutu pelayanan bidang ketentraman ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kab/kota
2.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, jasa dan Sumber daya manulasi	100%	Setiap Tahun	
3.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, jasa dan Sumber daya manulasi	100%	Setiap Tahun	
4.	Pelayanan pencegahan dan	Jumlah warga Negara yang memperoleh	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, jasa dan	100%	Setiap Tahun	

	kesiapsiagaan terhadap bencana	layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			Sumber daya manulasi			
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Satiap Tahun	Jumlah Barang, jasa dan Sumber daya manulasi	100%	Satiap Tahun	5

4.5.3 REALISASI

4.5.4 ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran lingkup Satpol pp daerah kab. Morowali untuk mendukung penerapan SPM berkaitan dengan tugas pokok nya yang bersifat pelayanan dasar baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar RP 1.704.320.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 1.535.021.845

4.5.5 DUKUNGAN PERSONIL

5

Keadaan Personil menurut Pangkat / Golongan Ruang
Per Bulan Desember Tahun 2023

No.	Pangkat/GolonganRuang	Jumlah
1.	Golongan IV	4
2.	Golongan III	14
3.	Golongan II	12
4.	Golongan I	0
5.	PHL/TenagaKontrak	375
	JUMLAH	405

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023

4.5.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

- a. Permasalahan
 - 1. Kurangx sarana mobilitas yang cukup memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan patrol wilayah se kabupaten morowali
 - 2. Belum ada PPNS di satuan polisi pamong praja sehingga tidak bisa melakukan penyidikan.
 - 3. Alokasi anggaran kegiatan sangat minim sehingga keterbatasan dalam melaksanakan tugas

- b. Solusi
1. Perlu dianggarkan/ pengadaan kendaraan operasional lapangan dengan berkoordinasi dan konsultasi pada pihak pemerintah kabupaten morowali mauput pemerintah provinsi/ pusat melalui bantuan hibah
 2. Penambahan porsinil anggota pol-pp kabupaten morowali untuk pendidikan PPNS.

4.6 URUSAN SOSIAL

4.6.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Jenis pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Morowali adalah sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Skala Kab/Kota.
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/ Kota.
- e. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.

4.6.2 TARGET PENCAPAIAN SPM OELH DAERAH

Nilai rata-rata Target capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Morowali Tahun 2023 adalah 69,54 % dengan rincian target capaian :

- | | | | |
|---|-------|-------|------|
| 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar target sejumlah 39,08 % | | | |
| 2. Perlindungan Korban Bencana Alam Kabupaten/Kota target sebesar 100%. | Untuk | Tahun | 2023 |

Tabel 4.15

TARGET DAN PENCAPAIAN INDIKATOR SPM
URUSAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN MOROWALI

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti	Presentase penyandang Disabilitas, Lanjut Usia dan Anak Terlantar yang mendapatkan bantuan Sosial	41,1 %	2019-2023	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia dan Anak Terlantar	Setiap Tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar
2	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap	Presentase korban bencana	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang, jasa dan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara	Setiap Tahun	
		kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi				korban bencana kabupaten/ kota yang akan dipenuhi)		

4.6.3 REALISASI

Nilai Rata-Rata Capaian SPM Bidang urusan Sosial Kabupaten Morowali tahun 2023 mencapai 95,35 % dimana target 69,54% sedangkan realisasi yaitu 69,29 %, belum mencapai target hal ini disebabkan karena indicator untuk Presentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar semula target sejumlah 39,08 % realisasi 38,57% hal ini disebabkan karena adanya ketambahan jumlah populasi pada indicator presentase anak terlantar.

4.6.4 ALOKASI SANGGARAN

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Morowali yang bersumber dari Dana APBD sebesar Rp. 15,081.448.750 dan APBN sebesar Rp.554.000.000

4.6.5 DUKUNGAN PERSONIL

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Morowali didukung oleh Sumber Daya Manusia baik sebagai ASN maupun Non ASN. Personil pendukung tersebut antara lain :

DATA DAN REKAPITULASI JUMLAH SUMBERDAYA MANUSIA KESEJAHTERAAN SOSIAL
(SDM KESOS)
KABUPATEN/KOTA MOROWALI

NO	NAMA	JENIS SDM KESOS (PEKSOS/PENSOS/TKS /RELAWAN SOSIAL)	NAMA KELEMBAGAAN/ SARANA PRASARANA	STATUS SDM		REKRUITMEN DAN PEMBINAAN			KET
				ASN	MASYARAKAT	PUSAT	PROVINS	KAB/KOTA	
1	3	3	4	5	6	7	8	9	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Anak telantar, Lansia Terlantar, Gelandnagan Pengemis di dalam panti/lembaga									
1	Hasnah, SE	Tenaga Kesos	Bidang Rehabikitasi Sosial	ASN				Kab/Kota	
2	Syubah, SE							Kab/Kota	
		Tenaga Kesos	Bidang Rehabikitasi Sosial	ASN					
3.	Anita, M. Karim	Tenaga Kesos							
4.	Budianto Ampai	Tenaga Kesos		ASN				Kab/Kota	
5.	Abd. Malik	Tenaga Kesos		ASN				Kab/Kota	
6.	Yeni	Tenaga Kesos		ASN				Kab/Kota	
7.	Moh. Amin, S.Sos	Tenaga Kesos	Bidang Rehabikitasi Sosial	ASN				Kab/Kota	
	Fauzy Hasyim	Pekerja Sosial	Bidang Rehabikitasi Sosial		Masyarakat	Pusat			
	Total			8	1				

Perlindungan Korban Bencana Alam Skala Kab/Kota									
			Bidang Perlindungan dan jaminan Sosial						
1.	Mustan, S.Sos	Tenaga Kesos		ASN				Kab/Kota	
2.	Yakup, S.Sos	Tenaga Kesos		ASN				Kab/Kota	
	Suriani Kasili	Tenaga Kesos	Bidang Perlindungan dan jaminan Sosial	ASN				Kab/Kota	
3..	Mujarmin	Relawan			Masyarakat			Kab/Kota	
5.	Usman	Relawan			Masyarakat			Kab/Kota	
6.	Ramlan	Relawan			Masyarakat			Kab/Kota	
7.	Iksan	Relawan	Bidang Perlindungan dan jaminan Sosial		Masyarakat			Kab/Kota	
	Mudiarsyah	Relawan			Masyarakat	Pusat			
9.	Hasnih Sonaru	Relawan			Masyarakat	Pusat			
10	Julfan	Relawan			Masyarakat	Pusat			
11	Armiyanti	Relawan	TAGANA		Masyarakat	Pusat			
12	Hidayati	Relawan			Masyarakat	Pusat			

13	Idris	Relawan	TAGANA		Masyarakat	Pusat			
14	Mustamin	Relawan	TAGANA		Masyarakat	Pusat			
15	Aswardan	Relawan	TAGANA		Masyarakat	Pusat			
16	Nashariansyah Pratama	Relawan	TAGANA		Masyarakat	Pusat			
17	Yulyana	Relawan	TAGANA		Masyarakat	Pusat			
18	Siratal	Relawan	TAGANA		Masyarakat	Pusat			
19	Relifiun Adima	Relawan	TAGANA		Masyarakat	Pusat			
20	Rifai Basari	Relawan	TAGANA		Masyarakat	Pusat			
21	Nuranita	Relawan	TAGANA		Masyarakat	Pusat			
22	Imran Ludin	Relawan	TAGANA		Masyarakat	Pusat			
23	Saharudin	Relawan	TAGANA		Masyarakat	Pusat			
24	Madi	Relawan	TAGANA		Masyarakat	Pusat			
25	Jasman Maulan	Relawan	TAGANA		Masyarakat	Pusat			
26	Risno Pombala	Relawan	TAGANA		Masyarakat	Pusat			
27	Muh. Fahrul Subeo	Relawan	TAGANA		Masyarakat	Pusat			
28	Herman	Relawan	TAGANA		Masyarakat	Pusat			
29	Sabran Anwar	Relawan	TAGANA		Masyarakat	Pusat			
30	Mahaedin	Relawan	TAGANA		Masyarakat	Pusat			

	Total			3	27				
--	-------	--	--	---	----	--	--	--	--

NO	NAMA	JENIS SDM KESOS (PEKSOS/PENSOS/TKS/RE LAWAN SOSIAL)	NAMA KELEMBAGAAN/ SARANA PRASARANA TEMPAT PEKERJA	STATUS SDM		REKRUITMEN DAN PEMBINAAN			KET
				ASN	MASYARAKAT	PUSAT	PROVINS	KAB/KOTA	
1	3	3	4	5	6	7	8	9	1
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Anak telantar, Lansia Terlantar, Gelandnagan Pengemis di dalam panti/lembaga									
1	Mustan, S.Sos	Tenaga Kesos	Bidang Rehabikitasi Sosial dan Pelestarian Nilai Kepahlawanan	ASN				Kab/Kota	
2	Syubah, SE	Tenaga Kesos		ASN				Kab/Kota	
3	Masfufah, S.Sos	Tenaga Kesos		ASN				Kab/Kota	
4	Suriani Kasili	Tenaga Kesos	Bidang Rehabikitasi Sosial dan Pelestarian Nilai Kepahlawanan	ASN				Kab/Kota	
5.	Budianto Ampai	Tenaga Kesos		ASN				Kab/Kota	
6.	Abd. Malik	Tenaga Kesos		ASN				Kab/Kota	
7.	Yeni		Bidang Rehabikitasi Sosial dan Pelestarian Nilai Kepahlawanan	ASN				Kab/Kota	
8.	Moh. Amin, S.Sos	Tenaga Kesos		ASN				Kab/Kota	
	Fauzy Hasyim	Pekerja Sosial			Masyarakat	Pusat			
	Total			8	1				

Perlindungan Korban Bencana Alam Skala Kab/Kota									
			Bidang Pemberdayaan Sosial dan Tanggap darurat						
1.	Yakup, S.Sos	Tenaga Kesos		ASN				Kab/Kota	
2.	Yudran	Tenaga Kesos		ASN				Kab/Kota	
3.	Marjudin, S. Sos, M.Ling	Tenaga Kesos	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Tanggap Darurat	ASN				Kab/Kota	
4..	Mujarmin	Relawan			Masyarakat			Kab/Kota	
5.	Usman	Relawan			Masyarakat			Kab/Kota	
6.	Ramlan	Relawan	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Tanggap Darurat		Masyarakat			Kab/Kota	
7.	Iksan	Relawan			Masyarakat			Kab/Kota	
	Mudiarsyah	Relawan			Masyarakat	Pusat			
9.	Hasnih Sonaru	Relawan	TAGANA		Masyarakat	Pusat			
10	Julfan	Relawan			Masyarakat	Pusat			
11	Armiyanti	Relawan			Masyarakat	Pusat			
	Hidayati	Relawan	TAGANA		Masyarakat	Pusat			
13	Idris	Relawan	TAGANA		Masyarakat	Pusat			

	Mustamin	Relawan	TAGANA		Masyarakat	Pusat			
15	Aswardan	Relawan	TAGANA		Masyarakat	Pusat			
16	Nashariansyah Pratama	Relawan	TAGANA		Masyarakat	Pusat			
17	Yulyana	Relawan	TAGANA		Masyarakat	Pusat			
18	Siratal	Relawan	TAGANA		Masyarakat	Pusat			
19	Relifiun Adima	Relawan	TAGANA		Masyarakat	Pusat			
20	Rifai Basari	Relawan	TAGANA		Masyarakat	Pusat			
	Nuranita	Relawan	TAGANA		Masyarakat	Pusat			
22	Imran Ludin	Relawan	TAGANA		Masyarakat	Pusat			
23	Saharudin	Relawan	TAGANA		Masyarakat	Pusat			
24	Madi	Relawan	TAGANA		Masyarakat	Pusat			
25	Jasman Maulan	Relawan	TAGANA		Masyarakat	Pusat			
26	Risno Pombala	Relawan	TAGANA		Masyarakat	Pusat			
27	Muh. Fahrul Subeo	Relawan	TAGANA		Masyarakat	Pusat			
28	Herman	Relawan	TAGANA		Masyarakat	Pusat			
29	Sabran Anwar	Relawan	TAGANA		Masyarakat	Pusat			
30	Mahaedin	Relawan	TAGANA		Masyarakat	Pusat			
	Total			3	27				

4.6.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Secara umum kendala dan permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Morowali dalam mengimplementasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) antara lain meliputi :

❖ Permasalahan :

- Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani;
- Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal.

❖ Solusi :

- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dengan masalah penanganan PMKS;
 - Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- ✓ Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PMKS. PMKS

4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN

4.7.1 BIDANG PENDIDIKAN

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berkaitan dengan Penerapan dan Pencapaian SPM:

Tabel 4.17

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	JUMLAH (Rp)	
				ANGGARAN	REALISASI
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	DAK FISIK, PAD	17.195.321.920	16.711.747.971
		Penambahan Ruang Kelas Baru	DBH, DAU	7.563.875.927,00	6.486.229.206,00
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/T U	DAU	3.099.541.204,00	2.960.917.599,00
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	DAU	1.536.089.191,00	1.514.447.000,00
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DBH, DAU	3.099.065.188,00	3.067.489.774,00
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/P enjaga Sekolah	DAU	2.794.999.592,00	2.789.263.949,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	DAU	3.086.914.417,00	2.978.976.742,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/T U	DAU	33.667.973,00	32.928.000,00
		Pengadaan Mebel Sekolah	DAU	1.200.796.800,00	1.196.978.750,00
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	PAD	378.235.000,00	0,00
		Pengadaan Perlengkapan Siswa	PAD	349.966.000,00	349.573.450,00
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	PAD	234.874.580,00	65.315.000,00
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	PAD	333.747.670,00	328.856.920,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	PAD	2.248.701.720,00	2.203.915.500,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	PAD	21.013.160.000,00	20.873.000.000,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	PAD	434.302.380,00	398.976.840,00
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	DAK NON FISIK	18.381.309.142,00	0,00
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	PAD	152.707.330,00	98.677.088,00
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	DAK FISIK, PAD	14.033.990.064,00	13.807.621.497,00
		Penambahan Ruang Kelas Baru	DAU	2.208.129.801,00	1.491.538.935,00

		Pembangunan Ruang Guru/KepalaSekolah/T U	DAU	927.509.806,0 0	482.402.704,0 0
		Pembangunan Rumah Dinas KepalaSekolah/Guru/P enjagaSekolah	DAU	499.999.920,0 0	482.402.704,0 0
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan UtilitasSekolah	DAU	812.723.503,0 0	811.563.948,0 0
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang KelasSekolah	DAU	162.831.888,0 0	162.248.000,0 0
		PengadaanPerlengkapanaSiswa	PAD	20.795.398.90 0,00	20.626.163.90 0,00
		Perlengkapan Belajar Peserta Didik	DAU	3.919.879.000, 00	3.900.920.000, 00
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan UjianbagiPeserta Didik	PAD	313.240.350,0 0	96.899.750,00
		Pembinaan Minat, Bakat dan KreativitasSiswa	PAD	441.636.510,0 0	439.767.510,0 0
		PenyediaanPendidik dan Tenaga KependidikanbagiSatua n Pendidikan SekolahMenengahPerta ma	PAD, DBH	14.010.565.44 0,00	14.132.844.44 0,00
		Pengelolaan Dana BOS SekolahMenengahPerta ma	DAK NON FISIK	7.273.849.142, 00	0,00
		PeningkatanKapasitasP engelolaan Dana BOS SekolahMenengahPerta ma	PAD	189.898.110,0 0	169.070.500,0 0
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	DAU	2.752.600.634, 00	2.669.057.722, 00
		PenyediaanBiayaPerson ilPeserta Didik PAUD	PAD	1.820.000.000, 00	1.820.000.000, 00
		Penyiapan dan TindakLanjutEvaluasiS atuan PAUD	PAD	163.592.770,0 0	159.892.770,0 0
		PenyediaanPendidik dan Tenaga KependidikanbagiSatua n PAUD	PAD	4.089.000.000, 00	3.971.000.000, 00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	PAD	139.659.070,0 0	133.447.410,0 0
		PembinaanKelembagaa n dan Manajemen PAUD	PAD	122.337.650,0 0	113.617.650,0 0
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	DAK NON FISIK	4.852.200.000, 00	0,00
		PeningkatanKapasitasP engelolaan Dana BOP PAUD	PAD	163.644.580,0 0	156.750.941,0 0
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kes etaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	PAD	1.806.165.340, 00	1.711.552.055, 00
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	DAK NON FISIK	1.384.200.000, 00	0,00

4.7.2 BIDANG KESEHATAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKPRujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota :

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nilai Pagu Anggaran
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
A	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	
1	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Rp. 30.077.506.760
I	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
A	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota</i>	
1	Pengadaan Obat, Vaksin	Rp. 4.152.568.849
2	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Rp. 5.297.029.042
3	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP),	Rp. 60.938.200

	Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	
B	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp. 313.533.400
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp. 79.270.000
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	Rp. 65.170.500
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp. 0
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	Rp. 0
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp. 132.923.000
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp. 91.171.375
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp. 10.036.625
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Rp. 7.570.000
10	Pengelolaan Pelayanan	Rp. 15.305.000

	Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp. 55.603.000
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp. 207.033.250
TOTAL		Rp. 40.565.659.001

4.7.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

Tabel 4.18

NO	PROGRAM/KEGAIATAN		REALISASI	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		81%	13,447,170,343
	-	AdministrasiKeuanganPerangkat Daerah	78,65 %	9,352,038,318
	-	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	99,5%	24,116,000
	-	Adiministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99,25%	412,240,000
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.22%	3,067,448,025
	-	Penyedia Jasa PenunjangUrusanPemerintah Daerah	93.71%	150,340,000
	-	Pemelihara Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96.50%	440,988,000
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		89%	26,400,571,803
	-	Pengelola SDA dan BangunanPengaman Pantai Pada Wilayah Suangai (WS) dalam 1 (Satu)Daerah Kab/Kota	89%	14,715,036,062
	-	Pengembangan dan PengelolaanSsistemIrigasi primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang LuasnyaDibawah 1000 Ha dalam 1(Satu)Daerah Kab/Kota	88%	11,685,535,741
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		94%	7,176,171,871
	-	Pengelolaan dan PengembanganSsistempenyediaan air Minum (SPAM) Di Daerah Kab/Kota	94%	7,176,171,871

4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		99%	300,000,000
	-	Pengelolaan dan PengembanganSistem Air LimbahDomestik Dalam Daerah Kab/Kota	99%	300,000,000
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		83%	10,816,035,046
	-	Pengelola dan PengembanganSsistemDrainase yang TerhubungLangsungDenganSunagi Dalam daerahKab/Kota	83%	10,816,035,046
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		98%	34,468,824,118
	-	PenyelenggaraanBangunan Gedung Di wilayah Daerah kab/kota,Pemberianizinmendirikanbangunan (IMB) dan sertifikastlaikfungsibangunangedung	98%	34,468,824,118
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		94%	286,576,500
	-	Penyelenggaraan, PenataanBangunan dan Lingkunganyadi Daerah Kab/Kota	94%	286,576,500
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		95%	243,853,061,178
	-	Penyelenggaraan Jalan kab/kota	95%	243,853,061,178
9	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		99%	141,506,764
	-	PenyelenggaraanPelatihanTenagaTerampilKonstruksi	99%	141,506,764
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		99%	
	-	PenetapanRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RencanaRinci Tata Raung (RRTR) Kab/Kota	97%	101,341,000
	-	Koordinasi dan SinkronisasiPerencanaan tata ruang Daerahm Kab/Kota	99%	311,058,040
	-	Koordinasi dan SinkronisasiPemanfaatanruangDaerah Kab/Kota	96%	58,843,186
	-	Koordinasi dan SinkronisasiPengendalianPemanfaatanruang DaerahKab / kota	94%	202,657,200

4.7.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan di masa yang akan datang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.morowali tahun 2021 – 2023, dan Untuk Program Kegiatan Pada Tahun 2023 adalah sebagai Berikut :

No	Program / Kegiatan	Indikator Output	Indikator Outcome	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengembangan Perumahan / Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat Kurang mampu	Terbangunnya Rumah Akibat Korban Bencana	Adanya Rumah akibat korban bencana	Rp. 700.000.000,-	18 Unit
		Terehabnya Rumah Akibat Korban Bencana Alam		Rp. 250.000.000,-	12 Unit
2.	Program Rumah Korban Bencana/relokasi Program pemerintah	Terbangunnya Rumah Akibat Relokasi Program pemerintah	Adanya rumah akibat relokasi program pemerintah	0	
		Terehabnya Rumah Akibat Relokasi Program Pemerintah		0	‘
3	Program Pengembangan Perumahan / Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat Kurang mampu	Tersediaanya Data Rumah Akibat korban bencana dan relokasi program pemerintah	Adanya data base Rumah Korban bencana/rumah akibat relokasi program pemerintah	0	

4.7.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No	Program pembangunan daerah	Kegiatan	pagu	Keterangan
1.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan.	175.250.000	175.222.545
		Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertibsn umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	14.400.000	10.950.000
		Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketrtiban umum	83.100.000	83.030.000
		Penindakan Atas Gangguan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan PERKADA melalui penertiban dan penanganan Unjuk Rasa dan Kerusahn Massal	18.300.000	17.000.000
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia.	1.340.270.000	1.178.475.700
2.	Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah/ kota	45.750.000	45.593.600
		Pencegahan Kebakaran dalam	27.250.000	24.750.000

	penyelamatan non kebakaran	daerah Kabupaten/ KOta		
--	-----------------------------------	------------------------	--	--

4.7.6 URUSAN SOSIAL

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk mendukung penerapan dan percepatan SPM Kabupaten Morowali terdapat 3 Program, 3 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan yang terdiri dari :

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran(Rp)
1	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Pemakanan	8.477.520.000
			Penyediaan Sandang	146.470,400
			Penyediaan Alat Bantu	57.051.000

2.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-anak terlantar	Penjangkauan anak-anak terlantar	6.007.384.000
----	---	--	--	---------------

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Morowali sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan tugas pemerintahan.

Secara substantif penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Morowali dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah yang merupakan tujuan penerapan otonomi daerah. Secara normatif, pelaksanaan kegiatan dalam kerangka pelaksanaan 24 urusan wajib, 6 urusan pilihan, pelaksanaan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, yang telah dituangkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Tahun 2018 – 2023 melalui Strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten yang dipilih untuk mencapai tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali tahun 2018 – 2023 .

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), pada hakekatnya merupakan wujud hubungan antara penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan secara aplikatif menjadi wahana dan sarana bagi Pemerintah untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali pada Tahun 2023. Dan pada gilirannya dapat meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Daerah Kabupaten dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Morowali didukung oleh Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang ada, serta dukungan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Morowali, kami sangat mengharapkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh

komponen penyelenggara pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Morowali mulai dari proses perumusan, penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mengoptimalkan dan mendayagunakan seluruh potensi sumber daya yang ada dalam upaya mewujudkan masyarakat Morowali yang sejahtera Bersama.

Kabupaten Morowali dengan Jumlah Penduduk 183.957 jiwa berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali Tahun 2023 yang terdiri dari 10 Kecamatan dengan Jumlah Desa/Kelurahan 126 Desa dan 7 Kelurahan dengan Luas Wilayah 5.472 Km² .

Belanja Daerah Kabupaten Morowali ditargetkan sebesar Rp2.150.817.432.038,00 dan terealisasi sebesar Rp2.021.816.876.638,07 atau 94,00 % yang terdiri dari Belanja Operasi dengan target Sebesar Rp.1.355.055.336.663,00 dan terealisasi sebesar RP. 1.250.162.885.130,07 atau 92,26 % , Belanja Modal yang ditargetkan sebesar Rp. 564.149.367.353,00 dan terealisasi sebesar Rp. 543.928.058.678,00 atau 96,42 % , Belanja Tidak terduga yang ditargetkan sebesar Rp. 1.018.657.154,00 dan terealisasi sebesar Rp. 912.948.000,00 atau 89,62% dan Belanja Transfer yang ditargetkan sebesar Rp. 230.594.070..868,00 dan terealisasi sebesar Rp. 226.812.984.830,00 atau 98.36 %

Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali dititik beratkan pada Proram Pembangunan Daerah dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Morowali 2018 – 2023, Pemerintah Kabupaten Morowali akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penerapan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik. Selanjutnya, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan mewujudkan visi serta misi Kabupaten Morowali, dengan harapan keadaan masyarakat Kabupaten Morowali yang lebih sejahtera lahir dan batin pada akhir tahun 2023.

 PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI INSPEKTORAT DAERAH	Disusun oleh Ketua Tim Tanggal :	Baharudin Hallang, S.Si 15 Februari 2024
CATATAN HASIL REVIU (CHR) LPPD KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2023 KKR – 03	Direviu oleh Dalnis : Tanggal :	Ramlan, S.T, M.Si 16 Februari 2024
	Disetujui oleh Penanggungjawab : Tanggal	
Uraian Catatan Hasil Reviu	Indeks KKR	
I. Sistematika dan Materi LPPD Berhubung Draf Rancangan LPPD dalam bentuk sistematika Laporan dan muatan materi LPPD belum dapat disajikan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali, karena masih dalam tahapan proses penyusunan pada saat pelaksanaan Reviu LPPD Sesuai Surat Perintah Nomor : 094/0178/ST/ITDAKAB/2024 Tanggal 01 Februari 2024 sehingga terhadap Sistematika dan Materi LPPD belum dapat dilakukan penelaahan dokumen atas sistematika dan Materi LPPD.	KKR.01	
II. Pencermatan data Dukung IKK Outcome Berdasarkan penelaahan atas bukti dukung IKK Hasil (Outcome), serta IKK fungsi penunjang urusan pemerintahan terhadap 32 Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh 24 OPD terkait pada saat reviu manual atas ketersediaan informasi dan data IKK pada prinsipnya OPD terkait telah melaksanakan urusan sesuai dengan kewenangannya, namun sampai dengan tanggal 15 Februari 2024 Jam 12:00 Wita dari hasil pemantauan Tim Reviu atas Dokumen IKK Outcome yang telah diinput dan diupload OPD ke Aplikasi SI-LPPD baru mencapai 75 IKK Outcome dari 125 IKK sehingga masih ada 50 IKK Outcome yang belum diisi, sebagaimana daftar terlampir. Adapun Perangkat Daerah yang belum mengisi IKK Outcome kedalam Aplikasi SI LPPD yaitu sebagai berikut: 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dari 3 IKK Outcome belum ada yang terisi. 2. Dinas Sosial; dari 2 IKK Outcome belum ada yang terisi. 3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; dari 3 IKK Outcome belum ada yang terisi. 4. Dinas Lingkungan Hidup; dari 3 IKK Outcome belum ada yang terisi. 5. Dinas Perhubungan; dari 3 IKK Outcome belum ada yang terisi. 6. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah; dari 3 IKK Outcome belum ada yang terisi. 7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dari 8 IKK Outcome belum ada yang terisi. 8. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dari 11 IKK Outcome baru 4 yang terisi masih tersisa 7 IKK yang belum diisi. 9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi daerah; dari 5 IKK Outcome baru 4 yang tersisi masih tersisa 1 IKK yang belum diisi. 10. Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Daerah; dari 3 IKK Outcome belum ada yang terisi. 11. Bagian ULP; dari 4 IKK Outcome baru 2 yang terisi masih tersisa 2 IKK yang belum terisi.	KKR.02	
Kesimpulan : 1. Rancangan Awal LPPD Tahun 2023 belum sesuai jadwal tahapan penyusunan sebagaimana Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2023 poin (D) Jadwal Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah angka (3) Rancangan Awal LPPD disusun pada Minggu kedua Januari, angka (4) Rancangan LPPD disampaikan kepada APIP pada Minggu ketiga s/d keempat Januari akibatnya belum dapat dilakukan reviu Rancangan LPPD, reviu hanya dapat dilakukan pada pencermatan data dukung Indikator Kinerja Kunci (IKK).		

2. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan pada prinsipnya telah menyampaikan Capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan IKK Outcome dan IKK Output, namun belum sepenuhnya mengupload ke Aplikasi SI-LPPD.	
Saran : Disarankan kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penyusun LPPD: 1. Dalam Penyusunan Dokumen LPPD agar memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/8697/OTDA Tanggal 11 Desember 2023 Perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, baik dari aspek Sistematika Laporan maupun Muatan materi LPPD Kabupaten Morowali Tahun 2023. 2. Agar mengkoordinasikan ke OPD terkait yang belum mengisi IKK Outcome kedalam Aplikasi SI LPPD untuk segera mengisi Data IKK Outcome pada Aplikasi SI-LPPD. 3. Untuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) agar diperhatikan keselarasan Capaian kinerja IKK Outcome dengan IKK Output.	

Bungku, 16 Februari 2024

Pengendali Teknis,



RAMLAN, S.T, M.Si

NIP. 197210152002121006

Ketua Tim,



BAHARUDIN HALLANG, S.Si

NIP.197804272003121006

Objek Reviu:
Sekretariat Tim Penyusun LPPD
Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali.

Kepala Bagian,



ASEP HAERUDIN, S.Hut

NIP.19730424 2000121002